



LAPORAN KEUANGAN

BADAN PUSAT STATISTIK

UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(AUDITED)

2024



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pusat Statistik adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik. Di samping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2025
Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Indeks Tabel	viii
Indeks Grafik	xiii
Indeks Singkatan	xiv
Indeks CaLK LRA	xv
Indeks CaLK Neraca	xvi
Indeks CaLK LO	xvii
Indeks CaLK LPE	xviii
Indeks CaLK Pengungkapan Penting Lainnya	xix
Pernyataan Tanggung Jawab	xx
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	4
III. Neraca	5
IV. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	7
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pusat Statistik	8
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.3 Basis Akuntansi	14
A.4 Dasar Pengukuran	14
A.5 Kebijakan Akuntansi	14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1 Pendapatan Negara dan Hibah	22
B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	26
B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	28
B.1.3 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	29
B.1.4 Pendapatan Denda	30
B.1.5 Pendapatan Lain-lain	32
B.2 Belanja	35
B.2.1 Belanja Pegawai	41
B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	41
B.2.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	44
B.2.1.3 Belanja Uang Lembur	45
B.2.1.4 Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	46
B.2.2 Belanja Barang	47
B.2.2.1 Belanja Barang Operasional	48
B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional	49
B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan	51
B.2.2.4 Belanja Jasa	52



	B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan	53
	B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri	55
	B.2.2.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri	57
B.2.3	Belanja Modal	58
	B.2.3.1 Belanja Modal Tanah	59
	B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60
	B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61
	B.2.3.4 Belanja Modal Lainnya	62
C.	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	64
C.1	Aset	64
C.1.1	Aset Lancar	64
	C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	64
	C.1.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas	65
	C.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	65
	C.1.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	66
	C.1.1.5 Piutang Bukan Pajak	66
	C.1.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	69
	C.1.1.7 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	69
	C.1.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	72
	C.1.1.9 Persediaan	72
C.1.2	Aset Tetap	75
	C.1.2.1 Tanah	76
	C.1.2.2 Peralatan dan Mesin	81
	C.1.2.3 Gedung dan Bangunan	91
	C.1.2.4 Aset Tetap Lainnya	101
	C.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	105
	C.1.2.6 Akumulasi Penyusutan	111
C.1.3	Piutang Jangka Panjang	113
	C.1.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	113
	C.1.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	114
C.1.4	Aset Lainnya	114
	C.1.4.1 Aset Tak Berwujud	115
	C.1.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	117
	C.1.4.3 Aset Lain-lain	120
	C.1.4.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	123
C.2	Kewajiban	125
C.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	125
	C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga	125
	C.2.1.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak	127
	C.2.1.3 Pendapatan Yang Diterima Dimuka	127



C.2.1.4	Uang Muka Dari KPPN	128
C.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	128
C.3	Ekuitas	129
C.3.1	Ekuitas	129
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	130
D.1	Pendapatan Operasional	130
D.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	130
D.1.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	130
D.2	Beban Operasional	132
D.2.1	Beban Pegawai	132
D.2.2	Beban Persediaan	134
D.2.3	Beban Barang dan Jasa	135
D.2.4	Beban Pemeliharaan	138
D.2.5	Beban Perjalanan Dinas	139
D.2.6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	141
D.2.7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	142
D.3	Pendapatan dan Beban Non Operasional	143
D.3.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	143
D.3.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	145
D.4	Pendapatan dan Beban Non Operasional Lainnya	146
D.4.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	146
D.4.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	147
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	149
E.1	Ekuitas Awal	149
E.2	Surplus (Defisit) LO	149
E.3	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	149
E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	149
E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi	150
E.3.3	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	152
E.3.4	Koreksi Lain-Lain	155
E.4	Transaksi Antar Entitas	155
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	156
E.4.2	Transfer Masuk dan Transfer Keluar	156
E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung	157
E.4.4	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	158
E.4.5	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	158
E.5	Ekuitas Akhir	158
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	159
F.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	159
F.2	Revisi DIPA	160
F.3	Rekening BPS	164
F.4	Kerjasama Swakelola Tipe I	164
F.5	Kerjasama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme PNBPN	166
F.6	Kerjasama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme RPL	168
F.7	Hibah Langsung Dalam Negeri	168



F.8	Hibah Langsung Luar Negeri	170
F.9	Pengungkapan Program Prioritas Nasional	175
F.10	Pengungkapan Capaian Output	176
F.11	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan	183
F.12	Pengungkapan Lain-Lain	183



INDEKS TABEL

	Halaman
1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1
2. Ringkasan Neraca	2
3. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	12
4. Rincian Jumlah Satker UAKPA	12
5. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB	14
6. Penggolongan Kualitas Piutang	16
7. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	18
8. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tak Berwujud	19
9. Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja	20
10. Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program	21
11. Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana	21
12. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara	22
13. Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Neto TA 2024 dan 2023	25
14. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program	35
15. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana	36
16. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Kegiatan Menurut Sumber Dana	36
17. Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2024 dan 2023	38
18. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	39
19. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023	40
20. Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	42
21. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2024 dan 2023	43
22. Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	44
23. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2024 dan 2023	45
24. Pagu dan Realisasi Belanja Uang Lembur	45
25. Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2024 dan 2023	46
26. Pagu dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	46
27. Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito TA 2024 dan 2023	47
28. Pagu dan Realisasi Belanja Barang Operasional	48
29. Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2024 dan 2023	48
30. Pagu dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional	49
31. Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2024 dan 2023	50
32. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Berdasarkan Sumber Dana	50
33. Pagu dan Realisasi Belanja Barang Persediaan	51



34.	Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2024 dan 2023	51
35.	Realisasi Belanja Barang Persediaan Berdasarkan Sumber Dana	52
36.	Pagu dan Realisasi Belanja Jasa	52
37.	Realisasi Belanja Jasa TA 2024 dan 2023	53
38.	Realisasi Belanja Jasa Berdasarkan Sumber Dana	53
39.	Pagu dan Realisasi Belanja Pemeliharaan	54
40.	Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan 2023	54
41.	Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri	55
42.	Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2024 dan 2023	56
43.	Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berdasarkan Sumber Dana	56
44.	Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri	57
45.	Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2024 dan 2023	57
46.	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Modal	58
47.	Realisasi Belanja Barang Modal TA 2024 dan 2023	58
48.	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tanah	59
49.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023	59
50.	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60
51.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023	60
52.	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Sumber Dana	61
53.	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61
54.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023	61
55.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Sumber Dana	62
56.	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Lainnya	63
57.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023	63
58.	Rincian Aset Lancar	64
59.	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Wilayah/Satker	65
60.	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>) per Wilayah/Satker	65
61.	Rincian Piutang Bukan Pajak per Wilayah/Satker	67
62.	Mutasi Piutang Bukan Pajak	67
63.	Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak	68
64.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Wilayah/Satker	69
65.	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	70
66.	Rincian Debitur Yang Mengikuti Kebijakan CP Tahun 2024	71
67.	Rincian Debitur atas Penghapusan Piutang	72
68.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	72



69.	Rincian Persediaan	73
70.	Rincian Persediaan Per Wilayah/Satker	73
71.	Rincian Aset Tetap	75
72.	Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2024	75
73.	Perubahan Saldo Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023	76
74.	Rincian Permasalahan Tanah	81
75.	Perubahan Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023	81
76.	Perubahan Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023	91
77.	Rincian Pembelian Aset Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah	97
78.	Rincian Pengembangan Melalui KDP Aset Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah	98
79.	Rincian Pengembangan Melalui KDP Aset Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah	99
80.	Rincian Penyelesaian Nilai Aset (Langsung) Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah	99
81.	Rincian Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah	101
82.	Rincian Aset Tetap Lainnya	101
83.	Rincian KDP Per Wilayah/Satker	105
84.	Kondisi KDP Per Wilayah/Satker	106
85.	Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023	111
86.	Rincian Nilai Buku Aset Tetap	112
87.	Perbandingan Akumulasi Penyusutan antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2024	113
88.	Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	114
89.	Rincian Transaksi Piutang Tagihan TP/TGR	114
90.	Rincian Aset Lainnya	115
91.	Perubahan Saldo Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024 dan 2023	115
92.	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per Wilayah/Satker	118
93.	Perubahan Saldo Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024 dan 2023	120
94.	Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	123
95.	Rincian Nilai Buku Aset Lainnya	124
96.	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	125
97.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	126
98.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Wilayah/Satker	126
99.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Per Wilayah/Satker	127



100.	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Wilayah/Satker	128
101.	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Wilayah/Satker	129
102.	Rincian PNBP Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	130
103.	Perbandingan PNBP Lainnya LO dan LRA Per 31 Desember 2024	130
104.	Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023	132
105.	Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Per 31 Desember 2024	133
106.	Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023	134
107.	Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023	136
108.	Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA Per 31 Desember 2024	136
109.	Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 dan 2023	138
110.	Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dan LRA Per 31 Desember 2024	138
111.	Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan 2023	139
112.	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Per 31 Desember 2024	140
113.	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 2023	141
114.	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2024 dan 2023	142
115.	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023	143
116.	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO dan LRA Per 31 Desember 2024	144
117.	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023	145
118.	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	146
119.	Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO dan LRA Per 31 Desember 2024	146
120.	Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	148
121.	Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	149
122.	Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas	156
123.	Rincian Saldo Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain	156
124.	Rincian Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar	157
125.	Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung	157
126.	Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL	158
127.	Rekapitulasi Kerjasama Swakelola Tipe I	164
128.	Rincian Kerjasama Swakelola Tipe I (Settama BPS) T.A. 2024	165
129.	Rincian Kerjasama Swakelola Tipe I (Daerah) T.A. 2024	165
130.	Rekapitulasi Kerjasama Swakelola Tipe II-PNBP Berdasarkan Nilai PKS	166
131.	Rincian Nilai Kerjasama Swakelola Tipe II (Settama BPS) T.A. 2024	166
132.	Rincian Nilai Kerjasama Swakelola Tipe II (Polstat STIS) T.A. 2024	166



133	Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-PNBP Berdasarkan Anggaran dan Realisasi	167
134	Rekapitulasi Kerja Sama PNBP-Non APBN BPS	168
135	Rincian Hibah dari Pemerintah Daerah ke BPS	169
136	Rincian Hibah dari BPS ke Pemerintah Daerah	170
137	Rincian Hibah Langsung Luar Negeri (Bentuk Uang) TA 2024	170
138	Rincian Output Prioritas Nasional I	175
139	Rincian Capaian Ouput	176



INDEKS GRAFIK

	Halaman
1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 dan 2023	24
2 Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 dan 2023	26
3 Komposisi Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2024	40



INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BMN	:	Barang Milik Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
MONSAKTI	:	<i>Monitoring</i> SAKTI
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAKTI	:	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP/TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP/TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis



INDEKS CaLK LRA

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN		Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah		
	B.1 Pendapatan Negara dan Hibah	22
Catatan	B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	26
Catatan	B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	28
Catatan	B.1.3 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	29
Catatan	B.1.4 Pendapatan Denda	30
Catatan	B.1.5 Pendapatan Lain-lain	32
Belanja		
	B.2 Belanja	35
Catatan	B.2.1 Belanja Pegawai	41
	B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	41
	B.2.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	44
	B.2.1.3 Belanja Uang Lembur	45
	B.2.1.4 Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	46
Catatan	B.2.2 Belanja Barang	47
	B.2.2.1 Belanja Barang Operasional	48
	B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional	49
	B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan	51
	B.2.2.4 Belanja Jasa	52
	B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan	53
	B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri	55
	B.2.2.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri	57
Catatan	B.2.3 Belanja Modal	58
	B.2.3.1 Belanja Modal Tanah	59
	B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60
	B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61
	B.2.3.4 Belanja Modal Lainnya	62



INDEKS CaLK NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA			Halaman
	C.1	ASET	64
	C.1.1	Aset Lancar	64
Catatan	C.1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	64
Catatan	C.1.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	65
Catatan	C.1.1.3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	65
Catatan	C.1.1.4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	66
Catatan	C.1.1.5	Piutang Bukan Pajak	66
Catatan	C.1.1.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	69
Catatan	C.1.1.7	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	69
Catatan	C.1.1.8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	72
Catatan	C.1.1.9	Persediaan	72
	C.1.2	Aset Tetap	75
Catatan	C.1.2.1	Tanah	76
Catatan	C.1.2.2	Peralatan dan Mesin	81
Catatan	C.1.2.3	Gedung dan Bangunan	91
Catatan	C.1.2.4	Aset Tetap Lainnya	101
Catatan	C.1.2.5	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	105
Catatan	C.1.2.6	Akumulasi Penyusutan	111
	C.1.3	Piutang Jangka Panjang	113
Catatan	C.1.3.1	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	113
Catatan	C.1.3.2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	114
	C.1.4	Aset Lainnya	114
Catatan	C.1.4.1	Aset Tak Berwujud	115
Catatan	C.1.4.2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	117
Catatan	C.1.4.3	Aset Lain-lain	120
Catatan	C.1.4.4	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	123
	C.2	Kewajiban	125
	C.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	125
Catatan	C.2.1.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	125
Catatan	C.2.1.2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak	127
Catatan	C.2.1.3	Pendapatan Yang Diterima Dimuka	127
Catatan	C.2.1.4	Uang Muka Dari KPPN	128
Catatan	C.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	128
	C.3	Ekuitas	129
Catatan	C.3.1	Ekuitas	129



INDEKS CaLK LO

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL		Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah		
D.1	Pendapatan Operasional	130
D.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	130
Catatan D.1.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	130
D.2	Beban Operasional	132
Catatan D.2.1	Beban Pegawai	132
Catatan D.2.2	Beban Persediaan	134
Catatan D.2.3	Beban Barang dan Jasa	135
Catatan D.2.4	Beban Pemeliharaan	138
Catatan D.2.5	Beban Perjalanan Dinas	139
Catatan D.2.6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	141
Catatan D.2.7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	142
D.3	Pendapatan dan Beban Non Operasional	143
Catatan D.3.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	143
Catatan D.3.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	145
D.4	Pendapatan dan Beban Non Operasional Lainnya	146
Catatan D.4.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	146
Catatan D.4.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	147



INDEKS CaLK LPE

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			Halaman
Catatan	E.1	Ekuitas Awal	149
Catatan	E.2	Surplus (Defisit) LO	149
	E.3	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	149
Catatan	E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	149
Catatan	E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi	150
Catatan	E.3.3	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	152
Catatan	E.3.4	Koreksi Lain-Lain	155
Catatan	E.4	Transaksi Antar Entitas	155
	E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	156
	E.4.2	Transfer Masuk dan Transfer Keluar	156
	E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung	157
	E.4.4	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	158
	E.4.5	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	158
Catatan	E.5	Ekuitas Akhir	158

INDEKS CALK PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA		Halaman
F.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	159
F.2	Revisi DIPA	160
F.3	Rekening BPS	164
F.4	Kerja sama Swakelola Tipe I	164
F.5	Kerja sama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme PNPB	166
F.6	Kerja sama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme RPL	168
F.7	Hibah Langsung Dalam Negeri	168
F.8	Hibah Langsung Luar Negeri	170
F.9	Pengungkapan Program Prioritas Nasional	175
F.10	Pengungkapan Capaian Output	176
F.11	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan	183
F.12	Pengungkapan Lain-Lain	183



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2025

Kepala Badan Pusat Statistik,



Amalia Adininggar Widyasanti
Amalia Adininggar Widyasanti

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik TA 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp66.221.481.321,00 atau mencapai 243,02 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp27.249.718.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.411.827.097.514,00 atau mencapai 92,37 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.776.013.194.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Negara	27.249.718.000	66.221.481.321	243,02	378.472.797.063
Belanja Negara	4.776.013.194.000	4.411.827.097.514	92,37	7.504.604.795.902

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.374.718.042.084,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp51.921.547.997,00, Aset Tetap (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) sebesar Rp5.244.096.052.870,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp3.184.001,00, dan Aset Lainnya (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi) sebesar Rp78.697.257.216,00.

Nilai Kewajiban tersaji sebesar Rp134.903.055.440,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu nilai Ekuitas adalah sebesar Rp5.239.814.986.644,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aset				
Aset Lancar	51.921.547.997	69.382.076.214	(17.460.528.217)	(25,17)
Aset Tetap	5.244.096.052.870	5.259.776.645.128	(15.680.592.258)	(0,30)
Piutang Jangka Panjang	3.184.001	6.276.274	(3.092.273)	(49,27)
Aset Lainnya	78.697.257.216	99.404.789.554	(20.707.532.338)	(20,83)
Jumlah Aset	5.374.718.042.084	5.428.569.787.170	(53.851.745.086)	(0,99)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	134.903.055.440	131.279.754.724	3.623.300.716	2,76
Jumlah Kewajiban	134.903.055.440	131.279.754.724	3.623.300.716	2,76
Ekuitas				
Ekuitas	5.239.814.986.644	5.297.290.032.446	(57.475.045.802)	(1,08)
Jumlah Ekuitas	5.239.814.986.644	5.297.290.032.446	(57.475.045.802)	(1,08)
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	5.374.718.042.084	5.428.569.787.170	(53.851.745.086)	(0,99)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.840.049.069,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp4.453.266.216.936,00, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp4.427.426.167.867,00. Kegiatan Non Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami surplus sebesar Rp13.928.467.196,00. Defisit dari Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional menyebabkan BPS mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.413.497.700.671,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp5.297.290.032.446,00 dikurang dengan Defisit-LO sebesar Rp4.413.497.700.671,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai minus Rp22.619.292,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.356.045.274.161,00

sehingga menghasilkan Ekuitas BPS pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.239.814.986.644,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2024 didasarkan pada basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PUSAT STATISTIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
A. Pendapatan Negara dan Hibah					
A.I Pendapatan Negara					
A.I.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak					
A.I.1.a Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	B.1.1	5.188.837.000	34.398.715.135	662,94	13.108.222.360
A.I.1.b Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	B.1.2	21.600.887.000	20.044.070.941	92,79	347.950.827.133
A.I.1.c Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	B.1.3	459.994.000	1.406.882.341	305,85	2.984.945.919
A.I.1.d Pendapatan Denda	B.1.4	0	2.125.847.824	0,00	1.075.436.623
A.I.1.e Pendapatan Lain - Lain	B.1.5	0	8.245.965.080	0,00	13.353.365.028
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak		27.249.718.000	66.221.481.321	243,02	378.472.797.063
Jumlah Pendapatan Negara		27.249.718.000	66.221.481.321	243,02	378.472.797.063
A.II Hibah		0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		27.249.718.000	66.221.481.321	243,02	378.472.797.063
B. Belanja Negara					
B.1 Belanja Pegawai	B.2.1	2.575.862.350.000	2.554.664.732.721	99,18	2.319.687.669.213
B.2 Belanja Barang	B.2.2	1.995.235.676.000	1.658.893.288.228	83,17	4.875.800.083.713
B.3. Belanja Modal	B.2.3	204.915.168.000	198.269.076.565	96,76	309.117.042.976
Jumlah Belanja Negara		4.776.013.194.000	4.411.827.097.514	92,37	7.504.604.795.902



Jakarta, 8 Mei 2025
Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

III. NERACA

**BADAN PUSAT STATISTIK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31-Des-24	31-Des-23
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.1	6.230.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.2	13.080.793	78.979.277
Jumlah Kas dan Bank		19.310.793	78.979.277
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1.1.3	17.435.230.541	27.174.456.006
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.1.1.4	0	61.096.562
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.5	2.041.478.916	1.583.944.337
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.1.6	(434.784.343)	(440.851.173)
Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)		1.606.694.573	1.143.093.164
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR	C.1.1.7	15.227.357.084	18.101.890.494
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.1.8	(15.190.110.920)	(17.293.092.580)
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR (<i>Netto</i>)		37.246.164	808.797.914
Jumlah Piutang (Bersih)		1.643.940.737	1.951.891.078
Persediaan	C.1.1.9	32.823.065.926	40.115.653.291
Jumlah Aset Lancar		51.921.547.997	69.382.076.214
Aset Tetap			
Tanah	C.1.2.1	3.218.598.001.809	3.203.381.161.527
Peralatan dan Mesin	C.1.2.2	2.196.281.247.356	2.183.257.236.943
Gedung dan Bangunan	C.1.2.3	2.089.954.257.109	2.030.816.486.155
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.4	35.254.629.078	38.217.040.150
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.2.5	27.044.596.490	33.118.386.227
Akumulasi Penyusutan	C.1.2.6	(2.323.036.678.972)	(2.229.013.665.874)
Jumlah Aset Tetap		6.244.096.052.870	6.269.776.645.128
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.1.3.1	3.200.000	6.307.813
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.1.3.2	(15.999)	(31.539)
Tagihan Tuntutan TP/TGR (<i>Netto</i>)		3.184.001	6.276.274
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		3.184.001	6.276.274
Aset Lainnya			
Aset tak Berwujud	C.1.4.1	424.359.166.700	409.256.575.075
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.1.4.2	47.577.860.572	54.066.534.264
Aset Lain-lain	C.1.4.3	119.625.931.594	140.593.954.423
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.1.4.4	(512.865.701.850)	(504.512.274.208)
Jumlah Aset Lainnya		78.697.257.216	99.404.789.554
JUMLAH ASET		6.374.718.042.084	6.428.669.787.170
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Pada Pihak Ketiga	C.2.1.1	134.188.923.301	130.892.802.867
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.1.2	2.258.193	963.849
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.3	692.563.153	367.660.163
Uang Muka dari KPPN	C.2.1.4	6.230.000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.1.5	13.080.793	18.327.845
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		134.903.056.440	131.279.754.724
JUMLAH KEWAJIBAN		134.903.056.440	131.279.754.724
EKUITAS			
Ekuitas	C.3.1	5.239.814.986.644	5.297.290.032.446
JUMLAH EKUITAS		5.239.814.986.644	5.297.290.032.446
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.374.718.042.084	6.428.669.787.170



Jakarta, 8 Mei 2025
Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti
Amalia Adininggar Widyasanti

IV. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PUSAT STATISTIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1.1	25.840.049.069	351.788.792.656
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		25.840.049.069	351.788.792.656
Jumlah Pendapatan Operasional		25.840.049.069	351.788.792.656
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.1	2.556.576.283.850	2.322.159.157.238
Beban Persediaan	D.2.2	62.186.017.523	160.189.367.274
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	907.860.659.689	2.964.274.912.755
Beban Pemeliharaan	D.2.4	142.774.692.030	133.184.458.787
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	563.952.482.272	1.689.124.734.641
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	221.955.168.092	241.544.873.432
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.7	(2.039.086.520)	125.381.951
Jumlah Beban Operasional		4.453.266.216.936	7.510.602.886.078
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(4.427.426.167.867)	(7.158.814.093.422)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	28.353.655.356	10.286.368.971
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	16.730.740.475	26.704.284.420
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		11.622.914.881	(16.417.915.449)
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.1	8.665.572.814	431.395.300.328
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.2	6.360.020.499	409.124.850.638
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.305.552.315	22.270.449.690
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		13.928.467.196	5.852.534.241
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(4.413.497.700.671)	(7.152.961.559.181)



Jakarta, 8 Mei 2025
Kepala Badan Pusat Statistik,

(Handwritten signature)

Amalia Adininggar Widyasanti

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN PUSAT STATISTIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	5.297.290.032.446	5.331.160.728.411
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	E.2	(4.413.497.700.671)	(7.152.961.559.181)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	117.590.891	(589.410.908)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	(23.844.077)	(35.559.360)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	1.533.394.535	(15.480.967.959)
Lain - Lain	E.3.4	(1.649.760.641)	(515.591.716)
Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		(22.619.292)	(16.621.529.943)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.356.045.274.161	7.135.712.393.159
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(57.475.045.802)	(33.870.695.965)
EKUITAS AKHIR	E.5	5.239.814.986.644	5.297.290.032.446



Jakarta, 8 Mei 2025
Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti
Amalia Adininggar Widyasanti

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Entitas dan
Rencana Strategis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional, berupaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif, dan membangun dan menyiapkan SDM yang berkualitas unggul dan adaptif.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2020-2024 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS : **“Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”**,

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesional, integritas, dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.

2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN.
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian dan analisis statistik, serta diseminasi data dan informasi statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan.

2. Program Dukungan Manajemen BPS (Dukman).

Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dengan strategi yang dilakukan adalah: (a) Meningkatkan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan; (b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan; (c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta (d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun daerah.

*Struktur
Organisasi*

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah.

Susunan organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik terdiri dari:

1. Kepala

Mempunyai tugas memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS.

2. Sekretaris Utama

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

4. Deputi Bidang Statistik Sosial



Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial.

5. Deputi Bidang Statistik Produksi

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi.

6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa.

7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik.

8. Inspektorat Utama

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.

9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.

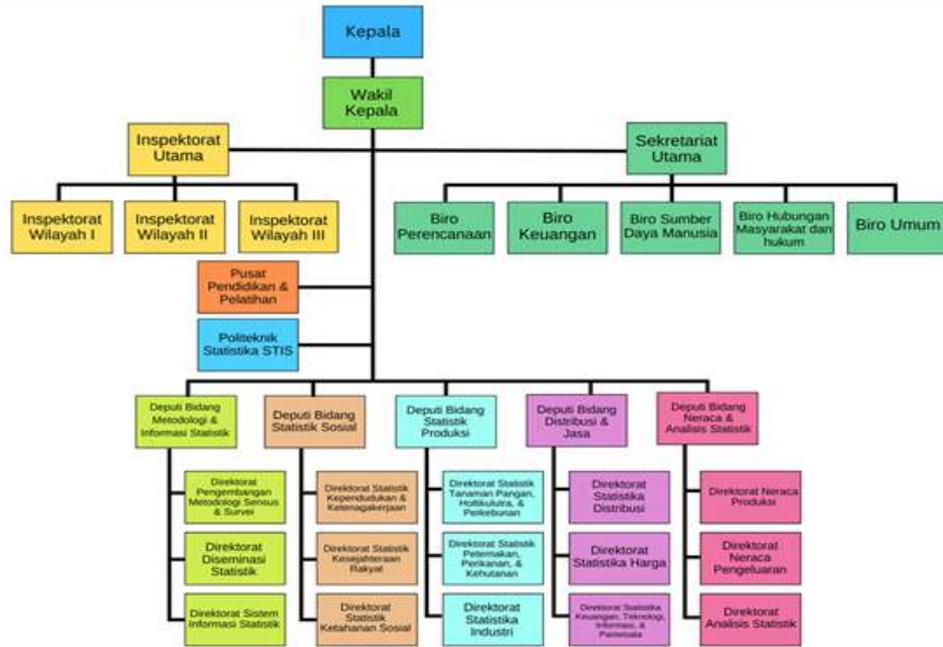
10. Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

Mempunyai tugas mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang statistika dan komputasi statistik dengan mendidik kader yang memiliki kemampuan akademik/profesional.

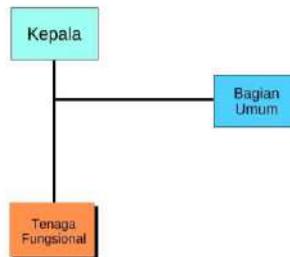
11. Instansi Vertikal

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi vertikal BPS, dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di Daerah.





Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Pusat



Gambar 2. Struktur Organisasi BPS Provinsi



Gambar 3. Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota



A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah BPS yaitu wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pusat Statistik adalah 528 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 528 satker. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	054	Badan Pusat Statistik	3	-	525	-	-	-	-	-	-	528
Jumlah			3	-	525	-	-	-	-	-	-	528

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Keuangan

TM = Tidak Menyampaikan Laporan Keuangan

Pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini, satuan kerja yang dicakup dalam laporan keuangan BPS meliputi 528 satuan kerja yang berada dalam satu eselon I yang terdiri dari 3 satker pusat, 34 satker provinsi, dan 491 satker kabupaten/kota dengan rincian yang tersebut dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4
Rincian Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Wilayah	Satker Pusat/Provinsi	Jumlah Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0199	Sekretariat Utama BPS	1
2	0199	Pusdiklat BPS	1
3	0199	Politeknik Statistika STIS	1
4	0100	DKI Jakarta	7
5	0200	Jawa Barat	28
6	0300	Jawa Tengah	36
7	0400	DI Yogyakarta	6
8	0500	Jawa Timur	39
9	0600	Aceh	24
10	0700	Sumatera Utara	33
11	0800	Sumatera Barat	20

No.	Kode Wilayah	Satker Pusat/Provinsi	Jumlah Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
12	0900	Riau	13
13	1000	Jambi	12
14	1100	Sumatera Selatan	16
15	1200	Lampung	15
16	1300	Kalimantan Barat	15
17	1400	Kalimantan Tengah	15
18	1500	Kalimantan Selatan	14
19	1600	Kalimantan Timur	11
20	1700	Sulawesi Utara	14
21	1800	Sulawesi Tengah	12
22	1900	Sulawesi Selatan	25
23	2000	Sulawesi Tenggara	15
24	2100	Maluku	12
25	2200	Bali	10
26	2300	Nusa Tenggara Barat	11
27	2400	Nusa Tenggara Timur	21
28	2500	Papua	24
29	2600	Bengkulu	11
30	2800	Maluku Utara	10
31	2900	Banten	9
32	3000	Bangka Belitung	8
33	3100	Gorontalo	7
34	3200	Kepulauan Riau	8
35	3300	Papua Barat	11
36	3400	Sulawesi Barat	7
37	3500	Kalimantan Utara	6
Total Satuan Kerja			528

Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2024 disusun melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan untuk berbagai jenjang pelaporan dari tingkat satuan kerja sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan dihasilkan oleh modul-modul yang terdapat pada SAKTI. Laporan keuangan yang menginformasikan tentang pengelolaan keuangan dihasilkan oleh modul penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, piutang, dan pelaporan (GLP). Laporan keuangan yang menginformasikan pengelolaan Barang Milik Negara dihasilkan oleh modul persediaan dan aset tetap.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pusat Statistik adalah 528 satker yang menyampaikan Laporan Barang Milik Negara tingkat satker dan dikonsolidasikan menjadi



Laporan Barang Milik Negara tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	054	Badan Pusat Statistik	3	-	528	-	-	-	-	-	528
Jumlah			3	-	528	-	-	-	-	-	528

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak Menyampaikan Laporan Barang

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Badan Pusat Statistik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan



keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan Asas Bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan – LO pada Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari penjualan publikasi BPS diakui setelah munculnya permintaan data publikasi dari konsumen.
 - b. Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan penjualan aset.
 - d. Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - e. Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan, dan akhir pendidikan.
 - f. Pendapatan penyelesaian ganti rugi.
- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (Setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Beban

(4) **Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi Aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal Neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas Piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*first in first out*).



- Nilai Persediaan disajikan di Neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal Neraca dikalikan dengan:
 - biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada tabel 7.

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin	2 s/d 20
Gedung dan Bangunan	10 s/d 50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s/d 40
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah Piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntuan Perbendaharaan/Tuntuan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah Aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Lain-lain berupa Aset Tetap yang rusak dan tidak dipergunakan kembali untuk operasional tetapi belum dilakukan penghapusan dan masih tercatat sebagai aset.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Estimasi pendapatan Badan Pusat Statistik periode TA 2024 adalah Rp27.249.718.000,00. Estimasi pendapatan tersebut naik sebesar Rp2.133.840.000,00 dari estimasi pendapatan yang semula tercatat sebesar Rp25.115.878.000,00.

Pagu belanja Badan Pusat Statistik periode TA 2024 adalah sebesar Rp4.776.013.194.000,00. Pagu tersebut naik sebesar Rp9.428.278.000,00 dari pagu awal belanja yang tercatat sebesar Rp4.766.584.916.000,00. Kenaikan pagu belanja terjadi pada kelompok jenis belanja modal. Pagu kelompok jenis belanja modal naik menjadi Rp204.915.168.000,00 dari pagu semula yang sebesar Rp89.447.806.000,00 dengan kenaikan sebesar Rp115.467.362.000,00. Adapun penurunan pagu selama periode TA 2024 terdapat pada kelompok jenis belanja pegawai dan barang. Pagu belanja pegawai pada periode TA 2024 sebesar Rp2.575.862.350.000,00 yang turun sebesar Rp75.559.242.000,00 dari pagu semula sebesar Rp2.651.421.592.000,00. Penurunan juga terjadi pada pagu belanja barang periode TA 2024 sebesar Rp1.995.235.676.000,00 dari pagu semula yang sebesar Rp2.025.715.518.000,00 atau turun sebesar Rp30.479.842.000,00.

Perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja selama TA 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 9
Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja

Uraian	Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja (Rp)		
	Semula	Menjadi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan			
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	3.054.997.000	5.188.837.000	2.133.840.000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	21.600.887.000	21.600.887.000	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	459.994.000	459.994.000	0
Pendapatan Denda	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah Pendapatan	25.115.878.000	27.249.718.000	2.133.840.000
Belanja			
Belanja Pegawai	2.651.421.592.000	2.575.862.350.000	(75.559.242.000)
Belanja Barang	2.025.715.518.000	1.995.235.676.000	(30.479.842.000)
Belanja Modal	89.447.806.000	204.915.168.000	115.467.362.000
Jumlah Belanja	4.766.584.916.000	4.776.013.194.000	9.428.278.000

Estimasi pendapatan TA 2024 secara keseluruhan sebesar Rp27.249.718.000,00. Nilai estimasi pendapatan tersebut teralokasi atas estimasi pendapatan kelompok akun Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN dengan nilai estimasi sebesar Rp5.188.837.000,00, kelompok akun Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi dengan nilai estimasi sebesar Rp21.600.887.000,00, kelompok akun Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan dengan nilai estimasi sebesar Rp459.994.000,00, kelompok akun Pendapatan Denda dengan nilai estimasi sebesar Rp0,00, dan kelompok

akun Pendapatan Lain-lain dengan nilai estimasi sebesar Rp0,00. Estimasi pendapatan kelompok akun Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi mendapatkan alokasi estimasi pendapatan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan kelompok akun pendapatan ini diperkirakan memiliki potensi penerimaan yang besar selama TA 2024. Potensi ini dikarenakan kelompok akun pendapatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang menyediakan layanan data statistik.

Pagu belanja selama periode TA 2024 yang dialokasikan berdasarkan kelompok program kegiatan adalah terbagi menjadi 2 (dua) kelompok program, yaitu kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan Dukungan Manajemen. Pagu belanja menurut kelompok program mengalami perubahan selama periode TA 2024. Secara ringkas perubahan pagu belanja menurut kelompok program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10
Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program

Uraian Program	Pagu Belanja (Rp)		
	Semula	Menjadi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.376.078.364.000	1.342.680.795.000	(33.397.569.000)
Program Dukungan Manajemen	3.390.506.552.000	3.433.332.399.000	42.825.847.000
Jumlah	4.766.584.916.000	4.776.013.194.000	9.428.278.000

Pagu belanja kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik selama periode TA 2024 adalah sebesar Rp1.342.680.795.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp33.397.569.000,00 dari nilai pagu semula yang sebesar Rp1.376.078.364.000,00. Untuk pagu belanja kelompok program Dukungan Manajemen selama periode TA 2024 adalah sebesar Rp3.433.332.399.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp42.825.847.000,00 dari nilai pagu semula yang sebesar Rp3.390.506.552.000,00.

Selain dikelompokkan berdasarkan program, pagu belanja selama periode TA 2024 juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Kelompok pagu belanja menurut sumber dana terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu kelompok sumber dana Rupiah Murni (RM), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Luar Negeri, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Perubahan pagu belanja berdasarkan kelompok sumber dana selama periode TA 2024 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 11
Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu Belanja (Rp)		
	Semula	Menjadi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupiah Murni (RM)	4.731.645.193.000	4.731.645.193.000	0
PNBP	15.644.353.000	23.246.129.000	7.601.776.000
Hibah Langsung Luar Negeri	0	1.826.502.000	1.826.502.000
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	19.295.370.000	19.295.370.000	0
Jumlah	4.766.584.916.000	4.776.013.194.000	9.428.278.000

Pagu belanja kelompok sumber dana selama periode TA 2024 terdapat perubahan kelompok sumber dana PNBP dan kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri. Pagu belanja kelompok sumber dana PNBP sebesar Rp23.246.129.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.601.776.000,00 dari pagu semula sebesar Rp15.644.353.000,00, Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kegiatan kerja sama dengan Instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa Kegiatan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp1.826.502.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.826.502.000,00 dari pagu semula sebesar Rp0,00. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya Hibah Langsung Luar Negeri yang berasal dari kerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) yang digunakan untuk kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (kode kegiatan 2905) dan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat (kode kegiatan 2906) berupa Belanja Barang Non Operasional Lainnya. Sedangkan Pagu belanja kelompok sumber dana Rupiah Murni dan pagu belanja kelompok sumber dana Surat Berharga Syariah Negara tidak mengalami perubahan dari nilai pagu awal masing masing sebesar Rp4.731.645.193.000,00 untuk pagu belanja kelompok sumber dana Rupiah Murni dan Rp19.295.370.000,00 untuk pagu belanja kelompok sumber dana SBSN.

Pagu belanja kelompok sumber dana RM selama periode TA 2024 terdapat pada satuan kerja (satker) BPS di seluruh Indonesia. Sedangkan pagu belanja kelompok sumber dana PNBP terdapat pada satuan kerja (satker) Sekretariat Utama (Settama), Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), dan Politeknik Statistika (Polstat) STIS. Pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri terdapat pada satuan kerja (satker) Sekretariat Utama (Settama). Pagu belanja kelompok sumber dana SBSN terdapat pada satuan kerja (satker) BPS Kota Cilegon, BPS Kabupaten Ciamis, BPS Kabupaten Majalengka, dan BPS Kabupaten Sumba Barat.

Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp66.221.481.321,00

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi pendapatan negara dan hibah selama periode TA 2024 sebesar Rp66.221.481.321,00 atau mencapai 243,02 persen dari estimasi pendapatan dan hibah yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp27.249.718.000,00. Realisasi pendapatan negara dan hibah selama periode TA 2024 secara keseluruhan merupakan kelompok pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Sedangkan untuk periode TA 2024 tidak terdapat penerimaan hibah.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan negara selama periode TA 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 12
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara

Uraian	TA 2024				
	Estimasi (Rp)	Pendapatan (Rp)	Pengembalian (Rp)	Pendapatan Netto (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan	5.188.837.000	34.403.680.707	4.965.572	34.398.715.135	662,94

Klaim Asuransi BMN					
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	21.600.887.000	20.278.570.941	234.500.000	20.044.070.941	92,79
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	459.994.000	1.406.882.341	0	1.406.882.341	305,85
Pendapatan Denda	0	2.125.847.824	0	2.125.847.824	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	8.246.035.080	70.000	8.245.965.080	0,00
Jumlah	27.249.718.000	66.461.016.893	239.535.572	66.221.481.321	243,02

Realisasi pendapatan negara berupa PNBPN periode TA 2024 sebesar Rp66.221.481.321,00 yang tersaji dalam Tabel 12 merupakan nilai bersih (neto) pendapatan yang diperoleh dari realisasi pendapatan negara bruto sebesar Rp66.461.016.893,00 dikurangi dengan pengembalian pendapatan negara sebesar Rp239.535.572,00. Pengembalian pendapatan negara terdiri dari pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp4.965.572,00, pengembalian Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp234.500.000,00, dan pengembalian atas Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp70.000,00.

Penjelasan realisasi pendapatan PNBPN secara rinci sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan dan pemanfaatan atas pengelolaan aset BMN. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN yang tercatat pada Laporan Keuangan periode TA 2024 ini terdiri dari pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, pendapatan sewa atas tanah, gedung, dan bangunan, serta pendapatan dari penerimaan klaim asuransi BMN.
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan pendapatan yang perolehannya berasal dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang tercatat pada Laporan Keuangan periode TA 2024 terdiri dari pendapatan ujian/seleksi masuk pendidikan, Pendapatan biaya pendidikan, pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan, pendapatan dari layanan survey dan pemetaan, serta pendapatan hasil survey dan pemetaan.
3. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan rekening perbankan dan keuangan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan yang tercatat pada Laporan Keuangan periode TA 2024 terdiri dari pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
4. Pendapatan Denda merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan denda lainnya. Pendapatan Denda yang tercatat pada Laporan Keuangan periode TA 2024 ini terdiri dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan pendapatan denda lainnya.
5. Pendapatan Lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi BPS. Pendapatan Lain-lain yang tercatat pada

Laporan Keuangan TA 2024 terdiri dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL), penerimaan kembali belanja barang TAYL, penerimaan kembali belanja modal TAYL, pendapatan setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS, penerimaan kembali persekot/uang muka gaji dan pendapatan anggaran lain-lain.

Realisasi pendapatan negara yang tidak terestimasi atau diperkirakan tidak diterima dalam DIPA sampai dengan periode TA 2024 adalah Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Pendapatan Denda Lainnya, penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL), penerimaan kembali belanja barang TAYL, penerimaan kembali belanja modal TAYL, pendapatan setoran dari sisa utang non TP/TGR pensiunan PNS, penerimaan kembali persekot/uang muka gaji dan pendapatan anggaran lain-lain.

Perbandingan realisasi pendapatan negara dan hibah periode TA 2024 dan 2023 seperti dilihat pada grafik 1.



Grafik 1: Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 dan 2023

Realisasi pendapatan negara periode TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp312.251.315.742,00 atau sebesar 82,50 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada periode yang sama di TA 2023. Perbandingan realisasi pendapatan negara berupa PNBP pada periode TA 2024 dan 2023 secara terinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Neto
TA 2024 dan 2023

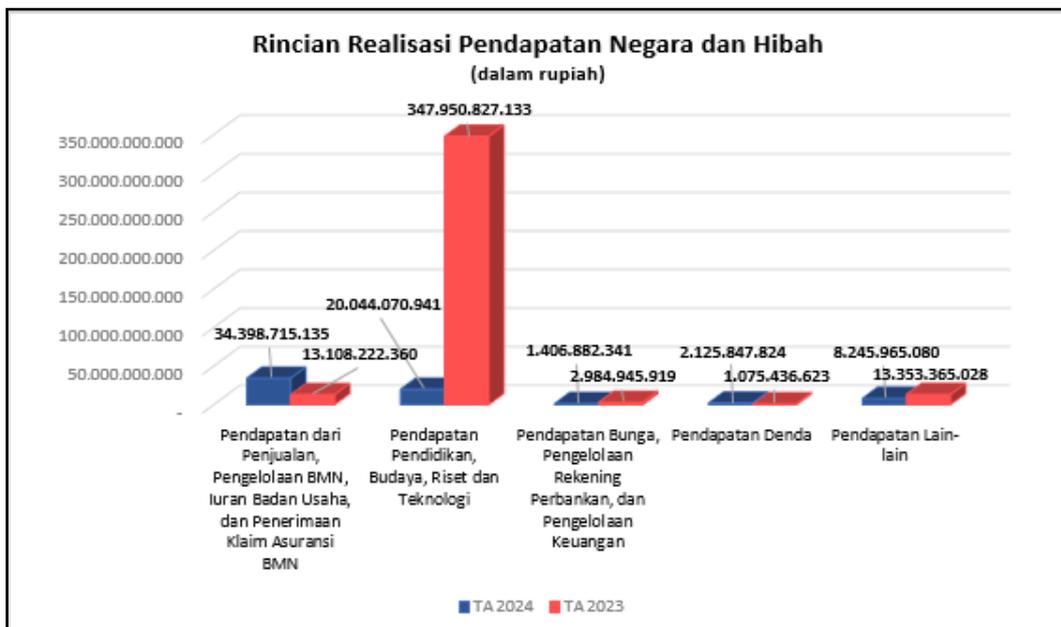
Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	34.398.715.135	13.108.222.360	21.290.492.775	162,42
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	20.044.070.941	347.950.827.133	(327.906.756.192)	(94,24)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.406.882.341	2.984.945.919	(1.578.063.578)	(52,87)
Pendapatan Denda	2.125.847.824	1.075.436.623	1.050.411.201	97,67
Pendapatan Lain-lain	8.245.965.080	13.353.365.028	(5.107.399.948)	(38,25)
Jumlah	66.221.481.321	378.472.797.063	(312.251.315.742)	(82,50)

Pada tabel 13 tersaji bahwa terjadi penurunan realisasi pendapatan pada periode TA 2024 dibandingkan TA 2023. Penurunan realisasi pendapatan tersebut terdapat pada Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp327.906.756.192,00 atau 94,24 persen; Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp1.578.063.578,00 atau 57,87 persen; dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp5.107.399.948,00 atau 38,25 persen. Penurunan realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi disebabkan oleh adanya penurunan jumlah pendaftar calon peserta SPMB STIS di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 serta pada tahun 2024 tidak terdapat kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM seperti pada tahun 2023. Penurunan realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan disebabkan oleh menurunnya realisasi pada Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Serta penurunan realisasi Pendapatan Lain-lain disebabkan oleh menurunnya realisasi pada Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL, Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL, Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS dan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

Terdapat realisasi pendapatan periode TA 2024 yang mengalami kenaikan dibandingkan realisasi pendapatan pada periode TA 2023. Kenaikan realisasi pendapatan yang dicapai pada periode TA 2024 dibandingkan TA 2023 terdapat pada Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp21.290.492.775,00 atau 162,42 persen dan pada Pendapatan Denda sebesar Rp1.050.411.201,00 atau 97,67 persen. Kenaikan realisasi pada Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN disebabkan oleh meningkatnya realisasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan serta Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN. Sedangkan kenaikan realisasi pada Pendapatan Denda disebabkan oleh meningkatnya realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.



**Grafik 2: Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
TA 2024 dan 2023**



Secara grafis perbandingan realisasi pendapatan negara dan hibah periode TA 2024 dan TA 2023 tersaji secara rinci sebagai berikut

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN Rp34.398.715.135,00

B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN

Berdasarkan DIPA TA 2024, BPS menetapkan estimasi penerimaan negara yang akan diperoleh selama periode TA 2024 berupa pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN sebesar Rp5.188.837.000,00. Sedangkan realisasi penerimaan negara berupa pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN selama periode TA 2024 tercatat sebesar Rp34.398.715.135,00 atau 662,94 persen.

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan dan pemanfaatan atas pengelolaan aset BMN. Pendapatan ini terinci diperoleh dari transaksi penjualan tanah, gedung dan bangunan berupa penjualan pembongkaran hasil renovasi gedung kantor, penjualan peralatan dan mesin, serta penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan berupa penjualan kendaraan bermotor dan benda inventaris kantor, pendapatan sewa berupa sewa rumah dinas, sewa gedung dan bangunan (sewa kantin) dan pendapatan dari penerimaan klaim asuransi BMN.

Adapun rincian realisasi pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	15.045.000	0	0,00
425121	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.596.000	6.400.000	401,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	68.546.000	1.339.629.322	1.954,35
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	426.669.000	27.007.626.034	6.329,88
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.379.312.000	3.734.954.493	156,98
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	3.000.000	0	0,00
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.294.669.000	2.310.105.286	100,67
Jumlah		5.188.837.000	34.398.715.135	662,94

Terdapat estimasi pendapatan yang tidak terealisasi selama periode TA 2024 pada kelompok pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN. Pendapatan tersebut adalah Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan dan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya yang besaran estimasinya pada periode TA 2024 masing-masing adalah Rp15.045.000,00 dan Rp3.000.000,00. Hal ini dikarenakan selama periode TA 2024 tidak terdapat transaksi penerimaan pendapatan dari penjualan dokumen pelelangan dan pemanfaatan BMN lainnya.

Realisasi pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Penjualan Tanah, dan Bangunan (Rp)	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Rp)	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (Rp)	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Rp)	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (Rp)
1	SETTAMA BPS	0	0	203.793.500	942.303.892	2.310.105.286
2	PUSDIKLAT BPS	0	0	62.714.000	40.074.842	0
3	POLSTAT STIS	0	0	0	174.030.901	0
4	DKI JAKARTA	0	54.004.000	254.236.400	12.939.608	0
5	JAWA BARAT	0	0	1.837.031.376	73.550.594	0
6	JAWA TENGAH	6.400.000	0	2.276.750.408	128.834.871	0
7	DI YOGYAKARTA	0	0	933.061.100	27.871.044	0
8	JAWA TIMUR	0	0	3.856.916.194	123.220.368	0
9	ACEH	0	0	1.045.619.600	69.224.561	0
10	SUMATERA UTARA	0	0	1.783.180.422	87.657.563	0
11	SUMATERA BARAT	0	0	689.554.807	61.581.612	0
12	RIAU	0	143.094.000	1.001.448.150	48.083.220	0
13	JAMBI	0	50.880.000	726.547.326	55.693.818	0
14	SUMATERA SELATAN	0	0	461.113.500	49.131.746	0
15	LAMPUNG	0	0	1.108.622.210	441.760.374	0
16	KALIMANTAN BARAT	0	0	1.020.338.250	53.889.690	0
17	KALIMANTAN TENGAH	0	0	915.658.600	57.581.750	0
18	KALIMANTAN SELATAN	0	0	704.798.050	42.351.930	0
19	KALIMANTAN TIMUR	0	0	611.757.940	47.891.267	0
20	SULAWESI UTARA	0	0	185.033.000	30.563.497	0
21	SULAWESI TENGAH	0	0	535.819.926	58.212.744	0
22	SULAWESI SELATAN	0	319.861.600	973.524.385	80.081.829	0
23	SULAWESI TENGGARA	0	0	356.945.000	36.886.436	0
24	MALUKU	0	0	456.939.500	99.088.959	0
25	BALI	0	0	236.855.000	46.551.880	0
26	NUSA TENGGARA BARAT	0	0	480.193.000	37.121.455	0
27	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	1.665.559.914	51.264.379	0
28	PAPUA	0	0	344.888.037	254.520.336	0

29	BENGKULU	0	635.717.722	298.757.178	40.066.392	0
30	MALUKU UTARA	0	69.752.000	0	96.795.738	0
31	BANTEN	0	0	259.377.162	35.562.993	0
32	KEP. BANGKA BELITUNG	0	66.320.000	187.375.800	33.304.532	0
33	GORONTALO	0	0	384.979.309	32.485.450	0
34	KEPULAUAN RIAU	0	0	568.305.000	55.212.500	0
35	PAPUA BARAT	0	0	224.498.000	149.518.945	0
36	SULAWESI BARAT	0	0	329.391.000	29.049.900	0
37	KALIMANTAN UTARA	0	0	26.042.990	30.992.877	0
Jumlah		6.400.000	1.339.629.322	27.007.626.034	3.734.954.493	2.310.105.286

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Rp20.044.070.941,00

B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan DIPA TA 2024, BPS menetapkan estimasi penerimaan negara yang akan diperoleh selama periode TA 2024 berupa pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi sebesar Rp21.600.887.000,00. Realisasi penerimaan negara tersebut selama periode TA 2024 sebesar Rp20.044.070.941,00 atau 92,79 persen.

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ujian/seleksi masuk pendidikan yaitu biaya pendaftaran ujian masuk penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS, layanan pendidikan dan/atau pelatihan pada satker Pusdiklat BPS, layanan survei dan pemetaan, serta kegiatan hasil survei dan pemetaan berupa penjualan buku-buku publikasi baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*, penjualan data mikro (dalam bentuk *Dbase file*), tabulasi (data mikro dengan proses), penjualan publikasi elektronik/*softcopy* (menurut jumlah halaman dan dalam bentuk *pdf*), dan penjualan peta digital wilayah (dalam bentuk *softfile*).

Adapun rincian realisasi pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	5.400.000.000	4.831.800.000	89,48
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	202.500.000	261.925.000	129,35
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.286.120.000	2.180.680.000	95,39
425432	Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan	5.706.567.000	5.706.567.000	100,00
425435	Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan	8.005.700.000	7.063.098.941	88,23
Jumlah		21.600.887.000	20.044.070.941	92,79

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (Rp)	Pendapatan Biaya Pendidikan (Rp)	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (Rp)	Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan (Rp)	Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan (Rp)
1	SETTAMA BPS	0	0	0	5.706.567.000	7.005.703.264
2	PUSDIKLAT BPS	0	0	2.180.680.000	0	0
3	POLSTAT STIS	4.831.800.000	261.925.000	0	0	0
4	DKI JAKARTA	0	0	0	0	644.792
5	JAWA BARAT	0	0	0	0	4.343.266
6	JAWA TENGAH	0	0	0	0	4.050.940
7	DI YOGYAKARTA	0	0	0	0	1.473.341
8	JAWA TIMUR	0	0	0	0	6.918.603
9	ACEH	0	0	0	0	143.800

10	SUMATERA UTARA	0	0	0	0	829.983
11	SUMATERA BARAT	0	0	0	0	2.963.049
12	RIAU	0	0	0	0	187.607
13	JAMBI	0	0	0	0	3.542.712
14	SUMATERA SELATAN	0	0	0	0	12.239.269
15	LAMPUNG	0	0	0	0	8.568.186
16	KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	0	20.000
17	KALIMANTAN SELATAN	0	0	0	0	811.648
18	KALIMANTAN TIMUR	0	0	0	0	724.176
19	SULAWESI UTARA	0	0	0	0	133.039
20	SULAWESI TENGAH	0	0	0	0	2.738.228
21	SULAWESI SELATAN	0	0	0	0	286.107
22	NUSA TENGGARA BARAT	0	0	0	0	2.158.990
23	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	0	0	1.543.985
24	PAPUA	0	0	0	0	708.320
25	BENGKULU	0	0	0	0	888.512
26	KEP. BANGKA BELITUNG	0	0	0	0	326.654
27	GORONTALO	0	0	0	0	946.330
28	KEPULAUAN RIAU	0	0	0	0	60.000
29	KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0	144.140
Jumlah		4.831.800.000	261.925.000	2.180.680.000	5.706.567.000	7.063.098.941

Pendapatan Bunga,
Pengelolaan
Rekening
Perbankan, dan
Pengelolaan
Keuangan
Rp1.406.882.341,00

B.1.3 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan DIPA TA 2024, BPS menetapkan estimasi penerimaan negara yang akan diperoleh selama periode TA 2024 berupa pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan sebesar Rp459.994.000,00. Realisasi atas penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan selama periode TA 2024 adalah sebesar Rp1.406.882.341,00 atau 305,85 persen.

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan merupakan pendapatan yang terdiri dari pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Adapun rincian realisasi penerimaan negara berupa pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	459.994.000	1.406.882.341	305,85
Jumlah		459.994.000	1.406.882.341	305,85

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Rp)
1	SETTAMA BPS	1.406.882.341
Jumlah		1.406.882.341



Pendapatan Denda
Rp2.125.847.824,00

B.1.4 Pendapatan Denda

Berdasarkan DIPA 2024, BPS menetapkan estimasi penerimaan negara yang akan diperoleh selama periode TA 2024 berupa pendapatan denda sebesar Rp0,00. Realisasi atas penerimaan negara yang berasal dari pendapatan denda selama periode TA 2024 adalah sebesar Rp2.125.847.824,00 atau 0,00 persen. Pendapatan Denda merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan pendapatan denda lainnya.

Adapun perolehan realisasi pendapatan denda adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425811	Pendapatan Denda Pekerjaan Pemerintah	0	2.123.345.824	0,00
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	2.502.000	0,00
Jumlah		0	2.125.847.824	0,00

Realisasi Pendapatan Denda per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Rp)	Pendapatan Denda Lainnya (Rp)
1	SETTAMA BPS	427.611.361	0
2	POLSTAT STIS	173.466	0
3	JAWA BARAT	152.835.020	0
4	JAWA TENGAH	37.893.888	2.502.000
5	JAWA TIMUR	114.548.924	0
6	ACEH	12.062.468	0
7	SUMATERA UTARA	544.206.257	0
8	SUMATERA BARAT	140.797.600	0
9	SUMATERA SELATAN	679.272	0
10	LAMPUNG	133.914.550	0
11	KALIMANTAN BARAT	710.241	0
12	KALIMANTAN TENGAH	247.744.188	0
13	KALIMANTAN SELATAN	3.197.000	0
14	KALIMANTAN TIMUR	6.541.527	0
15	SULAWESI UTARA	5.597.734	0
16	SULAWESI TENGAH	118.627.800	0
17	SULAWESI SELATAN	2.635.200	0
18	NUSA TENGGARA BARAT	15.963.900	0
19	PAPUA	49.102.791	0
20	BENGKULU	33.600	0
21	MALUKU UTARA	382.284	0
22	BANTEN	31.767.121	0
23	KALIMANTAN UTARA	76.319.632	0
Jumlah		2.123.345.824	2.502.000

Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dirinci sebagai berikut.

No.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Satuan Kerja	Nilai (Rp)
1	Denda Pemeliharaan Perangkat TI DC DRC an. PT. Nusantara Compnet Integrator	Settama BPS	44.400.000
2	Denda Pengadaan Koneksi SDWAN	Settama BPS	948.878
3	Denda Pengadaan Pencetakan dan Pengiriman dinding, Kalender Meja, dan Buku Kerja 2024	Settama BPS	21.837.595
4	Denda Pembayaran Pengadaan Seragam Pegawai	Settama BPS	689.520
5	Denda Pengadaan AC Split 1,5 PK	Settama BPS	44.731

6	Denda Pembayaran Pemeliharaan Perangkat Network Campus BPS	Settama BPS	42.736
7	Denda atas Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan AC untuk Daerah	Settama BPS	186.260
8	Denda Pengadaan Layanan Koneksi SDWAN	Settama BPS	1.158.874
9	Denda keterlambatan pekerjaan Pencetakan dan Pengiriman Kalender Dinding, Kalender Meja dan Buku Kerja Tahun 2024	Settama BPS	12.642.818
10	Denda Pengadaan Layanan Koneksi Internet VSAT BPS Kabupaten/Kota	Settama BPS	68.078.745
11	Denda Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Sewa Layanan Managed Service Wi-Fi Akses Point	Settama BPS	7.136.042
12	Denda penyelesaian pekerjaan pengadaan Layanan Koneksi Internet VSAT BPS Kabupaten/Kota	Settama BPS	4.357.864
13	Denda keterlambatan pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Pusat Data BPS	Settama BPS	4.375.000
14	Denda atas Penyelesaian Pekerjaan Termin II Pemeliharaan Fasilitas Pusat Data BPS	Settama BPS	16.977.304
15	Denda atas Penyelesaian Pekerjaan berupa Penyediaan Jamuan Makan Pimpinan dan Pegawai dalam Rangka Gebyar HSN	Settama BPS	38.750.000
16	Denda Penyelesaian Pekerjaan Termin 2 Pemeliharaan Perangkat Network Campus BPS	Settama BPS	203.062
17	Denda atas Penyelesaian Pekerjaan Sewa Layanan Managed Service Wi-Fi Akses Point Termin 3	Settama BPS	3.153
18	Denda atas Penyelesaian Pekerjaan Termin 2 Pemeliharaan Perangkat TIK Pusat Data BPS	Settama BPS	209.888
19	Denda atas Belanja Termin III Pemeliharaan Fasilitas Pusat Data BPS	Settama BPS	142.632.165
20	Denda Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Koneksi Mediasi Data Outbound/Traveler Tahun 2023	Settama BPS	236.340
21	Denda Pengadaan Koneksi MRTG dan Keterlambatan EoS Paket Pekerjaan SDWAN Tahun 2023	Settama BPS	789.036
22	Denda Pengadaan Sparepart Pemeliharaan Fasilitas Laporan Keuangan Sekretariat Utama BPS Tahun Anggaran 2024	Settama BPS	561.195
23	Denda Pemeliharaan Perangkat TIK Pusat Data BPS	Settama BPS	345.269
24	Denda Sewa Layanan Managed Service Wi-Fi Akses Point Termin 4	Settama BPS	110.569
25	Denda Pengadaan Layanan Koneksi Metro Ethernet DCDRC	Settama BPS	3.383.816
26	Denda Pengadaan Layanan Koneksi Internet untuk Pengguna BPS Pusat Termin 4	Settama BPS	73.186
27	Denda Pemeliharaan Perangkat Network Campus BPS	Settama BPS	60.733
28	Denda atas Belanja Modal Pengadaan Platform Pengembangan Aplikasi Berbasis Devsecops	Settama BPS	52.400.000
29	Denda Pengadaan Layanan Jasa Koneksi Internet DRC	Settama BPS	4.802.422
30	Denda atas Belanja Termin 4 Pengadaan Layanan Koneksi SDWAN	Settama BPS	174.160
31	Denda pemeliharaan AC	Polstat STIS	173.466
32	Denda pengadaan meubelair gedung kantor	BPS Kab. Majalengka	1.982.220
33	Denda pembangunan gedung kantor	BPS Kota Banjar	150.590.440
34	Denda pengadaan Printer	BPS Prov. Jawa Barat	262.360
35	Denda pengadaan laptop	BPS Kab. Klaten	504.000
36	Denda pengadaan meubelair gedung kantor	BPS Kab. Pekalongan	212.129
37	Denda pekerjaan perluasan bangunan gedung kantor	BPS Kab. Wonosobo	24.565.494
38	Denda pengadaan laptop	BPS Kota Surakarta	420.000
39	Denda pengadaan scanner	BPS Prov. Jawa Tengah	1.512.000



Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2024

40	Denda pengadaan pencetakan Instrumen Susenas MSBP dan Seruti Triwulan III TA 2024	BPS Prov. Jawa Tengah	146.665
38	Denda pengadaan alat ubinan	BPS Prov. Jawa Tengah	10.533.600
39	Denda pembangunan gedung dan bangunan kantor	BPS Kab. Blitar	107.950.104
40	Denda pengadaan seragam PDH	BPS Kota Madiun	181.720
41	Denda konstruksi fisik penatausahaan fleksible work space	BPS Prov. Jawa Timur	6.417.100
42	Denda pengadaan jasa konsultasi konstruksi pengawasan revitalisasi gedung kantor	BPS Kab. Aceh Timur	12.062.468
43	Denda pembangunan gedung kantor	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	232.163.507
44	Denda pengadaan laptop	BPS Kab. Nias Selatan	230.000
45	Denda Pengadaan Konstruksi Fisik Pembangunan Baru Bangunan Gedung Kantor Permanen	BPS Kota Pemantang Siantar	311.812.750
46	Denda pembangunan gedung kantor	BPS Kab. Agam	134.397.600
47	Denda kontruksi penataan halaman	BPS Kab. Padang Pariaman	6.400.000
48	Denda Pembangunan Gedung Kantor	BPS Kab. Oku Timur	679.272
49	Denda revitalisasi bangunan gedung kantor permanen	BPS Kab. Lampung Tengah	133.914.550
50	Denda pembelian wireless mic clip on	BPS Prov. Kalimantan Barat	696.521
51	Denda pengadaan A.C Split	BPS Prov. Kalimantan Barat	13.720
52	Denda pengadaan perangkat keras PC, Scanner dan UPS	BPS Kab. Kotawaringin Barat	149.400
53	Denda pengadaan seragam PDH	BPS Kab. Murung Raya	38.000
54	Denda pembangunan gedung kantor	BPS Kab. Seruyan	47.556.788
55	Denda pengadaan alat ubinan	BPS Prov. Kalimantan Selatan	3.197.000
56	Denda pembangunan gedung kantor	BPS Kab. Kutai Timur	5.871.767
57	Denda pengadaan laptop	BPS Kota Balikpapan	669.760
58	Denda pembangunan gedung kantor	BPS Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.529.834
59	Denda pengadaan alat ubinan	BPS Prov. Sulawesi Utara	2.067.900
60	Denda pembangunan gedung kantor	BPS Kab. Poso	118.627.800
61	Denda pengadaan PC, UP dan Scanner	BPS Kab. Luwu	2.635.200
62	Denda pengadaan laptop	BPS Kab. Dompu	294.000
63	Denda rehab dan perluasan gedung kantor	BPS Kab. Lombok Barat	15.669.900
64	Denda revitalisasi gedung	BPS Kab. Jayawijaya	49.102.791
65	Denda pengadaan seragam PDH	BPS Kab. Bengkulu Selatan	33.600
66	Denda pengadaan laptop	BPS Kab. Halmahera Tengah	382.284
67	Denda pemeliharaan gedung kantor	BPS Kab. Serang	97.437
68	Denda pembangunan gedung kantor	BPS Kota Cilegon	31.669.684
69	Denda pembangunan gedung kantor	BPS Kab. Tana Tidung	76.319.632
Jumlah			2.123.345.824

Realisasi Pendapatan Denda Lainnya dirinci sebagai berikut:

No.	Denda Lainnya	Satuan Kerja	Nilai (Rp)
1	Denda Pelatihan Petugas Updating Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi 2024 (UDPESBR24) an. Prasetyo Nugroho	BPS Kab. Pekalongan	182.000
2	Denda petugas REGSOSEK 2022 an. Nenden Rosmiyati dan Tiara Maulida Mawwadah	BPS Kab. Semarang	2.320.000
Jumlah			2.502.000

Pendapatan Lain-lain
Rp8.245.965.080.,00

B.1.5 Pendapatan Lain-lain

Berdasarkan DIPA TA 2024, BPS menetapkan estimasi penerimaan negara yang akan diperoleh selama periode TA 2024 berupa pendapatan lain-lain sebesar Rp0,00.

Realisasi atas penerimaan negara yang berasal dari pendapatan lain-lain selama periode TA 2024 adalah sebesar Rp8.245.965.080,00 atau 0,00 persen.

Pendapatan Lain-lain adalah pendapatan yang terdiri dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL), penerimaan kembali belanja barang TAYL, penerimaan kembali belanja modal TAYL, pendapatan setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS, Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji dan pendapatan anggaran lain-lain. Penerimaan pendapatan berupa setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS merupakan penerimaan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa dana pensiun PNS yang dipungut dan disetor ke Kas Negara oleh PT TASPEN (Persero) dengan menggunakan kode satker Sekretariat Utama BPS. Adapun rincian realisasi pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	354.565.128	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	4.294.721.223	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	3.429.668.409	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	33.438.296	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	787.498	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	132.784.526	0,00
Jumlah		0	8.245.965.080	0,00

Realisasi Pendapatan Lain-Lain per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (Rp)	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (Rp)	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (Rp)	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang NonTP/TGR Pensiunan PNS (Rp)	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji (Rp)	Pendapatan Anggaran Lain-lain (Rp)
1	SETTAMA BPS	127.078.266	3.977.440.156	230.662.084	28.766.696	0	2.211.288
2	PUSDIKLAT BPS	2.451.823	0	0	0	0	0
3	POLSTAT STIS	245.000	0	0	0	0	2.471.178
4	DKI JAKARTA	9.026.431	973.500	0	0	0	0
5	JAWA BARAT	13.595.625	12.743.269	20.481.156	4.671.600	0	0
6	JAWA TENGAH	11.615.002	125.190.461	0	0	0	0
7	DI YOGYAKARTA	370.000	1.777.969	943.955	0	0	0
8	JAWA TIMUR	6.178.267	4.972.858	2.735.790	0	0	0
9	ACEH	17.221.819	2.220.001	0	0	0	0
10	SUMATERA UTARA	5.596.846	6.637.001	990.063.706	0	0	0
11	SUMATERA BARAT	2.705.000	11.534.124	13.172.455	0	0	0
12	RIAU	2.448.200	4.676.000	0	0	0	160
13	JAMBI	77.978	2.456.000	0	0	0	0
14	SUMATERA SELATAN	394.441	2.081.700	5.000.000	0	0	0
15	LAMPUNG	6.327.377	0	1.393.820.156	0	0	0
16	KALIMANTAN BARAT	15.182.606	4.330.000	0	0	0	0
17	KALIMANTAN TENGAH	4.957.675	1.809.000	0	0	0	0
18	KALIMANTAN SELATAN	7.810.998	639.000	0	0	0	0
19	KALIMANTAN TIMUR	7.383.751	2.241.000	0	0	0	0
20	SULAWESI UTARA	1.201	596.700	0	0	0	0
21	SULAWESI TENGAH	5.452.438	2.788.000	0	0	0	0
22	SULAWESI SELATAN	21.652.056	8.245.808	9.099.000	0	0	0
23	SULAWESI TENGGARA	1.115.050	8.355.200	0	0	0	0
24	MALUKU	6.321.176	3.021.000	0	0	0	0
25	BALI	13.658.011	270.000	0	0	0	0
26	NUSA TENGGARA BARAT	6.145	697.500	0	0	0	0
27	NUSA TENGGARA TIMUR	18.206.713	5.103.000	0	0	0	0

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2024

28	PAPUA	1.620.076	69.991.867	0	0	0	432.000
29	BENGKULU	5.011.883	5.168.000	0	0	0	0
30	MALUKU UTARA	28.072.760	10.092.000	0	0	787.498	0
31	BANTEN	5.240.208	3.839.000	0	0	0	0
32	KEP. BANGKA BELITUNG	2.512.040	0	743.690.107	0	0	127.669.900
33	GORONTALO	475.000	4.523.578	0	0	0	0
34	PAPUA BARAT	0	6.678.150	0	0	0	0
35	SULAWESI BARAT	4.553.150	3.629.381	0	0	0	0
36	KALIMANTAN UTARA	116	0	20.000.000	0	0	0
Jumlah		354.565.128	4.294.721.223	3.429.668.409	33.438.296	787.498	132.784.526

Realisasi Pendapatan Anggaran Lain-lain dirinci sebagai berikut:

No.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Satuan Kerja	Nilai (Rp)
1	Kelebihan Pembayaran Penjualan data Mikro bulan Januari 2024	Settama BPS	107.390
2	Kelebihan Pembayaran Penjualan data Mikro bulan Februari 2024	Settama BPS	144.700
3	Kelebihan Pembayaran Penjualan data Mikro bulan April 2024	Settama BPS	989.799
4	Kelebihan Pembayaran Penjualan data Mikro bulan Agustus 2024	Settama BPS	2.878
5	Kelebihan Pembayaran Penjualan data Mikro bulan Oktober 2024	Settama BPS	955.751
6	Kelebihan Pembayaran Penjualan data Mikro bulan November 2024	Settama BPS	10.766
7	Kelebihan Pembayaran Penjualan data Mikro bulan Desember 2024	Settama BPS	4
8	Kelebihan transfer biaya pendidikan	Polstat STIS	2.471.178
9	Pendapatan Anggaran Lain-Lain berupa kelebihan setor sisa uang persediaan	BPS Kab. Bengkulu	160
10	Pendapatan lain yang merupakan hasil reklas setoran karena kesalahan akun penyeteraan sisa TUP 2024 pada bulan April 2024	BPS Kab. Mappi	432.000
11	Uang Jaminan pelaksanaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Kantor	BPS Kab. Bangka Selatan	127.500.000
12	Penerimaan Anggaran Lain-Lain (Pembayaran Denda Keterlambatan pada Belanja Modal) Tahun Anggaran 2023	BPS Kab. Bangka Tengah	169.900
Jumlah			132.784.526



Realisasi Belanja
Rp4.411.827.097.514,00

B.2 BELANJA

Realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik selama periode TA 2024 adalah sebesar Rp4.411.827.097.514,00 atau 92,37 persen dari pagu yang sebesar Rp4.776.013.194.000,00. Pagu dan realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik pada periode TA 2024 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis kelompok, yaitu kelompok program, sumber dana, dan jenis belanja. Masing-masing kelompok belanja akan dijelaskan sebagai berikut.

Rincian pagu dan realisasi belanja selama periode TA 2024 menurut kelompok program tersaji sebagai berikut:

Tabel 14
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program

Kode	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
054.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.433.332.399.000	3.368.928.302.120	98,12
054.01.GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.342.680.795.000	1.042.898.795.394	77,67
Jumlah		4.776.013.194.000	4.411.827.097.514	92,37

Pagu belanja menurut kelompok program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.433.332.399.000,00 atau 71,89 persen dari total pagu belanja yang sebesar Rp4.776.013.194.000,00. Pagu ini digunakan untuk menampung kebutuhan biaya gaji dan tunjangan pegawai termasuk tunjangan kinerja pegawai dan sudah di alokasi ke seluruh satker, operasional perkantoran sebanyak 528 satker, penyelenggaraan kegiatan pendidikan kedinasan di Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS), penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat BPS, dan kegiatan non operasional lainnya.

Pagu menurut kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp1.342.680.795.000,00 atau 28,11 persen dari total pagu. Pagu ini digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BPS yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data.

Realisasi belanja menurut kelompok program selama periode TA 2024 adalah sebagai berikut: program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.368.928.302.120,00 atau 98,12 persen dari pagu belanja dan realisasi Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp1.042.898.795.394,00 atau 77,67 persen dari pagu belanja.

Realisasi belanja menurut kelompok program selama periode TA 2024 secara keseluruhan adalah Rp4.411.827.097.514,00. Dari seluruh nilai realisasi belanja menurut kelompok program, proporsi realisasi belanja kelompok program Dukungan Manajemen adalah 76,36 persen dan proporsi realisasi belanja kelompok program PPIS adalah 23,64 persen.

Pagu dan realisasi belanja selama periode TA 2024 selain dikelompokkan berdasarkan program kegiatan, juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Pagu dan realisasi belanja berdasarkan kelompok sumber dana terdiri dari pagu dan realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni (RM), sumber dana PNBPN, sumber dana Hibah

Langsung Luar Negeri (HLL), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pagu dan realisasi belanja masing-masing sumber dana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana

Kode	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Rupiah Murni (RM)	4.731.645.193.000	4.379.856.308.457	92,57
04	PNBP	23.246.129.000	16.041.117.656	69,01
11	Hibah Langsung Luar Negeri	1.826.502.000	1.752.903.416	95,97
20	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	19.295.370.000	14.176.767.985	73,47
Jumlah		4.776.013.194.000	4.411.827.097.514	92,37

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa belanja dengan sumber dana Rupiah Murni memiliki pagu sebesar Rp4.731.645.193.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.379.856.308.457,00 atau 92,57 persen dari pagu. Belanja dengan sumber dana PNBP memiliki pagu sebesar Rp23.246.129.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.041.117.656,00 atau 69,01 persen dari pagu. Belanja dengan sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri memiliki pagu sebesar Rp1.826.502.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.752.903.416,00 atau 95,97 persen dari pagu. Untuk belanja dengan sumber dana SBSN memiliki pagu sebesar Rp19.295.370.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp14.176.767.985,00 atau 73,47 persen dari pagu. Sehingga berdasarkan tabel di atas, pagu dan realisasi belanja menurut sumber dana RM memiliki proporsi lebih besar dibandingkan dengan pagu dan realisasi belanja menurut sumber dana PNBP, Hibah Langsung Luar Negeri, dan SBSN. Rincian kegiatan yang dibiayai dengan sumber dana berdasarkan besaran pagu dan realisasi belanja sebagai berikut.

Tabel 16
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Kegiatan Menurut Sumber Dana

Kode	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Rupiah Murni			
2881	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	10.769.223.000	9.333.264.940	86,67
2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	10.886.407.000	5.042.915.001	46,32
2883	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	7.542.293.000	5.610.081.902	74,38
2884	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	270.553.201.000	267.471.649.216	98,86
2885	Dukungan Manajemen Bps Lainnya	121.826.445.000	109.463.226.197	89,85
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bps Provinsi	2.869.270.327.000	2.841.295.341.248	99,03
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (Bps)	70.508.436.000	66.254.906.665	93,97
2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Stis)	41.187.179.000	39.454.688.193	95,79
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	3.239.198.000	1.966.263.157	60,70
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	34.728.858.000	30.127.525.744	86,75
2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	31.088.360.000	26.559.848.867	85,43
2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	35.666.231.000	31.295.270.130	87,74
2900	Pengembangan Metodologi Sensus	5.534.046.000	5.013.336.922	90,59

	dan Survei			
2901	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	48.419.666.000	47.245.995.177	97,58
2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	43.412.876.000	28.434.281.574	65,50
2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	97.427.806.000	61.174.574.927	62,79
2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	51.499.242.000	32.393.532.299	62,90
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	109.478.590.000	104.600.883.985	95,54
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	243.657.223.000	235.489.084.197	96,65
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	92.543.229.000	88.440.876.818	95,57
2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	86.238.045.000	81.154.132.222	94,10
2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	4.589.130.000	3.580.410.215	78,02
2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	439.440.158.000	256.356.284.484	58,34
4203	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	754.943.000	722.751.079	95,74
4204	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	750.189.000	742.379.699	98,96
4205	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	633.892.000	632.803.599	99,83
Sub Jumlah		4.731.645.193.000	4.379.856.308.457	92,57
04	PNBP			
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bps Provinsi	2.294.669.000	2.238.477.969	97,55
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (Bps)	1.737.451.000	1.671.252.073	96,19
2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Stis)	5.322.374.000	4.817.796.354	90,52
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	13.891.635.000	7.313.591.260	52,65
Sub Jumlah		23.246.129.000	16.041.117.656	69,01
11	Hibah Langsung Luar Negeri			
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1.698.512.000	1.625.544.134	95,70
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	127.990.000	127.359.282	99,51
Sub Jumlah		1.826.502.000	1.752.903.416	95,97
20	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)			
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bps Provinsi	19.295.370.000	14.176.767.985	73,47
Sub Jumlah		19.295.370.000	14.176.767.985	73,47
Jumlah		4.776.013.194.000	4.411.827.097.514	92,37

Pagu belanja kelompok sumber dana selama periode TA 2024 adalah sebesar Rp4.776.013.194.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana Rupiah Murni dari keseluruhan nilai pagu adalah 99,07 persen atau sebesar Rp4.731.645.193.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana PNPB adalah 0,49 persen dari keseluruhan pagu atau sebesar Rp23.246.129.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri adalah 0,04 persen dari keseluruhan pagu atau

sebesar Rp1.826.502.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana SBSN adalah 0,40 persen dari keseluruhan pagu atau sebesar Rp19.295.370.000,00.

Realisasi belanja kelompok sumber dana selama periode TA 2024 adalah sebesar Rp 4.411.827.097.514,00. Pada realisasi belanja kelompok sumber dana, persentase realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni adalah 99,28 persen atau sebesar Rp4.379.856.308.457,00 dari keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni mendominasi realisasi belanja kelompok sumber dana. Persentase realisasi belanja sumber dana PNPB memiliki porsi 0,36 persen atau sebesar Rp16.041.117.656,00 keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Persentase realisasi belanja sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri memiliki porsi 0,04 persen atau sebesar Rp1.752.903.416,00 keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Sedangkan persentase realisasi belanja sumber dana SBSN memiliki porsi 0,32 persen atau sebesar Rp14.176.767.985,00 dari keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Perbandingan realisasi belanja kelompok sumber dana periode TA 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 17
Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana
TA 2024 dan 2023

Kode	Sumber Dana	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Rupiah Murni (RM)	4.379.856.308.457	7.195.776.092.221	(2.815.919.783.764)	(39,13)
04	PNBP	16.041.117.656	306.237.800.081	(290.196.682.425)	(94,76)
11	Hibah Langsung Luar Negeri	1.752.903.416	2.590.903.600	(838.000.184)	(32,34)
20	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	14.176.767.985	0	14.176.767.985	100,00
Jumlah		4.411.827.097.514	7.504.604.795.902	(3.092.777.698.388)	(41,21)

Secara keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana mengalami penurunan sebesar 41,21 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada TA 2023. Penurunan terjadi pada realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp2.815.919.783.764,00 atau sebesar 39,13 persen; realisasi belanja sumber dana PNPB sebesar Rp290.196.682.425,00 atau sebesar 94,76 persen dan realisasi belanja sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp838.000.184,00 atau sebesar 32,34 persen sedangkan realisasi belanja SBSN mengalami kenaikan sebesar Rp14.176.767.985,00 atau sebesar 100,00 persen.

Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik selama periode TA 2024 selain dikelompokkan menurut sumber dana, juga dikelompokkan menurut jenis belanja. Pengelompokan pagu dan realisasi belanja menurut jenis belanja ini terdiri dari Belanja Pegawai dengan kode jenis belanja 51, Belanja Barang dengan kode jenis belanja 52, dan Belanja Modal dengan kode jenis belanja 53.

Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik menurut kelompok jenis belanja periode TA 2024 disajikan berikut ini.



Tabel 18
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51	Belanja Pegawai	2.575.862.350.000	2.554.664.732.721	99,18
52	Belanja Barang	1.995.235.676.000	1.658.893.288.228	83,14
53	Belanja Modal	204.915.168.000	198.269.076.565	96,76
Jumlah		4.776.013.194.000	4.411.827.097.514	92,37

Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik selama periode TA 2024 menurut kelompok jenis belanja, masing-masing sebesar Rp4.776.013.194.000,00 dan Rp4.411.827.097.514,00. Komposisi pagu dan realisasi belanja yang terbagi menjadi tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dari keseluruhan nilai pagu dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Komposisi pagu Belanja Pegawai dari keseluruhan nilai pagu per jenis belanja adalah 53,93 persen atau senilai Rp2.575.862.350.000,00. Komposisi realisasi Belanja Pegawai neto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 57,90 persen atau senilai Rp2.554.664.732.721,00. Sedangkan persentase realisasi Belanja Pegawai jika dibandingkan dengan pagu Belanja Pegawai adalah 99,18 persen.
2. Komposisi pagu Belanja Barang dari keseluruhan nilai pagu per jenis belanja adalah 41,78 persen atau senilai Rp1.995.235.676.000,00. Komposisi realisasi Belanja Barang neto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 37,60 persen atau senilai Rp1.658.893.288.228,00. Sedangkan persentase realisasi Belanja Barang jika dibandingkan dengan pagu Belanja Barang adalah 83,14 persen.
3. Komposisi pagu Belanja Modal dari keseluruhan nilai pagu per jenis belanja adalah 4,29 persen atau senilai Rp204.915.168.000,00. Komposisi realisasi Belanja Modal neto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 4,49 persen atau senilai Rp198.269.076.565,00. Sedangkan persentase realisasi Belanja Modal jika dibandingkan dengan pagu Belanja Modal adalah 96,76 persen.

Persentase pagu belanja pegawai merupakan yang terbesar dari keseluruhan nilai pagu menurut jenis belanja dibandingkan dengan pagu belanja barang dan belanja modal selama periode TA 2024.

Komposisi pagu dan realisasi belanja menurut jenis belanja selama periode TA 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut:





Grafik 3. Komposisi Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2024

Realisasi belanja menurut jenis belanja selama periode TA 2024 dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2023 seperti tersaji sebagai berikut.

**Tabel 19
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2024 dan 2023**

Kode	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51	Belanja Pegawai	2.554.664.732.721	2.319.687.669.213	234.977.063.508	10,13
52	Belanja Barang	1.658.893.288.228	4.875.800.083.713	(3.216.906.795.485)	(65,98)
53	Belanja Modal	198.269.076.565	309.117.042.976	(110.847.966.411)	(35,86)
Jumlah		4.411.827.097.514	7.504.604.795.902	(3.092.777.698.388)	(41,21)

Secara keseluruhan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja selama periode TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.092.777.698.388,00 atau sebesar 41,21 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023.

Realisasi Belanja Pegawai selama TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp234.977.063.508,00 atau sebesar 10,13 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2023. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai pada periode TA 2024 terjadi pada Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS yang terdiri dari: Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Anak PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS, Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS, dan Belanja Tunjangan Profesi Dosen dibandingkan periode yang sama di TA 2023. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK dan Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transit juga mengalami kenaikan pada periode TA 2024 dibandingkan dengan periode TA 2023.

Realisasi Belanja Barang selama periode TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.216.906.795.485,00 sebesar 65,98 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2023. Penurunan tersebut terdapat pada realisasi belanja barang operasional,

belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dalam negeri. Hal tersebut disebabkan oleh skala dan jumlah kegiatan pada TA 2024 tidak sebesar pelaksanaan kegiatan di periode yang sama pada TA 2023. Hal ini disebabkan pada TA 2024 masih terdapat kebijakan anggaran berupa rasionalisasi anggaran dan *automatic adjustment* anggaran oleh Kementerian Keuangan sehingga ada beberapa pos anggaran yang belum dapat direalisasikan pada periode TA 2024. Selain itu juga pada TA 2024 realisasi belanja barang hanya digunakan untuk membiayai kegiatan survei dan perkantoran yang bersifat rutin tidak berskala besar sebagaimana yang terjadi pada periode TA 2023 yaitu terdapat pelaksanaan kegiatan dengan skala besar dan membutuhkan pembelanjaan yang besar seperti kegiatan lanjutan Pendataan Awal Regsosek, kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023), serta Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023.

Realisasi Belanja Modal, sebagaimana pada Belanja Barang, pada periode TA 2024 juga mengalami penurunan sebesar Rp110.847.966.411,00 atau sebesar 35,86 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2023. Penurunan ini disebabkan oleh masih terdapat kebijakan anggaran berupa rasionalisasi anggaran dan *automatic adjustment* anggaran oleh Kementerian Keuangan sehingga ada beberapa pos anggaran yang belum dapat direalisasikan pada periode TA 2024.

Belanja Pegawai
Rp2.554.664.732.721,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN), pensiunan, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS/ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Realisasi Belanja Pegawai pada periode TA 2024 adalah sebesar Rp2.554.664.732.721,00 atau 99,18 persen dari pagu yang sebesar Rp2.575.862.350.000,00. Nilai realisasi belanja ini adalah nilai belanja neto yaitu nilai bruto Belanja Pegawai yang nilainya sebesar Rp2.556.197.680.027,00 dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.532.947.306,00.

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pusat Statistik pada periode TA 2024 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK, Belanja Uang Lembur, dan Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito. Realisasi Belanja Pegawai pada periode TA 2024 seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM).

Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS
Rp1.340.228.157.344,00

B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111) untuk periode TA 2024 adalah Rp1.340.228.157.344,00 atau sebesar 99,05 persen dari pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS senilai Rp1.353.036.012.000,00. Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ini terdiri dari belanja gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji selain tunjangan kinerja.



Besaran pagu dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada periode TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 20
Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	% Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	881.014.756.000	876.776.381.301	117.328.927	876.659.052.374	99,51
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.725.000	13.822.757	589.485	13.233.272	79,12
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	54.739.847.000	54.372.715.489	25.125.955	54.347.589.534	99,28
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16.666.335.000	16.480.570.138	2.533.404	16.478.036.734	98,87
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15.978.336.000	15.815.510.000	67.880.930	15.747.629.070	98,56
511124	Belanja Tun. Fungsional PNS	132.021.643.000	131.374.829.000	260.272.003	131.114.556.997	99,31
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	65.036.998.000	63.413.505.850	32.092.146	63.381.413.704	97,45
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	43.598.572.000	43.154.956.590	4.634.880	43.150.321.710	98,97
511129	Belanja Uang Makan PNS	128.646.342.000	125.529.351.150	16.281.400	125.513.069.750	97,56
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	475.570.000	458.075.000	375.000	457.700.000	96,24
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	4.213.311.000	4.122.415.000	4.250.000	4.118.165.000	97,74
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	8.211.821.000	7.705.646.387	835.197.912	6.870.448.475	83,67
511153	Belanja Tunj. Profesi Dosen	2.415.756.000	2.376.940.724	0	2.376.940.724	98,39
Jumlah		1.353.036.012.000	1.341.594.719.386	1.366.562.042	1.340.228.157.344	99,05

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS secara neto pada periode TA 2024 adalah Rp1.340.228.157.344,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS secara neto berasal dari nilai bruto Belanja Gaji dan Tunjangan PNS yaitu Rp1.341.594.719.386,00 yang dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.366.562.042,00. Realisasi belanja pegawai periode TA 2024 digunakan untuk pembayaran gaji pokok PNS, pembayaran pembulatan gaji PNS, pembayaran tunjangan suami/istri PNS, pembayaran tunjangan anak PNS, pembayaran tunjangan struktural PNS, pembayaran tunjangan fungsional PNS, pembayaran tunjangan PPh PNS, pembayaran tunjangan beras PNS, pembayaran uang makan PNS, pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS, pembayaran tunjangan khusus Papua PNS, pembayaran tunjangan umum PNS, dan pembayaran tunjangan profesi dosen. Nilai pengembalian belanja ini terdiri dari pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Anak PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS, Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS, dan Belanja Tunjangan Umum PNS.



Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 21
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	876.659.052.374	805.855.822.916	70.803.229.458	8,79
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.233.272	13.159.369	73.903	0,56
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	54.347.589.534	50.285.320.655	4.062.268.879	8,08
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16.478.036.734	15.383.039.911	1.094.996.823	7,12
511123	Belanja Tunj. StrukturalPNS	15.747.629.070	15.610.066.665	137.562.405	0,88
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	131.114.556.997	112.433.176.559	18.681.380.438	16,62
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	63.381.413.704	2.982.831.400	60.398.582.304	2024,87
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	43.150.321.710	43.463.204.550	(312.882.840)	(0,72)
511129	Belanja Uang Makan PNS	125.513.069.750	112.284.002.036	13.229.067.714	11,78
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	457.700.000	439.325.000	18.375.000	4,18
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	4.118.165.000	4.104.520.000	13.645.000	0,33
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	6.870.448.475	12.467.127.322	(5.596.678.847)	(44,89)
511153	Belanja Tunj. Profesi Dosen	2.376.940.724	2.130.711.416	246.229.308	11,56
Jumlah		1.340.228.157.344	1.177.452.307.799	162.775.849.545	13,82

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan PNS secara neto pada periode TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp162.775.849.545,00 atau sebesar 13,82 persen dibandingkan realisasi belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada periode yang sama di TA 2023. Kenaikan dan penurunan realisasi belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada periode TA 2024 dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2023 antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Gaji Pokok PNS mengalami kenaikan sebesar Rp70.803.229.458,00 atau sebesar 8,79 persen. Realisasi Belanja Gaji Pokok PNS pada periode TA 2024 digunakan untuk pembayaran gaji induk pegawai, gaji susulan, gaji ke-13 dan ke-14 Triwulan III TA 2024, kekurangan gaji pokok, kenaikan pangkat PNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, Tunjangan Hari Raya (THR) TA 2024, dan gaji terusan.
2. Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional mengalami kenaikan sebesar Rp18.681.380.438,00 atau sebesar 16,62 persen. Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional pada periode TA 2024 digunakan untuk pembayaran tunjangan fungsional dan kekurangan tunjangan fungsional. Kenaikan ini diantaranya disebabkan oleh adanya pengangkatan pegawai ke jabatan fungsional dan kenaikan jenjang jabatan fungsional.
3. Realisasi Belanja Tunjangan Umum PNS mengalami penurunan sebesar Rp5.596.678.847,00 atau sebesar 44,89 persen. Realisasi Belanja Tunjangan Umum PNS pada periode TA 2024 digunakan untuk pembayaran tunjangan umum dan kekurangan tunjangan umum. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pegawai yang diangkat ke jabatan fungsional sehingga tunjangan umum yang diterima berubah menjadi tunjangan fungsional.

4. Realisasi Belanja Tunjangan PPh PNS mengalami kenaikan sebesar Rp60.398.582.304,00 atau 2.024,87 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif efektif rata-rata (TER) untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mulai berlaku per 1 Januari 2024.

Belanja Gaji dan
Tunjangan PPPK
Rp11.025.643.912,00

B.2.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (5116) untuk periode TA 2024 adalah Rp11.025.643.912,00 atau sebesar 98,65 persen dari pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan PPPK senilai Rp11.176.022.000,00. Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ini terdiri dari belanja gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji selain tunjangan kinerja.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada periode TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 22
Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	7.721.061.000	7.696.716.670	0	7.696.716.670	99,68
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.107.000	163.897	124	163.773	14,79
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	416.475.000	401.282.520	571.760	400.710.760	96,21
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	110.913.000	106.291.136	114.352	106.176.784	95,73
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1.022.760.000	1.009.565.825	0	1.009.565.825	98,71
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	436.340.000	424.019.100	0	424.019.100	97,18
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1.467.366.000	1.388.501.000	210.000	1.388.291.000	94,61
Jumlah		11.176.022.000	11.026.540.148	896.236	11.025.643.912	98,65

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK secara neto pada periode TA 2024 adalah Rp11.025.643.912,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK secara neto berasal dari nilai bruto Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yaitu Rp11.026.540.148,00 yang dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp896.236,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan PPPK periode TA 2024 digunakan untuk pembayaran gaji pokok PPPK, pembayaran pembulatan gaji PPPK, pembayaran tunjangan suami/istri PPPK, pembayaran tunjangan anak PPPK, pembayaran tunjangan fungsional PPPK, pembayaran tunjangan beras PPPK, dan pembayaran uang makan PPPK. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.



Tabel 23
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK
TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	7.696.716.670	415.042.600	7.281.674.070	1.754,44
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	163.773	9.060	154.713	1.707,65
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	400.710.760	17.817.560	382.893.200	2.148,97
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	106.176.784	3.476.782	102.700.002	2.953,88
511624	Belanja Tun. Fungsional PPPK	1.009.565.825	67.560.000	942.005.825	1.394,32
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	424.019.100	19.263.720	404.755.380	2.101,13
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1.388.291.000	86.390.450	1.301.900.550	1.507,00
Jumlah		11.025.643.912	609.560.172	10.416.083.740	1.708,79

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada periode TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.416.083.740,00 atau sebesar 1.708,79 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2023. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penerimaan PPPK pada Tahun 2024 sehingga menambah nilai Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK.

Belanja Uang Lembur
Rp28.815.127.750,00

B.2.1.3 Belanja Uang Lembur

Realisasi Belanja Uang Lembur (5122) untuk periode TA 2024 adalah Rp28.815.127.750,00 atau 94,07 persen dari pagu anggaran belanja uang lembur senilai Rp30.632.294.000,00. Belanja Uang Lembur merupakan komponen belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran uang lembur. Uang lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah. Uang lembur diberikan dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan di luar jam kerja.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Uang Lembur selama TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 24
Pagu dan Realisasi Belanja Uang Lembur

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
512211	Belanja Uang Lembur	30.179.608.000	28.594.141.000	12.963.250	28.581.177.750	94,70
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	452.686.000	233.950.000	0	233.950.000	51,68
Jumlah		30.632.294.000	28.828.091.000	12.963.250	28.815.127.750	94,07

Realisasi Belanja Uang Lembur neto sebesar Rp28.815.127.750,00 berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Uang Lembur sebesar Rp28.828.091.000,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp12.963.250,00. Perbandingan Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 25
Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512211	Belanja Uang Lembur	28.581.177.750	35.165.242.817	(6.584.065.067)	(18,72)
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	233.950.000	1.694.000	232.256.000	13.710,51
Jumlah		28.815.127.750	35.166.936.817	(6.351.809.067)	(18,06)

Realisasi Belanja Uang Lembur pada periode TA 2024 sebesar Rp28.815.127.750,00 sedangkan realisasi Belanja Uang Lembur untuk periode yang sama pada TA 2023 sebesar Rp35.166.936.817,00. Realisasi Belanja Uang Lembur pada periode TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.351.809.067,00 atau sebesar 18,06 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pagu anggaran belanja dan penurunan pelaksanaan kegiatan.

Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Rp1.174.595.803.715,00

B.2.1.4 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (5124) pada periode TA 2024 adalah sebesar Rp1.174.595.803.715,00 atau sebesar 99,46 persen dari pagu yang senilai Rp1.181.018.022.000,00. Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito terdiri dari Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) yang berupa belanja tunjangan kinerja dan Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Pengertian ini termuat dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 26
Pagu dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.172.624.046.000	1.166.487.839.227	148.366.579	1.166.339.472.648	99,46
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	8.393.976.000	8.260.490.266	4.159.199	8.256.331.067	98,36

Jumlah	1.181.018.022.000	1.174.748.329.493	152.525.778	1.174.595.803.715	99,46
--------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito secara neto pada periode TA 2024 adalah Rp1.174.595.803.715,00 atau sebesar 99,46 persen dari pagu anggaran. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito sebesar Rp1.174.748.329.493,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp152.525.778,00.

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 27
Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito
TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512411	Belanja Pegawai(Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.166.339.472.648	1.106.001.658.438	60.337.814.210	5,46
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	8.256.331.067	457.205.987	7.799.125.080	1.705,82
Jumlah		1.174.595.803.715	1.106.458.864.425	68.136.939.290	6,16

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito pada periode TA 2024 sebesar Rp1.174.595.803.715,00 sedangkan realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito pada periode TA 2023 sebesar Rp1.106.458.864.425,00. Realisasi Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito pada periode TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp68.136.939.290,00 atau sebesar 6,16 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2023. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pegawai yang promosi kenaikan pangkat, menduduki jabatan fungsional tertentu, dan juga disebabkan karena adanya penerimaan pegawai yang berstatus PPPK pada Tahun 2024.

Belanja Barang
Rp1.658.893.288.228,00

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Realisasi Belanja Barang selama TA 2024 adalah sebesar Rp1.658.893.288.228,00 atau 83,17 persen dari pagu yang nilainya sebesar Rp1.995.235.676.000,00. Nilai realisasi belanja ini adalah nilai belanja neto yaitu nilai bruto belanja barang yang nilainya sebesar Rp1.660.275.237.079,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp1.381.948.851,00.

Realisasi Belanja Barang Badan Pusat Statistik TA 2024 meliputi Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dalam Negeri, dan Belanja Perjalanan Luar Negeri. Realisasi Belanja Barang selama TA 2024 bersumber dari sumber dana Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN).



Belanja Barang
Operasional
Rp110.218.911.419,00

B.2.2.1 Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Realisasi Belanja Barang Operasional (5211) untuk TA 2024 adalah Rp110.218.911.419,00 atau 97,09 persen dari pagu yang senilai Rp113.522.298.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Barang Operasional selama TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 28
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Operasional

Kode Akun	Uraian	Pagu	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	62.424.482.000	60.953.878.073	63.936.526	60.889.941.547	97,54
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	325.465.000	281.384.405	0	281.384.405	86,46
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	29.811.842.000	28.241.749.260	55.135.350	28.186.613.910	94,55
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20.960.509.000	20.870.641.764	9.670.207	20.860.971.557	99,53
Jumlah		113.522.298.000	110.347.653.502	128.742.083	110.218.911.419	97,09

Realisasi Belanja Barang Operasional secara neto selama TA 2024 adalah Rp110.218.911.419,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Operasional sebesar Rp110.347.653.502,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp128.742.083,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja keperluan perkantoran, pengembalian belanja honor operasional satuan kerja, dan pengembalian belanja operasional lainnya.

Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 29
Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	60.889.941.547	148.090.950.523	(87.201.008.976)	(58,88)
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	8.510.600	(8.510.600)	(100,00)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	281.384.405	676.674.834	(395.290.429)	(58,42)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	28.186.613.910	57.862.080.850	(29.675.466.940)	(51,29)

521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20.860.971.557	3.260.163.558	17.600.807.999	1.893,74
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0	51.829.201	(51.829.201)	(100,00)
Jumlah		110.218.911.419	209.950.209.566	(99.731.298.147)	(47,50)

Realisasi Belanja Barang Operasional selama TA 2024 sebesar Rp110.218.911.419,00, sedangkan realisasi Belanja Barang Operasional selama TA 2023 sebesar Rp209.950.209.566,00. Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp99.731.298.147,00 atau sebesar 47,50 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2023. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan pada belanja keperluan perkantoran, penurunan pada belanja penambah daya tahan tubuh, penurunan pada belanja pengiriman surat dinas pos pusat, penurunan pada belanja honor operasional satuan kerja dan penurunan pada belanja barang operasional - penanganan pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2024 hanya berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM).

Belanja Barang Non Operasional
Rp490.340.533.446,00

B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Realisasi Belanja Barang Non Operasional (5212) untuk TA 2024 adalah Rp490.340.533.446,00 atau 80,47 persen dari pagu yang senilai Rp609.339.697.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Barang Non Operasional selama TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 30
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521211	Belanja Bahan	70.067.634.000	57.708.980.406	32.581.986	57.676.398.420	82,32
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	488.151.675.000	398.222.863.943	252.303.413	397.970.560.530	81,53
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	42.086.051.000	26.116.076.923	146.695.896	25.969.381.027	61,71
521252	Belanja Peralatandan Mesin - Ekstrakomptabel	8.268.061.000	7.965.467.555	88.280	7.965.379.275	96,34
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	766.276.000	758.814.194	0	758.814.194	99,03
Jumlah		609.339.697.000	490.772.203.021	431.669.575	490.340.533.446	80,47

Realisasi Belanja Barang Non Operasional secara neto selama TA 2024 adalah Rp490.340.533.446,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Non

Operasional sebesar Rp490.772.203.021,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp431.669.575,00. Pengembalian terdiri atas pengembalian belanja bahan, pengembalian belanja honor output kegiatan, pengembalian belanja barang non operasional lainnya, pengembalian belanja peralatan dan mesin – ekstrakomptabel, dan pengembalian belanja gedung dan bangunan – ekstrakomptabel.

Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 31
Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan	57.676.398.420	187.953.873.778	(130.277.475.358)	(69,31)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	397.970.560.530	2.251.822.363.309	(1.853.815.802.779)	(82,33)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	25.969.381.027	56.154.994.348	(30.185.613.321)	(53,75)
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0	44.915.203	(44.915.203)	(100,00)
521252	Belanja Peralatandan Mesin - Ekstrakomptabel	7.965.379.275	4.191.417.782	3.773.961.493	90,04
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	758.814.194	266.199.296	492.614.898	185,05
Jumlah		490.340.533.446	2.500.433.763.716	(2.010.093.230.270)	(80,39)

Realisasi Belanja Barang Non Operasional selama TA 2024 sebesar Rp490.340.533.446,00, sedangkan realisasi Belanja Barang Non Operasional selama TTA 2023 sebesar Rp2.500.433.763.716,00. Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.010.093.230.270,00 atau sebesar 80,39 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2023. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan pada belanja bahan, penurunan pada belanja honor output kegiatan, penurunan pada belanja barang non operasional lainnya, dan penurunan pada belanja barang non operasional - penanganan pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja Barang Non Operasional periode TA 2024 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 32
Realisasi Belanja Barang Non Operasional Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan	56.600.091.306	1.076.307.114	0	57.676.398.420
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	395.061.338.530	2.909.222.000	0	397.970.560.530
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22.594.745.611	1.621.732.000	1.752.903.416	25.969.381.027

521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7.965.379.275	0	0	7.965.379.275
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	758.814.194	0	0	758.814.194
Jumlah		482.980.368.916	5.607.261.114	1.752.903.416	490.340.533.446

Belanja Barang
Persediaan
Rp59.131.155.616,00

B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan

Belanja Barang Persediaan merupakan pengeluaran pemerintah untuk perolehan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Barang Persediaan (5218) untuk TA 2024 adalah Rp59.131.155.616,00 atau 78,55 persen dari pagu yang senilai Rp75.278.185.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Barang Persediaan selama TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 33
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Persediaan

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75.278.185.000	59.131.233.051	77.435	59.131.155.616	78,55
Jumlah		75.278.185.000	59.131.233.051	77.435	59.131.155.616	78,55

Realisasi Belanja Barang Persediaan secara neto selama TA 2024 adalah Rp59.131.155.616,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Persediaan sebesar Rp59.131.233.051,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp77.435,00. Pengembalian terdiri atas Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi.

Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 34
Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59.131.155.616	101.206.680.957	(42.075.525.341)	(41,57)
Jumlah		59.131.155.616	101.206.680.957	(42.075.525.341)	(41,57)

Realisasi Belanja Barang Persediaan selama TA 2024 sebesar Rp59.131.155.616,00, sedangkan realisasi Belanja Barang Persediaan selama TA 2023 sebesar Rp101.206.680.957,00. Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp42.075.525.341,00 atau sebesar 41,57 persen dibandingkan dengan

periode sebelumnya yaitu TA 2023. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan pada belanja barang persediaan barang konsumsi.

Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2024 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 35
Realisasi Belanja Barang Persediaan Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)		
		Rupiah Murni	PNBP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59.082.376.666	48.778.950	59.131.155.616
hlnJumlah		59.082.376.666	48.778.950	59.131.155.616

Belanja Jasa
Rp295.767.539.429,00

B.2.2.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa (5221) untuk TA 2024 adalah Rp295.767.539.429,00 atau 96,30 persen dari pagu yang senilai Rp307.115.729.000,00. Besaran pagu dan realisasi Belanja Jasa selama TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 36
Pagu dan Realisasi Belanja Jasa

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
522111	Belanja Langganan Listrik	49.166.182.000	48.597.576.403	30.824.591	48.566.751.812	98,78
522112	Belanja Langganan Telepon	1.265.291.000	1.157.066.085	7.381.796	1.149.684.289	90,86
522113	Belanja Langganan Air	1.939.928.000	1.790.952.261	1.856.100	1.789.096.161	92,22
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20.703.863.000	20.492.401.070	7.586.030	20.484.815.040	98,94
522131	Belanja Jasa Konsultan	1.146.849.000	834.723.290	0	834.723.290	72,78
522141	Belanja Sewa	9,167,590,000	8.719.693.645	0	8.719.693.645	95,11
522151	Belanja Jasa Profesi	12,853,006,000	6.523.546.399	1.440.000	6.522.106.399	50,74
522191	Belanja Jasa Lainnya	210,873,020,000	207.832.904.361	132.235.568	207.700.668.793	98,50
Jumlah		307.115.729.000	295.948.863.514	181.324.085	295.767.539.429	96.30

Realisasi Belanja Jasa secara neto selama TA 2024 adalah Rp295.767.539.429,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Persediaan sebesar Rp295.948.863.514,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp181.324.085,00.

Realisasi Belanja Jasa TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.



Tabel 37
Realisasi Belanja Jasa TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	Belanja Langganan Listrik	48.566.751.812	49.813.421.935	(1.246.670.123)	(2,50)
522112	Belanja Langganan Telepon	1.149.684.289	1.249.610.228	(99.925.939)	(8,00)
522113	Belanja Langganan Air	1.789.096.161	1.753.206.844	35.889.317	2,05
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20.484.815.040	640.881.955	19.843.933.085	3.096,35
522131	Belanja Jasa Konsultan	834.723.290	1.373.615.923	(538.892.633)	(39,23)
522141	Belanja Sewa	8.719.693.645	39.186.711.415	(30.467.017.770)	(82,93)
522151	Belanja Jasa Profesi	6.522.106.399	38.833.866.650	(32.311.760.251)	(77,75)
522191	Belanja Jasa Lainnya	207.700.668.793	95.443.927.628	112.256.741.165	(83,21)
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	0	55.615.000	(55.615.000)	(100,00)
Jumlah		295.767.539.429	228.350.857.578	67.416.681.851	29,52

Realisasi Belanja Jasa selama TA 2024 sebesar Rp295.767.539.429,00, sedangkan realisasi Belanja Jasa selama TA 2023 sebesar Rp228.350.857.578,00. Realisasi Belanja Jasa TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp67.416.681.851,00 atau sebesar 29,52 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2023. Kenaikan ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan pada belanja langganan air, kenaikan pada belanja langganan daya dan jasa lainnya, dan kenaikan pada belanja jasa lainnya.

Realisasi Belanja Jasa TA 2024 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 38
Realisasi Belanja Jasa Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)		
		Rupiah Murni	PNBP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
522111	Belanja Langganan Listrik	48.566.751.812	0	48.566.751.812
522112	Belanja Langganan Telepon	1.149.684.289	0	1.149.684.289
522113	Belanja Langganan Air	1.789.096.161	0	1.789.096.161
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	19.897.087.205	587.727.835	20.484.815.040
522131	Belanja Jasa Konsultan	364.826.500	469.896.790	834.723.290
522141	Belanja Sewa	8.539.134.838	180.558.807	8.719.693.645
522151	Belanja Jasa Profesi	6.508.60.6399	13.500.000	6.552.106.399
522191	Belanja Jasa Lainnya	207.401.438.793	299.230.000	207.700.668.793
Jumlah		294.216.625.997	1.550.913.432	295.767.539.429

Belanja Pemeliharaan
Rp139.492.240.916,00

B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya. Realisasi Belanja Pemeliharaan (5231) untuk TA 2024 adalah Rp139.492.240.916,00 atau 97,21 persen dari pagu yang senilai Rp143.495.832.000,00. Besaran pagu dan realisasi Belanja Pemeliharaan selama TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 39
Pagu dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	93)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.158.498.000	49.896.715.870	5.674.070	49.891.041.800	98,13
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	483.682.000	468.884.608	36.618	468.847.990	96,93
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	2.508.769.000	2.498.642.859	0	2.498.642.859	99,60
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.653.814.000	1.491.547.488	5.600.000	1.485.947.488	89,85
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.616.468.000	78.354.367.829	55.226.238	78.299.141.591	97,13
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	702.752.000	664.819.188	0	664.819.188	94,60
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	6.688.600.000	6.183.800.000	0	6.183.800.000	92,45
Jumlah		143.495.832.000	139.558.777.842	66.536.926	139.492.240.916	97,21

Realisasi Belanja Pemeliharaan secara neto selama TA 2024 adalah Rp139.492.240.916,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp139.558.777.842,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp66.536.926,00. Pengembalian belanja merupakan pengembalian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 40
Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.891.041.800	33.508.525.468	16.382.516.332	48,89
523112	Belanja Barang Persediaan pemeliharaan Gedung dan Bangunan	468.847.990	612.236.920	(143.388.930)	(23,42)
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	2.498.642.859	2.510.238.623	(11.595.764)	(0,46)
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.485.947.488	581.821.073	904.126.415	155,40

523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.299.141.591	102.613.908.490	(24.314.766.899)	(23,70)
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	664.819.188	772.029.564	(107.210.376)	(13,89)
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	6.183.800.000	6.159.780.000	24.020.000	0,39
Jumlah		139.492.240.916	146.758.540.138	(7.290.319.222)	(4,97)

Realisasi Belanja Pemeliharaan selama TA 2024 sebesar Rp139.492.240.916,00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan selama TA 2023 sebesar Rp146.758.540.138,00. Realisasi Belanja Pemeliharaan selama TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.290.319.222,00 atau 4,97 persen dibandingkan periode sebelumnya yaitu TA 2023. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, kenaikan pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya, dan Belanja Pemeliharaan Lainnya.

Realisasi Belanja Pemeliharaan periode TA 2024 hanya berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM).

Belanja Perjalanan
Dalam Negeri
Rp559.862.943.804,00

B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dalam Negeri merupakan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk membiayai perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) untuk TA 2024 adalah Rp559.862.943.804,00 atau 75.69 persen dari pagu yang senilai Rp739.665.697.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri selama TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 41
Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	193.728.918.000	155.208.168.290	309.435.125	154.898.733.165	79.96
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	192.044.245.000	149.154.148.761	44.484.150	149.109.664.611	77.64
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	264.447.583.000	180.459.890.373	134.915.720	180.324.974.653	68.19
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	89.444.951.000	75.606.127.627	76.556.252	75.529.571.375	84.44
Jumlah		739.665.697.000	560.428.335.051	565.391.247	559.862.943.804	75.69

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri secara neto selama TA 2024 adalah Rp559.862.943.804,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp560.428.335.051,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp565.391.247,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja perjalanan biasa, pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota, pengembalian belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dan pengembalian belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.

Tabel 42
Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	154.898.733.165	230.136.595.923	(75.237.862.758)	(32,69)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.109.664.611	214.383.366.097	(65.273.701.486)	(30,45)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	180.324.974.653	864.500.693.073	(684.175.718.420)	(79,14)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	75.529.571.375	378.005.213.743	(302475.642.368)	(80,02)
Jumlah		559.862.943.804	1.687.025.868.836	(1.127.162.925.032)	(66,81)

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri selama TA 2024 sebesar Rp559.862.943.804,00. sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri selama TA 2023 sebesar Rp1.687.025.868.836,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri periode TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.127.162.925.032,00 atau sebesar 66,81 persen dibanding periode sebelumnya yaitu TA 2023. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan belanja perjalanan biasa, penurunan belanja perjalanan dinas dalam kota, penurunan belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota, dan penurunan belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri periode TA 2024 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 43
Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)		
		Rupiah Murni	PNBP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	153.514.926.719	1.383.806.446	154.898.733.165
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	147.883.234.311	1.226.430.300	149.109.664.611
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	179.758.784.653	566.190.000	180.324.974.653
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	73.974.699.633	1.554.871.742	75.529.571.375
Jumlah		555.131.645.316	4.731.298.488	559.862.943.804

Belanja Perjalanan
Luar Negeri
Rp4.079.963.598.00

B.2.2.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Belanja Perjalanan Luar Negeri merupakan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk membiayai perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242) untuk TA 2024 adalah Rp4.079.963.598.00 atau 59,84 persen dari pagu yang senilai Rp6.818.238.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 44
Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya – Luar Negeri	6.818.238.000	4.088.171.098	8.207.500	4.079.963.598	59,84
Jumlah		6.818.238.000	4.088.171.098	8.207.500	4.079.963.598	59,84

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri secara neto selama TA 2024 adalah Rp4.079.963.598,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp4.088.171.098,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp8.207.500,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja perjalanan dinas lainnya – luar negeri.

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 45
Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524211	Belanja Perjalanan Biasa – Luar Negeri	0	167.609.965	(167.609.965)	(100,00)
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya – Luar Negeri	4.079.963.598	1.906.552.957	2.173.410.641	114,00
Jumlah		4.079.963.598	2.074.162.922	2.005.800.676	96,70

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama TA 2024 sebesar Rp4.079.963.598,00. sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama TA 2023 sebesar Rp2.074.162.922,00. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.005.800.676,00 atau sebesar 96,70 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2023.

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2024 hanya berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM).

Belanja Modal
Rp198.269.076.565,00

B.2.3 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap atau Aset Lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 adalah Rp198.269.076.565,00 atau 96,76 persen dari pagunya sebesar Rp204.915.168.000,00. Secara rinci, pagu dan realisasi belanja modal TA 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 46
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Modal

Kode Akun	Uraian	Pagu	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5311	Belanja Modal Tanah	2.826.793.000	2.817.688.400	0	2.817.688.400	99,68
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.303.800.000	128.662.554.387	2.604.750	128.659.949.637	98,74
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.125.821.000	55.232.063.504	31.634.976	55.200.428.528	91,81
5361	Belanja Modal Lainnya	11.658.754.000	11.591.010.000	0	11.591.010.000	99,42
Jumlah		204.915.168.000	198.303.316.291	34.239.726	198.269.076.565	96,76

Realisasi Belanja Modal secara neto selama TA 2024 sebesar Rp198.269.076.565,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Operasional sebesar Rp198.303.316.291,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp34.239.726.

Realisasi Belanja Barang Modal TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 47
Realisasi Belanja Barang Modal TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5311	Belanja Modal Tanah	2.817.688.400	23.055.900.300	(20.709.330.900)	(88,02)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.659.949.637	169.507.326.581	(40.847.376.944)	(24,10)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.200.428.528	83.517.718.631	(28.317.290.103)	(33,91)
5361	Belanja Modal Lainnya	11.591.010.000	32.564.978.464	(20.973.968.464)	(64,41)
Jumlah		198.269.076.565	309.117.042.976	(110.847.966.411)	(35,86)

Realisasi Belanja Modal Badan Pusat Statistik TA 2024 meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2024 bersumber dana dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Belanja Modal Tanah
Rp2.817.688.400,00

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pagu dan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 48
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
531111	Belanja Modal Tanah	2.480.362.000	2.475.240.400	0	2.475.240.400	99,79
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	346.431.000	342.448.000	0	342.448.000	98,85
Jumlah		2.826.793.000	2.817.688.400	0	2.817.688.400	99,68

Realisasi Belanja Modal Tanah secara neto pada periode TA 2024 adalah Rp2.817.688.400,00 atau 99,68 persen dari nilai pagu yang sebesar Rp2.826.793.000,00. Tidak terdapat pengembalian Belanja Modal Tanah pada periode TA 2024.

Rincian realisasi Belanja Modal Tanah periode TA 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 49
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
531111	Belanja Modal Tanah	2.475.240.400	23.293.870.300	(20.818.629.900)	(89,37)
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	342.448.000	0	342.448.000	100,00
Jumlah		2.817.688.400	23.527.019.300	(20.709.330.900)	(88,02)

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp2.817.688.400,00, sedangkan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp23.527.019.300,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp20.709.330.900,00 atau sebesar 88,02 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2023.

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 hanya berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM).



Belanja Modal Peralatan dan Mesin **B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
 Rp128.659.949.637,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pagu dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada periode TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 50
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.286.800.000	128.662.554.387	2.604.750	128.659.949.637	98,75
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	17.000.000	0	0	0	0,00
Jumlah		130.303.800.000	128.662.554.387	2.604.750	128.659.949.637	98.74

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin secara neto TA 2024 adalah Rp128.659.949.637,00 atau 98,74 persen dari nilai pagu yang sebesar Rp130.303.800.000,00. Realisasi pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama TA 2024 adalah sebesar Rp2.604.750,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 51
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.659.949.637	169.328.887.976	(40.668.938.339)	(24,02)
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0,00
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	178.438.605	(178.438.605)	(100,00)
Jumlah		128.659.949.637	169.507.326.581	(40.847.376.944)	(24,10)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama TA 2024 sebesar Rp128.659.949.637,00, sedangkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama TA 2023 sebesar Rp169.507.326.581,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp40.847.376.944,00 atau sebesar 24,10 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2023.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.



Tabel 52
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		RM	PNBP	SBSN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.217.011.081	1.978.042.703	2.464.895.853	128.659.949.637
Jumlah		124.217.011.081	1.978.042.703	2.464.895.853	128.659.949.637

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 Rp55.200.428,528,00

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pagu dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 53
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.072.955.000	18.351.160.738	731.041	18.350.429.697	79,53
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	20.000.000	21.709.000	1.793.000	19.916.000	99,58
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	14.020.000	14.020.000	0	14.020.000	100,00
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	37.018.846.000	36.845.173.766	29.110.935	36.816.062.831	99,45
Jumlah		60.125.821.000	55.232.063.504	31.634.976	55.200.428.528	91,81

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan secara neto TA 2024 adalah Rp55.200.428.528,00 atau 91,81 persen dari nilai pagu yang sebesar Rp60.125.821.000,00. Realisasi pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2024 adalah sebesar Rp31.634.976,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 54
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.350.429.697	34.490.171.338	(16.139.741.641)	(46,80)

533113	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	24.873.000	(24.873.000)	(100,00)
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	19.916.000	6.816.351.322	(6.796.435.322)	(99,71)
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	14.020.000	120.617.445	(106.597.445)	(88,38)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	36.816.062.831	42.065.705.526	(5,249,642,695)	(12,48)
Jumlah		55.200.428.528	83.517.718.631	(28.317.290.103)	(33,91)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2024 sebesar Rp55.200.428.528,00, sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2023 sebesar Rp83.517.718.631,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp28.317.290.103,00 atau sebesar 33,91 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2023.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 55
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		RM	PNBP	SBSN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.638.557.565	0	11.711.872.132	18.350.429.697
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	19.916.000	0	0	19.916.000
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	14.020.000	0	0	14.020.000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	34.691.239.862	2.124.822.969	0	36.816.062.831
Jumlah		41.363.733.427	2.124.822.969	11.711.872.132	55.200.428.528

Belanja Modal Lainnya
Rp11.591.010.000,00

B.2.3.4 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai aset tersebut dapat digunakan dan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Pagu dan realisasi Belanja Modal Lainnya pada periode TA 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 56
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Lainnya

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
536111	Belanja Modal Lainnya	11.658.754.000	11.591.010.000	0	11.591.010.000	99,42
	Jumlah	11.658.754.000	11.591.010.000	0	11.591.010.000	99,42

Realisasi Belanja Modal Lainnya secara neto TA 2024 adalah Rp11.591.010.000,00 atau 99,42 persen dari nilai pagu sebesar Rp11.658.754.000,00. Tidak terdapat pengembalian Belanja Modal Lainnya pada periode TA 2024.

Rincian realisasi Belanja Lainnya TA 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 57
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
536111	Belanja Modal Lainnya	11.591.010.000	32.564.978.464	(20.973.968.464)	(64,41)
	Jumlah	11.591.010.000	32.564.978.464	(20.973.968.464)	(64,41)

Realisasi Belanja Modal Lainnya selama TA 2024 sebesar Rp11.591.010.000,00, sedangkan realisasi Belanja Modal Lainnya selama TA 2023 sebesar Rp32.564.978.464,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp20.973.968.464,00 atau sebesar 64,41 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2023.

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 hanya berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM).



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET

Aset Lancar

Rp51.921.547.997,00

C.1.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp51.921.547.997,00 dan Rp69.382.076.214,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Neraca BPS per 31 Desember 2024 dan 2023 tersaji pada tabel 58.

Tabel 58
Rincian Aset Lancar

No.	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.230.000	0
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	13.080.793	78.979.277
3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	17.435.230.541	27.174.456.006
4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	61.096.562
5	Piutang Bukan Pajak	2.041.478.916	1.583.944.337
6	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(434.784.343)	(440.851.173)
7	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	15.227.357.084	18.101.890.494
8	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(15.190.110.920)	(17.293.092.580)
9	Persediaan	32.823.065.926	40.115.653.291
	Jumlah	51.921.547.997	69.382.076.214

Kas di Bendahara
Pengeluaran

Rp6.230.000,00

C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.230.000,00 dan Rp0,00, yang merupakan saldo kas/bank yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan). Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat berdasarkan nilai nominal dan disajikan dalam mata uang rupiah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 terdapat pada satker BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat di wilayah BPS Provinsi Jambi. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ini sudah disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian sisa TUP pada tanggal 7 Januari 2025 dengan NTPN 7342A0JUTF3454US sebesar Rp6.230.000,00.

**Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp13.080.793,00**

C.1.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.080.793,00 dan Rp78.979.277,00. Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik itu saldo yang merupakan saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai serta belanja hibah yang masih dalam bentuk SPJ yang belum disahkan oleh KPPN. Kas Lainnya dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal dan disajikan dalam mata uang rupiah.

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut.

**Tabel 59
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Wilayah/Satker**

No.	Satker	Wilayah	Nilai (Rp)	Tanggal Setor	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh Singkil	Aceh	2.815.315	4 Februari 2025	PPh: B80CD746V7754P1H; PPN: 8FB7AIPM07OQKCNJ
2	Kep. Yapen	Papua	8.445.946	24 Maret 2025	PPh: C5F9B79T0KU1393N; PPN: A3D905H20VP86EC4
3	Natuna	Kepulauan Riau	1.819.532	11 Februari 2025	1EA4000R0IRQ09DL
Jumlah			13.080.793		

**Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp17.435.230.541,00**

C.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp17.435.230.541,00 dan Rp27.174.456.006,00. Saldo ini merupakan piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh BPS, namun BPS telah membayar atas barang/jasa tersebut. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) dicatat berdasarkan nilai nominal dan disajikan dalam mata uang rupiah.

Daftar saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 60
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per Wilayah/Satker**

No.	Wilayah/Satker	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Settama	12.310.725.020	14.822.897.950
2	Pusdiklat BPS	2.606.394.052	5.974.917.891
3	Polstat STIS	21.460.669	7.926.670
4	Jawa Barat	397.263.772	643.941.405
5	Jawa Tengah	49.602.178	708.979.178
6	DI Yogyakarta	35.464.733	31.332.432

7	Jawa Timur	174.567.467	233.115.325
8	Aceh	5.834.583	46.237.631
9	Sumatera Utara	18.320.951	311.120.714
10	Sumatera Barat	44.269.366	131.196.481
11	Riau	132.431.915	159.273.900
12	Jambi	0	51.902.180
13	Sumatera Selatan	150.784.181	260.227.057
14	Lampung	361.208	177.661.482
15	Kalimantan Barat	56.254.558	262.918.500
16	Kalimantan Tengah	13.095.726	9.169.688
17	Kalimantan Selatan	0	14.429.068
18	Kalimantan Timur	90.501.206	342.632.610
19	Sulawesi Utara	23.062.000	9.885.267
20	Sulawesi Tengah	71.081.556	18.035.562
21	Sulawesi Selatan	66.176.036	149.277.050
22	Sulawesi Tenggara	0	1.164.785
23	Maluku	110.222.388	418.539.750
24	Bali	66.652.666	68.220.279
25	Nusa Tenggara Barat	238.655.291	227.787.729
26	Nusa Tenggara Timur	62.192.892	166.368.325
27	Papua	50.913.598	653.963.275
28	Bengkulu	20.867.879	147.179.306
29	Maluku Utara	5.207.376	127.287.817
30	Banten	165.847.734	278.027.134
31	Bangka Belitung	13.914.371	14.868.012
32	Gorontalo	0	633.770
33	Kepulauan Riau	50.855.627	47.245.252
34	Papua Barat	16.986.310	116.987.651
35	Sulawesi Barat	2.218.887	173.984.371
36	Kalimantan Utara	363.044.345	365.120.509
Jumlah		17.435.230.541	27.174.456.006

*Pendapatan Yang
Masih harus Diterima
Rp0,00*

C.1.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp61.096.562,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan PNBPN yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara serta belum ada dokumen penagihannya sampai dengan tanggal Neraca. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dicatat berdasarkan nilai nominal dan disajikan dalam mata uang rupiah.

Tidak terdapat saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Neraca per 31 Desember 2024.

*Piutang Bukan Pajak
Rp2.041.478.916,00*

C.1.1.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.041.478.916,00 dan Rp1.583.944.337,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau pengakuan/klaim pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah

diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan dan disajikan dalam mata uang rupiah. Daftar saldo Piutang Bukan Pajak per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 61
Rincian Piutang Bukan Pajak per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	196.825.100	165.497.709	31.327.391
2	Pusdiklat BPS	432.692	649.324	(216.632)
3	Polstat STIS	0	1.735.422	(1.735.422)
4	DKI Jakarta	0	387.832	(387.832)
5	Jawa Barat	150.300.758	113.961.171	36.339.587
6	Jawa Tengah	17.354.383	15.516.567	1.837.816
7	DI Yogyakarta	764.270	0	764.270
8	Jawa Timur	54.249.315	12.485.144	41.764.171
9	Sumatera Utara	0	1.544.041	(1.544.041)
10	Sumatera Barat	36.428.780	6.841.230	29.587.550
11	Riau	0	468.228	(468.228)
12	Sumatera Selatan	75.808.266	679.272	75.128.994
13	Lampung	0	145.488	(145.488)
14	Kalimantan Barat	69.700	1.493.048	(1.423.348)
15	Kalimantan Selatan	9.039.716	0	9.039.716
16	Kalimantan Timur	0	5.871.767	(5.871.767)
17	Sulawesi Utara	0	847.176	(847.176)
18	Sulawesi Selatan	8.242.990	3.790.752	4.452.238
19	Sulawesi Tenggara	0	265.446	(265.446)
20	Bali	0	96.918	(96.918)
21	Nusa Tenggara Timur	70.929.626	0	70.929.626
22	Papua	4.735.720	42.597.560	(37.861.840)
23	Bengkulu	210.600	245.560	(34.960)
24	Maluku Utara	337.838	0	337.838
25	Banten	2.825.521	105.799	2.719.722
26	Bangka Belitung	234.868.281	172.887	234.695.394
27	Kep. Riau	0	187.636	(187.636)
28	Papua Barat	145.041	5.282.660	(5.137.619)
29	Sulawesi Barat	1.639.000	6.804.381	(5.165.381)
30	Kalimantan Utara	1.176.271.319	1.196.271.319	(20.000.000)
	Jumlah	2.041.478.916	1.583.944.337	457.534.579

Sedangkan mutasi Piutang Bukan Pajak pada 31 Desember 2024 dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 62
Mutasi Piutang Bukan Pajak

No.	Wilayah/Satker	Saldo 31-Des-23 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pelunasan (Rp)	Saldo 31-Des-24 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	165.497.709	129.579.979	98.252.588	196.825.100
2	Pusdiklat BPS	649.324	432.692	649.324	432.692
3	Polstat STIS	1.735.422	0	1.735.422	0
4	DKI Jakarta	387.832	0	387.832	0
5	Jawa Barat	113.961.171	438.923.466	402.583.879	150.300.758

No.	Wilayah/Satker	Saldo 31-Des-23 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pelunasan (Rp)	Saldo 31-Des-24 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Jawa Tengah	15.516.567	17.824.672	15.986.856	17.354.383
7	Jawa Timur	12.485.144	764.270	0	13.249.414
8	Aceh	0	54.714.683	12.950.512	41.764.171
9	Sumatera Utara	1.544.041	59.301.722	60.845.763	0
10	Sumatera Barat	6.841.230	38.232.049	8.644.499	36.428.780
11	Riau	468.228	411.044	879.272	0
12	Sumatera Selatan	679.272	80.808.266	5.679.272	75.808.266
13	Lampung	145.488	0	145.488	0
14	Kalimantan Barat	1.493.048	69.700	1.493.048	69.700
15	Kalimantan Timur	5.871.767	15.717.170	6.677.454	14.911.483
16	Sulawesi Utara	847.176	0	5.871.767	(5.024.591)
17	Sulawesi Selatan	3.790.752	0	847.176	2.943.576
18	Sulawesi Tenggara	265.446	17.803.372	13.351.134	4.717.684
19	Bali	96.918	0	265.446	(168.528)
20	Nusa Tenggara Barat	0	178.000	274.918	(96.918)
21	Nusa Tenggara Timur	0	70.929.626	0	70.929.626
22	Papua	42.597.560	4.735.720	42.597.560	4.735.720
23	Bengkulu	245.560	210.600	245.560	210.600
24	Maluku Utara	0	339.527	1.689	337.838
25	Banten	105.799	3.006.864	287.142	2.825.521
26	Bangka Belitung	172.887	236.454.429	1.759.035	234.868.281
27	Kepulauan Riau	187.636	8.472	196.108	0
28	Papua Barat	5.282.660	2.022.774	7.160.393	145.041
29	Sulawesi Barat	6.804.381	2.009.023	7.174.404	1.639.000
30	Kalimantan Utara	1.196.271.319	272.000	20.272.000	1.176.271.319
Jumlah		1.583.944.337	1.174.750.120	717.215.541	2.041.478.916

Rincian mutasi transaksi Piutang Bukan Pajak pada tanggal 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 63
Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak

No.	Uraian	31-Des-23 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	31-Des-24 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Piutang sewa Gedung dan bangunan	71.496.864	18.938.956	43.716.222	46.719.598
2	Piutang atas penerimaan biaya pendidikan	488.387	0	488.387	0
3	Piutang atas denda	414.796.768	138.000.480	138.000.480	414.796.768
4	Piutang Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	15.407.815	32.766.696	15.407.815	32.766.696
5	Piutang atas pengembalian kelebihan realisasi belanja pegawai	136.807.297	144.424.064	123.827.726	157.403.635
6	Piutang atas pengembalian kelebihan realisasi belanja barang	48.145.176	90.559.833	48.145.176	90.559.833
7	Piutang atas pengembalian kelebihan realisasi belanja modal	338.634.081	313.112.288	119.109.486	532.636.883
8	Piutang atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	558.167.949	436.947.803	228.520.249	766.595.503
Jumlah		1.583.944.337	1.174.750.120	717.215.541	2.041.478.916

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan Pajak
Rp434.784.343,00

C.1.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp434.784.343,00 dan Rp440.851.173,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing Piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 64
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Wilayah/Satker

No.	Uraian	Nilai Penyisihan Piutang Tdk Tertagih (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Settama	1.074.020
2	Jawa Barat	751.504
3	Jawa Tengah	86.770
4	DI Yogyakarta	3.822
5	Jawa Timur	271.246
6	Sumatera Barat	182.145
7	Sumatera Selatan	379.041
8	Kalimantan Barat	349
9	Kalimantan Selatan	45.198
10	Nusa Tenggara Timur	354.649
11	Papua	23.678
12	Bengkulu	1.053
13	Maluku Utara	1.689
14	Banten	14.128
15	Bangka Belitung	1.174.342
16	Papua Barat	725
17	Sulawesi Barat	8.195
18	Kalimantan Utara	430.411.789
Jumlah		434.784.343

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp15.227.357.084,00

C.1.1.7 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.227.357.084,00 dan Rp18.101.890.494,00. Saldo ini merupakan nilai tagihan TP/TGR yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2024 dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 16 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua bahwa Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang dibukukan ke dalam Neraca merupakan bagian dari Aset Lancar, sedangkan sisanya dibukukan ke dalam Tagihan TP/TGR pada Piutang Jangka Panjang. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31

Desember 2024 merupakan saldo dari debitur yang dikenakan TP/TGR melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Keputusan Pembebanan (SKP) serta reklasifikasi saldo akun Aset Lain-Lain yang menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yaitu debitur TP/TGR yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL.

Berdasarkan proses penetapan Piutang TP/TGR, debitur dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Debitur yang telah ditetapkan nilai kerugian negaranya berdasarkan SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan.
2. Debitur yang sedang dalam proses pembebanan kerugian negaranya yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR).
3. Debitur yang nilai piutangnya telah dilimpahkan ke KPKNL.

Saldo piutang atas kerugian negara yang masuk sebagai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang sebesar Rp15.227.357.084,00 merupakan nilai yang status debiturnya telah ditetapkan sebagai TGR.

Daftar saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 65
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	15.227.357.084	18.101.890.494	(2.874.533.410)
Jumlah		15.227.357.084	18.101.890.494	(2.874.533.410)

Rincian mutasi transaksi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2023, Awal		Rp	18.101.890.494
Penambahan:			
Penetapan kasus kerugian Negara sebagai Tuntutan Ganti Rugi(TGR)	Rp	422.588.000	
Bagian Lancar TP/TGR yang direklas sebagai Piutang Jangka Panjang yaitu Piutang Tagihan TP/TGR	Rp	3.107.813	
Jumlah Penambahan		Rp 425.695.813	
Pengurang:			
Pelunasan TGR melalui setoran PNB	(Rp	1.406.882.341)	
Diskon keringanan piutang dari program CP (<i>Crash Program</i>)	(Rp	1.832.416.882)	
Penghapusan Piutang TGR	(Rp	60.930.000)	
Jumlah Pengurang		(Rp 3.300.229.223)	
Mutasi Penambah/Pengurang			(Rp 2.874.533.410)
Saldo per 31 Desember 2024, Akhir			Rp 15.227.357.084

Pada tahun 2024, Pemerintah membuat kebijakan yang berkenaan dengan pengenaan keringanan utang bagi debitur atau disebut *crash program* (CP). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN Tahun Anggaran 2024. Kebijakan CP

adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian keringanan utang kepada penanggung utang. Keringanan utang dimaksud dalam CP merupakan pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh penanggung utang dengan diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya. Ketentuan pemberian keringanan utang pokok adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari sisa utang pokok, dalam hal Piutang Negara didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan.
2. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari sisa utang pokok, dalam hal Piutang Negara tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan.
3. Tambahan keringanan utang pokok, jika dilakukan pelunasan dalam waktu:
 - a. sampai dengan Juni 2024, sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan;
 - b. pada Juli sampai dengan September 2024, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan; atau
 - c. pada Oktober sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, sebesar 20% (dua puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan.

Atas kebijakan CP di tahun 2024, terdapat 3 (tiga) debitur yang mengikuti CP dan mendapatkan diskon berupa keringanan piutang TGR dengan sebesar Rp1.832.416.882,12. Rincian debitur yang mendapatkan keringanan utang TP/TGR melalui kebijakan CP di tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 66
Rincian Debitur Yang Mengikuti Kebijakan CP Tahun 2024

No.	Nama	Saldo TGR Sebelum CP (Rp)	Diskon CP (Rp)	Persetujuan CP (Rp)	Pelunasan PNB (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Alfons – Palangkaraya	2.080.000.000	1.360.000.000	640.000.000	640.000.000	0
2	Aditya Riskian	147.600.000	100.368.000	47.232.000	47.232.000	0
3	Agus Hartoyo	547.130.709	372.048.882	175.081.826	175.081.826	0
Jumlah		2.774.730.709	1.832.416.882	862.313.826	862.313.826	0

Selain program CP, terdapat kebijakan penghapusan piutang negara bersyarat atas TGR untuk tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor 39/S/II/7/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 291/KM.6/2024 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara c.q. Badan Pusat Statistik atas Nama Fauzi dan Kawan-Kawan (9 Penanggung Utang) sebesar Rp60.930.000,00. Rincian debitur yang mendapatkan kebijakan penghapusan piutang negara bersyarat atas TGR untuk tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 67
Rincian Debitur atas Penghapusan Piutang

No.	Nama	Nomor PSBDT	Saldo Utang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fauzi	PSBDT-01/PUPNC.10.01/2021	3.780.000
2	Moch Wayudi, B.St	PSBDT-02/PUPNC.10.01/2021	3.780.000
3	Constan Manurung, B.St	PSBDT-03/PUPNC.10.01/2021	3.555.000
4	Sapika Wati Wiryana	PSBDT-04/PUPNC.10.01/2021	3.780.000
5	Rebecca Ulina Siregar	PSBDT-05/PUPNC.10.01/2021	3.060.000
6	R. Aang Wiguna. B.St	PSBDT-06/PUPNC.10.01/2021	3.780.000
7	Nuryanto	PSBDT-01/PUPNC.10.01/2022	13.995.000
8	Elis Holiday	PSBDT-02/PUPNC.10.01/2022	12.900.000
9	Yudianto	PSBDT-03/PUPNC.10.01/2022	12.300.000
Jumlah			60.930.000

Rincian debitur Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp15.190.110.920,00

C.1.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.190.110.920,00 dan Rp17.293.092.580,00 atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 68
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Kualitas Piutang	Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Rp)	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan Piutang Tdk Tertagih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	Lancar	37.433.331	0,5	187.167
		Macet	15.189.923.753	100	15.189.923.753
Jumlah			15.227.357.084		15.190.110.920

Persediaan Rp32.823.065.926,00

C.1.1.9 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp32.823.065.926,00 dan Rp40.115.653.291,00. Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.834.035.277,00 diperoleh dari hasil inventarisasi fisik persediaan yang dilengkapi dengan Berita Acara *Stock Opname*, terdiri dari:

Tabel 69
Rincian Persediaan

Kode	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
117111	Barang Konsumsi	32.105.593.363	39.372.986.704
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	717.472.563	742.666.587
Jumlah		32.823.065.926	40.115.653.291

Perhitungan mutasi nilai Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 (akhir)	Rp	32.823.065.926
Saldo per 31 Desember 2023 (awal)	Rp	40.115.653.291
Mutasi Tambah/(Kurang)	(Rp)	7.292.587.365)
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	61.444.962.710
Saldo Awal	Rp	120.596.891
Transfer Masuk	Rp	27.314.924.078
Reklasifikasi Masuk	Rp	551.846.740
Reklasifikasi Dari Aset	Rp	29.759.624
Perolehan Lainnya	Rp	14.537.231
Batal Catat Usang Rusak	Rp	229.634.145
Koreksi Nilai Tambah	Rp	397.864.011
Koreksi Kuantitas Tambah	Rp	25.556.181
Koreksi Normalisasi Persediaan	Rp	2.070.000
Koreksi Transfer Keluar Online	Rp	42.957.818
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	90.174.709.429
Mutasi Kurang		
Habis Pakai	(Rp)	63.219.896.241)
Transfer Keluar	(Rp)	27.357.881.896)
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	515.803.628)
Reklasifikasi ke Aset	(Rp)	423.387.196)
Keluar Lainnya	(Rp)	5.489.296)
Koreksi Nilai Kurang	(Rp)	7.614.574)
Koreksi Kuantitas Kurang	(Rp)	428.731.445)
Hasil Opname Fisik	(Rp)	599.209.472)
Rusak	(Rp)	156.166.492)
Usang	(Rp)	4.753.116.554)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp)	97.467.296.794)
Jumlah Rincian Mutasi	(Rp)	7.292.587.365)

Rincian saldo Persediaan per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 70
Rincian Persediaan Per Wilayah/Satker

No.	Kode	Wilayah/Satker	31-Des-24 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0199	Settama	3.747.528.960
2	0199	Pusdiklat	755.982.741
3	0199	Polstat STIS	143.957.610
4	0100	DKI Jakarta	897.058.659
5	0200	Jawa Barat	1.302.908.565

No.	Kode	Wilayah/Satker	31-Des-24 (Rp)
6	0300	Jawa Tengah	1.991.775.127
7	0400	DI Yogyakarta	340.895.662
8	0500	Jawa Timur	1.547.052.345
9	0600	Aceh	979.370.151
10	0700	Sumatera Utara	887.580.864
11	0800	Sumatera Barat	1.507.143.026
12	0900	Riau	349.327.150
13	1000	Jambi	328.403.575
14	1100	Sumatera Selatan	591.814.184
15	1200	Lampung	907.667.622
16	1300	Kalimantan Barat	660.440.748
17	1400	Kalimantan Tengah	911.499.014
18	1500	Kalimantan Selatan	1.020.631.900
19	1600	Kalimantan Timur	805.122.286
20	1700	Sulawesi Utara	607.211.286
21	1800	Sulawesi Tengah	782.046.255
22	1900	Sulawesi Selatan	1.325.933.362
23	2000	Sulawesi Tenggara	513.066.692
24	2100	Maluku	1.429.752.668
25	2200	Bali	148.600.950
26	2300	Nusa Tenggara Barat	141.065.129
27	2400	Nusa Tenggara Timur	939.202.429
28	2500	Papua	1.473.792.369
29	2600	Bengkulu	468.601.580
30	2800	Maluku Utara	488.164.552
31	2900	Banten	1.937.612.088
32	3000	Bangka Belitung	332.574.985
33	3100	Gorontalo	356.544.934
34	3200	Kepulauan Riau	390.542.736
35	3300	Papua Barat	1.226.056.962
36	3400	Sulawesi Barat	153.063.667
37	3500	Kalimantan Utara	433.073.093
Jumlah			32.823.065.926

Terdapat jenis barang yang merupakan persediaan dengan kondisi rusak dan usang. Rincian atas barang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang dalam kondisi rusak sebesar Rp187.132.466,00.
2. Barang dalam kondisi usang sebesar Rp355.477.048,00.

Jumlah dan Jenis barang persediaan secara terinci dilampirkan pada Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap

Rp5.244.096.052.870,00

C.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.244.096.052.870,00 dan Rp5.259.776.645.128,00. Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 71
Rincian Aset Tetap

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.218.598.001.809	3.203.381.161.527	15.216.840.282
Peralatan & Mesin	2.196.281.247.356	2.183.257.236.943	13.024.010.413
Gedung & Bangunan	2.089.954.257.109	2.030.816.486.155	59.137.770.954
Aset Tetap Lainnya	35.254.629.078	38.217.040.150	(2.962.411.072)
KDP	27.044.596.490	33.118.386.227	(6.073.789.737)
Jumlah	7.567.132.731.842	7.488.790.311.002	78.342.420.840
Akumulasi Penyusutan	(2.323.036.678.972)	(2.229.013.665.874)	(94.023.013.098)
Nilai Buku Aset Tetap	5.244.096.052.870	5.259.776.645.128	(15.680.592.258)

Posisi Aset Tetap pada Neraca Laporan Keuangan dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada Laporan Barang Milik Negara (BMN) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 72
Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2024

Uraian	Neraca (Rp)	SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.218.598.001.809	3.218.598.001.809	0
Peralatan & Mesin	2.196.281.247.356	2.196.281.247.356	0
Gedung & Bangunan	2.089.954.257.109	2.089.954.257.109	0
Aset Tetap Lainnya	35.254.629.078	35.254.629.078	0
KDP	27.044.596.490	27.044.596.490	0
Jumlah	7.567.132.731.842	7.567.132.731.842	0
Akumulasi Penyusutan	(2.323.036.678.972)	(2.323.036.678.972)	0
Nilai Buku Aset Tetap	5.244.096.052.870	5.244.096.052.870	0

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan nilai masing-masing jenis Aset Tetap dikarenakan adanya mutasi serta hubungannya dengan belanja modal, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian selanjutnya.

Tanah

Rp3.218.598.001.809,00

C.1.2.1 Tanah

Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2024 adalah Rp3.218.598.001.809,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2023 adalah Rp3.203.381.161.527,00. Secara ringkas perubahan saldo Tanah disajikan sebagai berikut.

Tabel 73
Perubahan Saldo Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.218.598.001.809	3.203.381.161.527	15.216.840.282
Jumlah	3.218.598.001.809	3.203.381.161.527	15.216.840.282

Perhitungan mutasi nilai Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 (akhir)	Rp	3.218.598.001.809
Saldo per 31 Desember 2023 (awal)	Rp	3.203.381.161.527
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	15.216.840.282
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	252.000.000
Pembelian	Rp	2.765.731.102
Hibah Masuk	Rp	2.554.114.282
Transfer Masuk	Rp	2.448.328.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	2.207.769.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp	146.631.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	7.635.086.187
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	209.281.400
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	15.022.709.000
Perolehan lainnya	Rp	588.000.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	33.829.649.971
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	(Rp)	5.744.456.000
Hibah Keluar	(Rp)	2.515.412.840
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	2.207.769.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(Rp)	462.500.000
Koreksi Pencatatan	(Rp)	7.673.876.902
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp)	8.794.947
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp)	18.612.809.689
Jumlah Rincian Mutasi	Rp	15.216.840.282

Realisasi belanja modal tanah sampai dengan 31 Desember 2024 secara neto sebesar Rp2.817.688.400,00. Realisasi belanja modal tanah yang mempengaruhi mutasi nilai Tanah, alokasi penggunaan belanja modal tanah, dan perolehan tanah yang menggunakan selain belanja modal tanah dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian	Rp	2.765.731.102
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	209.281.400
Jumlah realisasi belanja modal tanah pada mutasi nilai Tanah	Rp	2.975.012.502
Penambahan:		
Realisasi belanja modal tanah yang membentuk KDP	Rp	146.631.000
Jumlah Penambahan	Rp	146.631.000
Pengurangan:		

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang menambah nilai tanah	(Rp	303.955.102)		
Jumlah Pengurangan	(Rp	303.955.102)		
Tambah/(Kurang)			(Rp	157.324.102)
Realisasi belanja modal tanah (neto)			Rp	2.817.688.400

Penjelasan rincian mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal tanah yang dicatat sebagai KDP sebelum menjadi aset definitifnya sebesar Rp146.631.000,00.
- Pengurangan dikarenakan adanya penambahan nilai pada aset tanah yang menggunakan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp303.955.102,00.

Transaksi mutasi saldo aset Tanah yang berasal dari selain transaksi realisasi belanja modal yang berakibat penambahan dan pengurangan saldo aset Tanah dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penambahan yang berasal dari transaksi hibah masuk dengan total nilai sebesar Rp2.554.114.282,00 terdapat pada satker-satker sebagai berikut:
 1. BPS Kab. Aceh Barat Daya di wilayah Aceh, yaitu mendapat hibah tanah seluas 2.624 m² dari Pemkab Aceh Barat Daya dengan nilai sebesar Rp38.177.018,00.
 2. BPS Kota Lubuk Linggau di wilayah Sumatera Selatan, yaitu mendapat hibah tanah seluas 710 m² dari Pemkot Lubuk Linggau dengan nilai sebesar Rp361.952.264,00.
 3. BPS Kab. Hulu Sungai Selatan di wilayah Kalimantan Selatan mendapat hibah tanah seluas 2.148 m² dari Pemkab Hulu Sungai Selatan dengan nilai sebesar Rp2.061.170.000,00.
 4. BPS Kab. Balangan di wilayah Kalimantan Selatan mendapat hibah tanah seluas 1.800 m² dari Pemkab Balangan dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00.
 5. BPS Kab. Alor di wilayah Nusa Tenggara Timur mendapat hibah tanah seluas 348 m² dari Pemkab Alor dengan nilai sebesar Rp15.665.000,00.
 6. BPS Kab. Nunukan di wilayah Kalimantan Utara mendapat hibah tanah seluas 381 m² dari Pemkab Nunukan dengan nilai sebesar Rp57.150.000,00.
- b. Penambahan yang berasal dari transaksi transfer masuk dengan total nilai sebesar Rp2.448.328.000,00 terdapat pada satker-satker sebagai berikut:
 1. Settama BPS yang menerima transfer aset berupa tanah bangunan rumah negara golongan I seluas 216 m² dari Kementerian Keuangan dengan nilai sebesar Rp627.164.000,00.
 2. BPS Kota Sorong di wilayah Papua Barat menerima transfer aset berupa tanah seluas 2.000 m² dari satker BPS Kab. Sorong di wilayah Papua Barat dengan nilai sebesar Rp1.194.000.000,00.
 3. BPS Kab. Bandung di wilayah Jawa Barat menerima transfer aset berupa tanah bangunan rumah negara golongan I seluas 216 m² dari satker Settama BPS senilai



Rp627.164.000,00.

- c. Penambahan yang berasal dari transaksi reklasifikasi masuk sebesar Rp2.207.769.000,00 terdapat pada satker-satker sebagai berikut:
1. BPS Kab. Karawang di wilayah Jawa Barat sebesar Rp297.360.000,00 yang merupakan reklasifikasi masuk pencatatan aset tanah dengan klasifikasi tanah bangunan kantor pemerintah dan rumah negara golongan I tipe D dari yang semula dengan klasifikasi tanah bangunan rumah golongan I.
 2. BPS Kab. Garut di wilayah Jawa Barat sebesar Rp410.718.000,00 yang merupakan reklasifikasi masuk pencatatan klasifikasi aset tanah bangunan kantor pemerintah yang sebelumnya adalah klasifikasi aset tanah untuk rumah negara golongan I.
 3. BPS Kab. Ogan Komering Ulu di wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp586.927.000,00 yang merupakan reklasifikasi masuk pencatatan bangunan gedung tertutup permanen yang sebelumnya adalah aset tanah bangunan rumah negara golongan I.
 4. BPS Kab. Lahat di wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp112.679.000,00 yang merupakan reklasifikasi masuk atas kesalahan pencatatan kode barang untuk AC Split.
 5. BPS Kab. Karo di wilayah Sumatera Utara sebesar Rp800.085.000,00 yang merupakan alih fungsi tanah milik pemerintah.
- d. Penambahan yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah sebesar Rp7.635.086.187,00 dengan rincian satker sebagai berikut.
1. BPS Kota Jambi di wilayah Jambi senilai Rp1.187,00.
 2. BPS Kab. Minahasa Selatan di wilayah Sulawesi Utara senilai Rp61.776.000,00
 3. BPS Kab. Kepulauan Mentawai di Wilayah Sumatera Barat senilai Rp208.647.000,00
 4. BPS Prov. Kalimantan Barat di wilayah Kalimantan Barat senilai Rp7.364.662.000,00
- e. Penambahan yang berasal dari transaksi perolehan lainnya sebesar Rp588.000.000,00 yang terdapat pada satker BPS Kab. Kudus pada wilayah Jawa Tengah. Transaksi ini merupakan nilai tanah yang di-*input* pada menu perolehan lainnya aplikasi SAKTI sebagai bagian dari pembelian rumah negara golongan I tipe C senilai Rp922.000.000,00 sedangkan sisanya yang sebesar Rp334.000.000,00 merupakan nilai bangunan yang di-*input* pada menu pembelian aplikasi SAKTI.
- f. Penambahan yang berasal dari transaksi pengembangan nilai aset secara langsung sebesar Rp209.281.400,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. BPS Kab. Minahasa Selatan di wilayah Sulawesi Utara senilai Rp13.464.400,00.
 2. BPS Kab. Bandung di wilayah Jawa Barat senilai Rp195.817.000,00.



- g. Penambahan yang berasal dari transaksi pengembangan melalui KDP sebesar Rp146.631.000,00 terdapat pada satker BPS Kota Banda Aceh di wilayah Aceh.
- h. Penambahan yang berasal dari penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp15.022.709.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. BPS Kab. Jayawijaya di wilayah Papua sebesar Rp617.706.000,00.
 - 2. Settama BPS sebesar Rp14.405.003.000,00 yang merupakan penggunaan kembali aset tanah yang sebelumnya dinonaktifkan yaitu berupa tanah bangunan rumah negara golongan I NUP 8 dan 9 berdasarkan Surat Keterangan Penatausahaan BMN nomor B-767/02520/PL.530/2024 tanggal 12 November 2024.
- i. Pengurangan yang berasal dari transaksi hibah keluar sebesar Rp2.515.412.840,00, dengan rincian satker sebagai berikut.
 - 1. BPS Prov. Sumatera Selatan di wilayah Sumatera Selatan senilai Rp1.567.177.840,00 yang memberikan hibah tanah seluas 4.205 m² kepada Pemkot Palembang.
 - 2. BPS Prov. Kalimantan Barat di wilayah Kalimantan Barat senilai Rp948.235.000,00 yang memberikan hibah tanah seluas 452 m² kepada Pemprov Kalimantan Barat.
- j. Pengurangan yang berasal dari transaksi transfer keluar sebesar Rp5.744.456.000,00 dengan rincian satker sebagai berikut.
 - 1. BPS Kota Batam di wilayah Kepulauan Riau melakukan transfer keluar aset Tanah senilai Rp2.677.575.000,00 kepada Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset Tanah dengan luasan 1.000 m² dan 800 m².
 - 2. BPS Prov. Kepulauan Riau di wilayah Kepulauan Riau melakukan transfer keluar aset Tanah senilai Rp591.717.000,00 kepada BPS Kab. Bintan dengan luasan aset Tanah sebesar 343 m².
 - 3. BPS Kab. Sorong di wilayah Papua Barat melakukan transfer keluar aset Tanah seluas 1.000 m² dengan nilai Rp1.194.000.000,00 kepada BPS Kota Sorong.
 - 4. BPS Kab. Majene di wilayah Sulawesi Barat melakukan transfer keluar aset Tanah seluas 1.600 m² dengan nilai Rp654.000.000,00 kepada satker Universitas Sulawesi Barat (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia)
 - 5. Settama melakukan transfer keluar tanah seluas 216 m² sebesar Rp627.164.000,00 kepada BPS Kab. Bandung.
- k. Pengurangan yang berasal dari transaksi reklasifikasi keluar sebesar Rp2.207.769.000,00 terdapat pada satker-satker berikut ini.
 - 1. BPS Kab. Karawang di wilayah Jawa Barat sebesar Rp297.360.000,00 yang merupakan reklasifikasi keluar pencatatan aset tanah yang berubah klasifikasi yang semula tanah bangunan rumah golongan I menjadi tanah bangunan kantor pemerintah dan rumah negara golongan I tipe D.



2. BPS Kab. Garut di wilayah Jawa Barat sebesar Rp410.718.000,00 yang merupakan reklasifikasi keluar pencatatan klasifikasi aset tanah untuk rumah negara golongan I menjadi tanah bangunan kantor pemerintah.
 3. BPS Kab. Ogan Komering Ulu di wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp586.927.000,00 yang merupakan reklasifikasi keluar pencatatan aset tanah bangunan rumah negara golongan I menjadi bangunan gudang tertutup permanen.
 4. BPS Kab. Lahat di wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp112.679.000,00 yang merupakan reklasifikasi keluar atas kesalahan pencatatan kode barang untuk AC Split.
 5. BPS Kab. Karo di wilayah Sumatera Utara sebesar Rp800.085.000,00 yang merupakan alih fungsi tanah milik pemerintah.
- l. Pengurangan yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan sebesar Rp7.673.876.902,00 dengan rincian satker sebagai berikut.
 1. BPS Kab. Kepulauan Mentawai di wilayah Sumatera Barat senilai Rp208.647.000,00.
 2. BPS Kab. Gunung Kidul di wilayah DI Yogyakarta senilai Rp18.791.902,00 yang merupakan koreksi pencatatan atas aset tanah yang seharusnya adalah KDP.
 3. BPS Kab. Balangan di wilayah Kalimantan Selatan Rp20.000.000,00.
 4. BPS Kab. Minahasa Selatan di wilayah Sulawesi Utara senilai Rp61.776.000,00 yang merupakan koreksi pencatatan aset tanah pada pembelian tanah perkantoran untuk seluruh komponen pembiayaan yang seharusnya adalah dicatat pada pembelian tanah dalam pengerjaan.
 5. BPS Prov. Kalimantan Barat di wilayah Kalimantan Barat senilai Rp7.364.662.000,00
 - m. Pengurangan yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang senilai Rp8.794.947,00 terdapat pada satker-satker berikut ini:
 1. BPS Kab. Bandung di wilayah Jawa Barat senilai Rp8.793.760,00 yang merupakan koreksi nilai aset tanah atas kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan pematangan lahan BPS Kab. Bandung tahun 2023 berdasarkan temuan BPK pada tahun 2024.
 2. BPS Kota Jambi di wilayah Jambi senilai Rp1.187,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset tanah.
 3. Perbedaan pencatatan dengan menggunakan menu koreksi pencatatan nilai berkurang dengan pencatatan dengan menggunakan menu koreksi pencatatan adalah jika menu koreksi pencatatan nilai berkurang hanya akan mengurangi nilai perolehan BMN. Sedangkan penggunaan menu koreksi pencatatan akan menghapus juga NUP BMN tersebut dari pencatatan.
 - n. Pengurangan yang berasal dari transaksi penghentian Aset dari penggunaan senilai Rp462.500.000,00 terdapat pada satker BPS Prov. Sumatera Barat di wilayah Sumatera



Barat. Penghentian ini disebabkan oleh aset tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan operasional normal satker.

Terdapat permasalahan pada Aset Tetap Tanah seperti tanah dalam sengketa, tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan, tanah yang dikuasai pihak lain, tanah yang dihentikan penggunaannya, pencatatan ganda, dan status Aset Tetap Tanah pinjam pakai.

Tabel 74
Rincian Permasalahan Tanah

Jenis Permasalahan	Wilayah	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)	Luasan (m ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sengketa	Jawa Timur	BPS Kab. Ponorogo	435.480.000	160
	Jambi	BPS. Kab. Tanjung Jabung Barat	236.038.000	354
	Sumatera Barat	BPS Prov. Sumatera Barat	462.500.000	200
	Papua	BPS Kab. Sarmi	277.452.000	1.000
		BPS Kab. Biak Numfor	1.290.967.000	1.153
Dikuasai Pihak Lain	Papua	BPS Kab. Jayawijaya	617.706.000	1.235
Dihentikan Dalam Penggunaan	Pusat	Settama	14.405.003.000	1.169
	Jawa Barat	BPS Kota Bekasi	473.234.000	256
	Papua	BPS Kab. Jayawijaya	617.706.000	1.235
Pencatatan Ganda	Pusat	Settama BPS	104.278.709	2.933

Rincian penjelasan permasalahan Aset Tetap Tanah tersebut disajikan secara terinci dalam Lampiran Pendukung Laporan Keuangan I berupa Catatan Atas Laporan BMN BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 pada laporan keuangan ini.

Peralatan dan Mesin **C.1.2.2 Peralatan dan Mesin**
Rp2.196.281.247.356,00

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah Rp2.196.281.247.356,00 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp2.183.257.236.943,00. Secara ringkas perubahan saldo Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut.

Tabel 75
Perubahan Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	2.196.281.247.356	2.183.257.236.943	13.024.010.413
Jumlah	2.196.281.247.356	2.183.257.236.943	13.024.010.413

Nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan adalah Rp314.976.786.679,00. Nilai Buku Peralatan dan Mesin diperoleh dengan mengurangi antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp1.881.304.460.677,00. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Perhitungan mutasi nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 (akhir)	Rp	2.196.281.247.356
Saldo per 31 Desember 2023 (awal)	Rp	2.183.257.236.943
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	13.024.010.413
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	726.160.177
Pembelian	Rp	124.720.131.856
Transfer Masuk	Rp	24.896.708.027
Reklasifikasi Masuk	Rp	13.995.033.694
Hibah Masuk	Rp	458.095.330
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp	1.575.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	35.106.816
Koreksi Susulan	Rp	3.800.000.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	3.064.362.660
Pembatalan Penghapusan	Rp	2.396.848.083
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	148.600.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	49.300.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	8.500.000
Perolehan Lainnya	Rp	3.042.530.713
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	177.342.952.356
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	(Rp)	24.896.708.027
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	13.940.893.475
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(Rp)	4.480.000
Koreksi Pencatatan	(Rp)	466.520.803
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp)	213.061.165
Penghapusan	(Rp)	59.812.577
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp)	124.737.465.896
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp)	164.318.941.943
Jumlah Rincian Mutasi	Rp	13.024.010.413

Transaksi mutasi saldo aset Peralatan dan Mesin yang berakibat penambahan dan pengurangan saldo aset Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penambahan yang berasal dari saldo awal sebesar Rp726.160.177,00. Transaksi saldo awal ini terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset PM	Nilai (Rp)
1.	Jawa Barat	Kota Bandung	A.C. Split	9.838.958
2.	Jawa Timur	Kota Madiun	Digital LED Running Text	4.600.000
3.	Sumatera Utara	Prov. Sumatera Utara	Stationary Generating Set	320.000.000
4.	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14.710.894
5.	Kalimantan Tengah	Kab. Murung Raya	A.C. Split	42.525.000
6.	Sulawesi Utara	Prov. Sulawesi Utara	Elevator /Lift	326.585.325
7.	Bengkulu	Kab. Lebong	Meja Rapat	7.900.000
Jumlah				726.160.177

- b. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi pembelian sebesar Rp124.720.131.856,00. Transaksi pembelian ini terdapat pada seluruh satker BPS

Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat dan seluruh wilayah BPS Provinsi.

- c. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi transfer masuk sebesar Rp24.896.708.027,00. Transfer masuk merupakan kegiatan pencatatan BMN yang berasal dari hasil kiriman (transfer) satker lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transaksi transfer masuk tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1.	DK Jakarta	5.997.000
2.	Jawa Barat	1.939.370.210
3.	Jawa Tengah	2.002.843.499
4.	DI Yogyakarta	861.479.300
5.	Jawa Timur	2.200.693.008
6.	Aceh	464.688.074
7.	Sumatera Utara	1.665.068.079
8.	Sumatera Barat	694.285.608
9.	Riau	327.167.000
10.	Jambi	423.010.300
11.	Sumatera Selatan	484.198.300
12.	Lampung	853.691.840
13.	Kalimantan Barat	748.626.800
14.	Kalimantan Tengah	1.366.909.330
15.	Kalimantan Selatan	1.123.513.298
16.	Kalimantan Timur	105.484.323
17.	Sulawesi Utara	761.188.880
18.	Sulawesi Selatan	801.642.900
19.	Sulawesi Tenggara	1.307.228.935
20.	Maluku	560.118.300
21.	Bali	127.550.000
22.	NTB	667.992.140
23.	NTT	704.233.480
24.	Papua	583.428.993
25.	Bengkulu	252.626.000
26.	Maluku Utara	601.298.300
27.	Banten	261.672.000
28.	Kep. Bangka Belitung	726.542.100
29.	Gorontalo	318.388.500
30.	Kep. Riau	106.525.000
31.	Papua Barat	808.227.280
32.	Sulawesi Barat	471.260.950
33.	Kalimantan Utara	569.758.300
Jumlah		24.896.708.027

- d. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi reklasifikasi masuk sebesar Rp13.995.033.694,00. Reklasifikasi masuk merupakan pencatatan perubahan BMN atas jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain. Transaksi reklasifikasi masuk tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1.	Settama BPS	88.619.404
2.	DK Jakarta	24.230.000
3.	Jawa Barat	87.900.000
4.	Jawa Tengah	168.835.000
5.	DI Yogyakarta	218.300.000
6.	Jawa Timur	1.190.688.277
7.	Aceh	589.830.000
8.	Sumatera Utara	12.929.000
9.	Sumatera Barat	4.700.000
10.	Riau	2.172.500.000
11.	Jambi	475.100.000
12.	Sumatera Selatan	30.790.999
13.	Lampung	696.499.000
14.	Kalimantan Barat	34.700.000
15.	Kalimantan Selatan	37.607.708
16.	Kalimantan Timur	180.333.250
17.	Sulawesi Utara	12.300.000
18.	Sulawesi Tengah	1.544.900.000
19.	Sulawesi Selatan	160.214.600
20.	Sulawesi Tenggara	700.000.000
21.	Maluku	84.000.000
22.	Bali	124.365.000
23.	NTB	185.133.000
24.	NTT	2.255.801.000
25.	Papua	1.403.642.064
26.	Bengkulu	13.000.000
27.	Maluku Utara	321.076.000
28.	Gorontalo	480.940.000
29.	Kep. Riau	33.000.000
30.	Papua Barat	663.099.392
Jumlah		13.995.033.694

- e. Penambahan yang berasal dari transaksi hibah masuk sebesar Rp458.095.330,00 terdapat pada satker-satker sebagai berikut:
1. BPS Kota Lubuk Linggau di wilayah Sumatera Selatan berupa Minibus (Penumpang 14 Orang ke bawah) sebanyak satu unit dari Pemkot Lubuk Linggau dengan nilai Rp211.907.000,00.
 2. BPS Kota Banjarmasin di wilayah Kalimantan Selatan berupa Minibus (Penumpang 14 Orang ke bawah) sebanyak satu unit dari Pemkot Banjarmasin dengan nilai Rp233.243.330,00.
 3. BPS Prov. Nusa Tenggara Barat di wilayah Nusa Tenggara Barat berupa A.C. Split sebanyak tiga unit senilai Rp9.600.000,00 dan Sound System sebanyak satu unit dengan nilai Rp3.345.000,00 dari perorangan.
- f. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi reklasifikasi masuk dari persediaan sebesar Rp1.575.000,00. Reklasifikasi masuk dari persediaan merupakan pencatatan perubahan BMN atas jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah

dicatat sebagai persediaan. Transaksi reklasifikasi masuk dari persediaan tersebut terdapat pada BPS Kab. Kerinci di wilayah Jambi berupa aset kursi fiber glass/plastik yang semula dicatat sebagai persediaan.

- g. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah sebesar Rp35.106.816,00. Koreksi pencatatan nilai bertambah merupakan pencatatan koreksi BMN berupa perubahan nilai suatu transaksi BMN seharusnya menjadi lebih besar daripada nilai sebelumnya, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset PM	Nilai (Rp)
1.	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu Utara	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	18.855.000
2.	Riau	Prov. Riau	Microphone/Wireless MIC	1.020.000
3.	Jambi	Kab. Kerinci	Teralis	4.625.000
4.	Kalimantan Barat	Prov. Kalimantan Barat	Rak Server	1.090.000
5.	Maluku	Kota Tual	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5.650.000
6.	NTB	Kab. Lombok Tengah	Gordyin/Kray	3.866.816
Jumlah				35.106.816

- h. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi koreksi susulan sebesar Rp3.800.000.000,00. Koreksi susulan merupakan pencatatan koreksi BMN dari hasil pemeriksaan BPK. Transaksi koreksi susulan tersebut terdapat pada satker Settama BPS berupa koreksi pencatatan nilai aset server.

- i. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp3.064.362.660,00. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif merupakan pencatatan BMN yang dipergunakan kembali setelah sebelumnya dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dikarenakan perubahan kondisi yang kemudian mendapatkan perbaikan. Transaksi penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1.	DK Jakarta	14.057.828
2.	Jawa Barat	17.475.000
3.	Jawa Tengah	230.797.047
4.	Jawa Timur	365.233.250
5.	Aceh	35.011.000
6.	Sumatera Barat	702.908.954
7.	Riau	239.900.520
8.	Jambi	84.343.678
9.	Sumatera Selatan	79.483.814
10.	Lampung	566.680.130
11.	Kalimantan Barat	229.824.774
12.	Kalimantan Timur	2.959.000
13.	Sulawesi Utara	4.730.000
14.	Sulawesi Tengah	16.250.000

15.	Sulawesi Selatan	189.066.073
16.	Bali	15.411.143
17.	NTB	1.477.375
18.	NTT	39.226.000
19.	Bengkulu	45.440.378
20.	Maluku Utara	8.550.000
21.	Banten	31.058.000
22.	Gorontalo	107.338.852
23.	Kep. Riau	1.650.000
24.	Sulawesi Barat	35.489.844
Jumlah		3.064.362.660

- j. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi pembatalan penghapusan sebesar Rp2.396.848.083,00. Pembatalan penghapusan merupakan pencatatan BMN untuk pembatalan transaksi penghapusan kepada pengguna barang. Transaksi pembatalan penghapusan tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1.	Settama BPS	235.776.524
2.	Jawa Tengah	115.800.700
3.	DI Yogyakarta	640.975.464
4.	Kalimantan Barat	237.474.419
5.	Bali	136.661.300
6.	NTB	309.382.887
7.	NTT	401.285.449
8.	Bengkulu	38.348.750
9.	Papua Barat	4.572.688
10.	Sulawesi Barat	276.569.902
Jumlah		2.396.848.083

- k. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp148.600.000,00. Penyelesaian pembangunan dengan KDP merupakan pencatatan perolehan BMN yang berasal dari aset yang telah selesai proses pembangunan melalui mekanisme KDP (telah selesai 100 persen pekerjaan fisiknya). Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP tersebut terdapat pada satker Pusdiklat BPS yaitu berupa aset Laptop.
- l. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi penyelesaian pembangunan langsung sebesar Rp49.300.000,00. Penyelesaian pembangunan langsung merupakan pencatatan perolehan BMN yang berasal dari pengadaan pembangunan dengan menggunakan metode pembayaran sekaligus 100 persen. Transaksi penyelesaian pembangunan langsung tersebut terdapat pada satker BPS Kab. Katingan di wilayah Kalimantan Tengah yaitu berupa aset Penangkal Petir.
- m. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi pengembangan nilai aset (langsung) sebesar Rp8.500.000,00. Pengembangan nilai aset (langsung) merupakan pencatatan hasil pengembangan atas suatu BMN yang sudah dimiliki (sudah tercatat) sampai dengan tahun anggaran berjalan. Transaksi pengembangan nilai aset (langsung) tersebut terdapat pada satker Settama BPS yaitu berupa aset meja kayu, sice, dan meja rapat.

- n. Penambahan mutasi yang berasal dari transaksi perolehan lainnya sebesar Rp3.042.530.713,00. Transaksi perolehan lainnya tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1.	Settama BPS	152.810.164
2.	Pusdiklat BPS	228.523.000
3.	Polstat STIS	1.886.974.000
4.	DK Jakarta	227.100.000
5.	DI Yogyakarta	218.300.000
6.	Jawa Timur	4.095.000
7.	Sumatera Utara	56.392.750
8.	Sumatera Barat	26.030.000
9.	Kalimantan Selatan	15.984.000
10.	Sulawesi Utara	88.164.099
11.	Papua	31.157.700
12.	Kalimantan Utara	107.000.000
Jumlah		3.042.530.713

- o. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi transfer keluar sebesar Rp24.896.708.027,00. Transfer keluar merupakan kegiatan pencatatan BMN yang dikirim (transfer) ke satker lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transaksi transfer keluar tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1.	DK Jakarta	5.997.000
2.	Jawa Barat	1.939.370.210
3.	Jawa Tengah	2.002.843.499
4.	DI Yogyakarta	861.479.300
5.	Jawa Timur	2.200.693.008
6.	Aceh	464.688.074
7.	Sumatera Utara	1.665.068.079
8.	Sumatera Barat	694.285.608
9.	Riau	327.167.000
10.	Jambi	423.010.300
11.	Sumatera Selatan	484.198.300
12.	Lampung	853.691.840
13.	Kalimantan Barat	748.626.800
14.	Kalimantan Tengah	1.366.909.330
15.	Kalimantan Selatan	1.123.513.298
16.	Kalimantan Timur	105.484.323
17.	Sulawesi Utara	761.188.880
18.	Sulawesi Selatan	801.642.900
19.	Sulawesi Tenggara	1.307.228.935
20.	Maluku	560.118.300
21.	Bali	127.550.000
22.	NTB	667.992.140
23.	NTT	704.233.480
24.	Papua	583.428.993
25.	Bengkulu	252.626.000
26.	Maluku Utara	601.298.300

27.	Banten	261.672.000
28.	Kep. Bangka Belitung	726.542.100
29.	Gorontalo	318.388.500
30.	Kep. Riau	106.525.000
31.	Papua Barat	808.227.280
32.	Sulawesi Barat	471.260.950
33.	Kalimantan Utara	569.758.300
Jumlah		24.896.708.027

- p. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi reklasifikasi keluar sebesar Rp13.940.893.475,00. Reklasifikasi keluar merupakan pencatatan penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi BMN pada pencatatan sebelumnya. Transaksi reklasifikasi keluar tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1.	Settama BPS	88.619.404
2.	DK Jakarta	24.230.000
3.	Jawa Barat	87.900.000
4.	Jawa Tengah	168.835.000
5.	DI Yogyakarta	218.300.000
6.	Jawa Timur	1.190.688.277
7.	Aceh	589.830.000
8.	Sumatera Utara	71.929.000
9.	Riau	2.172.500.000
10.	Jambi	405.200.000
11.	Sumatera Selatan	30.790.999
12.	Lampung	696.499.000
13.	Kalimantan Barat	34.700.000
14.	Kalimantan Selatan	37.607.708
15.	Kalimantan Timur	180.333.250
16.	Sulawesi Utara	12.300.000
17.	Sulawesi Tengah	1.544.900.000
18.	Sulawesi Selatan	160.214.600
19.	Sulawesi Tenggara	700.000.000
20.	Maluku	84.000.000
21.	Bali	124.365.000
22.	NTB	185.133.000
23.	NTT	2.255.801.000
24.	Papua	1.390.096.845
25.	Bengkulu	13.000.000
26.	Maluku Utara	321.076.000
27.	Gorontalo	480.940.000
28.	Kep. Riau	33.000.000
29.	Papua Barat	638.104.392
Jumlah		13.940.893.475

- q. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi reklasifikasi keluar ke persediaan sebesar Rp4.480.000,00. Reklasifikasi keluar ke persediaan merupakan pencatatan perubahan aset berupa persediaan yang sebelumnya telah dicatat sebagai BMN. Transaksi reklasifikasi keluar ke persediaan tersebut terdapat pada BPS Kab. Lombok

Utara di wilayah NTB berupa aset karpet yang kemudian dicatat sebagai persediaan.

- r. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan sebesar Rp466.520.803,00. Koreksi pencatatan merupakan pencatatan penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan kuantitas BMN pada pencatatan sebelumnya. Transaksi koreksi pencatatan tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1.	Settama BPS	155.810.164
2.	DK Jakarta	21.600.000
3.	Jawa Tengah	33.078.000
4.	DI Yogyakarta	63.900.000
5.	Sumatera Utara	18.855.000
6.	Riau	14.710.894
7.	Sumatera Selatan	1.074.945
8.	Kalimantan Barat	1.090.000
9.	Kalimantan Tengah	49.300.000
10.	Sulawesi Utara	4.550.000
11.	Sulawesi Tenggara	38.551.800
12.	NTT	10.000.000
13.	Papua Barat	54.000.000
Jumlah		466.520.803

- s. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp213.061.165,00. Koreksi pencatatan nilai berkurang merupakan pencatatan koreksi BMN berupa perubahan nilai suatu transaksi BMN seharusnya menjadi lebih kecil daripada nilai sebelumnya, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah tersebut terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset PM	Nilai (Rp)
1.	BPS Pusat	Settama BPS	Rak Besi	17.970.634
			Meja Resepsionis	2.774.965
2.	Jawa Tengah	Kota Semarang	Station Wagon	21.129.750
3.	DI Yogyakarta	Prov. DI Yogyakarta	Stationary Generating Set	679.875
		Kab. Gunung Kidul	Kursi Besi/Metal	154.400.000
4.	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	Tiang Bendera	250.000
5.	Sumatera Barat	Kab. Kep. Mentawai	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	499.950
6.	Jambi	Kab. Kerinci	Kursi Fiber Glass/Plastik	1.575.000
7.	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	A.C. Split	15.045
		Kab. Seruyan	A.C. Split	43.784
		Kab. Barito Timur	A.C. Split	15.045
		Kab. Murung Raya	A.C. Split	15.045
8.	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kep.	A.C. Split	142.072
9.	Maluku	Kota Tual	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5.650.000
10.	Bengkulu	Kab. Lebong	Meja Rapat	7.900.000
Jumlah				213.061.165

- t. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi penghapusan sebesar Rp59.812.577,00. Penghapusan BMN merupakan pencatatan penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang. Transaksi penghapusan BMN tersebut terdapat pada satker BPS Prov. Sumatera Barat di wilayah Sumatera Barat untuk aset stabilisator, PC Unit, UPS, dan Laptop.
- u. Pengurangan mutasi yang berasal dari transaksi penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp124.737.465.896,00. Penghentian aset dari penggunaan merupakan pencatatan penghentian BMN sebelum dilakukan proses penghapusan BMN, karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasional normal satker yang bersangkutan. Transaksi penghentian aset dari penggunaan tersebut secara rinci berdasarkan wilayah terdapat pada:

No.	Wilayah/Satker	Nilai (Rp)
1.	Pusdiklat BPS	1.272.136.655
2.	DK Jakarta	2.233.929.136
3.	Jawa Barat	7.124.506.878
4.	Jawa Tengah	9.580.622.257
5.	DI Yogyakarta	3.346.210.592
6.	Jawa Timur	7.872.460.237
7.	Aceh	4.839.814.677
8.	Sumatera Utara	5.130.887.265
9.	Sumatera Barat	3.357.338.362
10.	Riau	2.186.324.019
11.	Jambi	7.326.012.463
12.	Sumatera Selatan	4.554.003.301
13.	Lampung	5.896.524.487
14.	Kalimantan Barat	4.252.085.719
15.	Kalimantan Tengah	796.631.496
16.	Kalimantan Selatan	3.666.560.151
17.	Kalimantan Timur	1.248.752.510
18.	Sulawesi Utara	3.824.741.746
19.	Sulawesi Tengah	4.022.455.137
20.	Sulawesi Selatan	9.213.042.624
21.	Sulawesi Tenggara	1.781.415.805
22.	Maluku	1.386.742.029
23.	Bali	1.512.971.943
24.	NTB	3.258.690.881
25.	NTT	4.604.081.996
26.	Papua	2.214.316.411
27.	Bengkulu	3.389.589.348
28.	Maluku Utara	4.136.311.349
29.	Banten	2.298.441.646
30.	Kep. Bangka Belitung	1.852.928.105
31.	Gorontalo	1.873.645.134
32.	Kep. Riau	756.141.037
33.	Papua Barat	1.500.529.689
34.	Sulawesi Barat	925.420.423
35.	Kalimantan Utara	1.501.200.388
Jumlah		124.737.465.896

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp30.662.668.364,00. Rincian Peralatan dan Mesin yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Rincian kondisi barang untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersaji dalam Laporan Kondisi Barang yang merupakan lampiran pada laporan keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp2.089.954.257.109,00

C.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah Rp2.089.954.257.109,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2023 adalah Rp2.030.816.486.155,00. Secara ringkas perubahan saldo Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Tabel 76
Perubahan Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Gedung dan Bangunan	2.089.954.257.109	2.030.816.486.155	59.137.770.954
Jumlah	2.089.954.257.109	2.030.816.486.155	59.137.770.954

Nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah Rp1.648.469.525.524,00. Nilai Buku Gedung dan Bangunan diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp441.484.731.585,00.

Perhitungan mutasi nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 (akhir)	Rp	2.089.954.257.109
Saldo per 31 Desember 2023 (awal)	Rp	2.030.816.486.155
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	59.137.770.954

Rincian Mutasi

Mutasi Tambah

Saldo Awal	Rp	224.404.000.000
Pembelian	Rp	2.440.449.300
Hibah Masuk	Rp	1.687.038.874
Transfer Masuk	Rp	1.401.018.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	12.670.060.668
Pengembangan Melalui KDP	Rp	9.604.017.530
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	46.167.670.270
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	3.213.640.514
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	191.382.000
Koreksi Susulan	Rp	654.617.166
Perolehan Lainnya	Rp	437.507.469
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	Rp	1.487.188.000

penggunaan aktif		
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	5.732.481.235
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	310.091.071.026
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	(Rp	1.952.696.000)
Hibah Keluar	(Rp	993.534.291)
Reklasifikasi Keluar	(Rp	12.659.393.018)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp	6.591.020.042)
Koreksi Pencatatan	(Rp	2.398.012.382)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp	226.358.644.339)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	250.953.300.072)
Jumlah Rincian Mutasi	Rp	59.137.770.954

Transaksi penambahan dan pengurangan mutasi Gedung dan Bangunan yang berasal dari transaksi antar entitas seperti transfer dan hibah beserta kategori aset Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut:

- a. Penambahan yang berasal dari transaksi hibah masuk senilai Rp1.687.038.874,00 dengan uraian sebagai berikut:
 1. BPS Kota Lubuk Linggau di wilayah Sumatera Selatan menerima hibah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp947.834.944,00 dari Pemkot Lubuk Linggau.
 2. BPS Kab. Bolaang Mongondow di wilayah Sulawesi Utara menerima hibah berupa Gedung Tempat Ibadah Permanen senilai Rp25.438.930,00 dari perorangan.
 3. BPS Prov. Nusa Tenggara Barat di wilayah Nusa Tenggara Barat menerima hibah berupa Gedung Tempat Ibadah Permanen senilai Rp580.000.000,00 dari perorangan.
 4. BPS Kab. Kapahiang di wilayah Bengkulu menerima hibah berupa Gedung Tempat Ibadah Permanen senilai Rp70.750.000,00 dari perorangan.
 5. BPS Kota Padang di wilayah Sumatera Barat menerima hibah berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen Senilai Rp63.015.000,00 dari perorangan.
- b. Penambahan yang berasal dari transfer masuk senilai Rp1.401.018.000,00 yang terdapat pada satker BPS Kab. Sorong di wilayah Papua Barat berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp754.698.000,00 Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen senilai Rp50.783.000 dan Parkir Permanen senilai Rp595.537.000,00 dari BPS Kota Sorong.
- c. Penambahan yang berasal dari transaksi reklasifikasi masuk senilai Rp12.670.060.668,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset GB	Nilai (Rp)
1.	Jawa Barat	Kab. Karawang	Bangunan Gedung Arsip Permanen	186.365.000
		Kab. Garut	Bangunan Gedung Arsip Permanen	193.900.000
2.	Aceh	Kota Lhokseumawe	Bangunan Gedung Arsip Permanen	1.002.840.000
3.	Sumatera Utara	Kab. Karo	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	599.380.000
		Kab. Labuhan Batu	Bangunan Gudang Tertutup	410.120.000

			Permanen	
		Kab. Pakpak Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	59.000.000
		Kab. Agam	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	208.093.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat	Bangunan Lainnya	21.567.650
4.	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	164.767.000
		Kab. Musi Banyuasin	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	205.452.000
		Kab. OKI	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	186.506.000
		Kab. OKU	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	313.211.000
			Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	113.820.000
		Kab. Lahat	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	147.816.000
			Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	157.235.000
		Kota Pagar Alam	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	149.722.000
		Kab. OKU Selatan	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	153.709.000
		Kab. Ogan Ilir	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	146.932.000
		Kab. Banyuasin	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	295.484.000
		Kab. OKU Timur	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	148.331.000
5.	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.763.214.509
			Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2.763.214.509
6.	Papua	Kab. Puncak Jaya	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.568.386.000
			Rumah Negara Golongan I Tipe C Semi Permanen	710.995.000
Jumlah				12.670.060.668

- d. Penambahan yang berasal dari koreksi susulan senilai Rp654.617.166,00. Rincian transaksi tersebut diuraikan sebagai berikut.

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset GB	Nilai (Rp)
1.	BPS Pusat	Settama BPS	Bangunan Gedung Kantor Permanen	(176.136.888)
2.	Jawa Timur	Prov. Jawa Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	188.700.000
3.	Sumatera Barat	Kab. Agam	Bangunan Gedung Kantor Permanen	155.465.000
4.	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	Bangunan Gedung Kantor Permanen	57.439.000
5.	Papua	Prov. Papua	Bangunan Gedung Kantor Permanen	350.340.054
		Kab. Mappi	Bangunan Gedung Kantor Permanen	78.810.000
Jumlah				654.617.166

- e. Penambahan yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah sebesar Rp5.732.481.235,00. Rincian transaksi tersebut diuraikan sebagai berikut.

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset GB	Nilai (Rp)
1.	Jawa Barat	Kab. Cianjur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	18.470.400
2.	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	188.459.100
		Kab. Wonosobo	Bangunan Gedung Kantor Permanen	33.078.000
3.	Jawa Timur	Kab. Blitar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.160.097.729
4.	Sumatera Utara	Kab. Pakpak Barat	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	13.675.200
			Bangunan Gedung Kantor Permanen	45.324.800
5.	Sumatera Selatan	Kab. OKU Selatan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	20.000.000
6.	Kalimantan Barat	Prov. Kalimantan Barat	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	373.980.999
7.	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49.300.000
8.	Sulawesi Tengah	Prov. Sulawesi Tengah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	204.903.000
9.	NTB	Kab. Lombok Tengah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	24.854.500
10.	Papua	Kab. Keerom	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	159.952.000
			Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	39.988.000
		Kab. Supiori	Bangunan Gedung Kantor Permanen	180.455.000
			Pagar Permanen	998.672.000
11.	Kep. Babel	Prov. Kep. Babel	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	66.168.416
12.	Gorontalo	Prov. Gorontalo	Bangunan Gedung Kantor Permanen	92.201.000
13.	Kep. Riau	Prov. Kep. Riau	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8.901.090
14.	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	Bangunan Gedung Kantor Permanen	54.000.000
Jumlah				5.732.481.234

f. Pengurangan yang berasal dari transaksi hibah keluar senilai Rp993.534.291,00 dengan rincian satker sebagai berikut.

1. BPS Kab. Trenggalek di wilayah Jawa Timur melakukan hibah keluar berupa aset Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp386.274.000,00 kepada Pemkab Trenggalek.
2. BPS Prov. Kalimantan Barat di wilayah Kalimantan Barat melakukan hibah keluar berupa aset Pagar Permanen senilai Rp258.264.291,00 dan berupa aset Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen senilai Rp348.996.000,00 kepada Pemprov Kalimantan Barat.

g. Pengurangan yang berasal dari transaksi transfer keluar senilai Rp1.952.696.000,00 dengan rincian satker sebagai berikut.

1. BPS Kota Batam di wilayah Kep. Riau melakukan transfer keluar berupa aset Pagar

Permanen senilai Rp56.592.000,00 kepada Kementerian Keuangan.

2. BPS Prov. Kepulauan Riau di wilayah Kep. Riau melakukan transfer keluar berupa aset Bangunan Gedung Kantor Lainnya senilai Rp150.090.000,00 kepada Kementerian Keuangan.
 3. BPS Kota Sorong di wilayah Papua Barat melakukan transfer keluar berupa aset Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp754.698.000,00, Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen senilai Rp50.783.000,00, dan Parkir Permanen senilai Rp595.537.000,00 kepada BPS Kab. Sorong di wilayah Papua Barat.
 4. BPS Kab. Majene di wilayah Sulawesi Barat melakukan transfer keluar berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen senilai Rp267.734.000,00 dan pagar permanen senilai Rp82.262.000,00 kepada satker Universitas Sulawesi Barat (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia).
- h. Pengurangan yang berupa transaksi reklasifikasi keluar senilai Rp12.659.393.018,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset GB	Nilai (Rp)
1.	Jawa Barat	Kab. Karawang	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	186.365.000
		Kab. Garut	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	193.900.000
2.	Aceh	Kota Lhokseumawe	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.002.840.000
3.	Sumatera Utara	Kab. Karo	Bangunan Gedung Kantor Permanen	599.380.000
		Kab. Labuhan Batu	Bangunan Gedung Kantor Permanen	410.120.000
4.	Sumatera Selatan	Kab. Agam	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	208.093.000
		Kab. Kerinci	Bangunan Gedung Kantor Permanen	69.900.000
		Kota Palembang	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	164.767.000
		Kab. Musi Banyuasin	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	205.452.000
		Kab. OKI	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	186.506.000
		Kab. OKU	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	427.031.000
		Kab. Lahat	Rumah Negara Golongan I Tipe D Semi Permanen	147.816.000
			Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	157.235.000
		Kota Pagar Alam	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	149.722.000
		Kab. OKU Selatan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	153.709.000
		Kab. Ogan Ilir	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	146.932.000
		Kab. Banyuasin	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	295.484.000
		Kab. OKU Timur	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	148.331.000
5.	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2.763.214.509
			Bangunan Gedung Kantor	2.763.214.509

			Permanen	
6.	Papua	Kab. Puncak Jaya	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.568.386.000
			Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	710.995.000
Jumlah				12.659.393.018

- i. Pengurangan yang berupa transaksi penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp6.591.020.042,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset GB	Nilai (Rp)
1.	Jawa Tengah	Kab. Sragen	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	584.996.000
2.	Jawa Timur	Kab. Blitar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.100.711.042
3.	Jambi	Kab. Kerinci	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	48.028.000
4.	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Pagar Permanen	8.923.000
5.	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kep.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	906.950.000
6.	Sulawesi Selatan	Prov. Sulawesi Selatan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	13.873.000
7.	Papua	Peg. Jayawijaya	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	950.721.000
			Bangunan Gedung Kantor Permanen	976.818.000
Jumlah				6.591.020.042

- j. Pengurangan yang berupa transaksi koreksi pencatatan sebesar Rp2.398.012.382,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset GB	Nilai (Rp)
1.	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	188.459.100
2.	DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Bangunan Gedung Kantor Permanen	297.681.282
3.	Jawa Timur	Prov. Jawa Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	188.700.000
4.	Sumatera Utara	Kab. Pakpak Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	59.000.000
5.	Sumatera Barat	Kab. Agam	Bangunan Gedung Kantor Permanen	155.465.000
6.	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	Bangunan Gedung Kantor Permanen	57.439.000
7.	Papua	Kab. Keerom	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	199.940.000
		Kab. Supiori	Bangunan Gedung Kantor Permanen	160.455.000
			Pagar Permanen	998.672.000
8.	Gorontalo	Prov. Gorontalo	Bangunan Gedung Kantor Permanen	92.201.000
Jumlah				2.398.012.382

- k. Pengurangan yang berasal dari transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang senilai Rp226.358.644.339,00 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset GB	Nilai (Rp)
1.	BPS Pusat	Settama BPS	Bangunan Gedung Kantor	30.779.597

			Permanen	
2.	Jawa Barat	Kota Bandung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9.838.958
		Kab. Ciamis	Bangunan Gedung Kantor Permanen	437.507.469
3.	Jawa Tengah	Kab. Kudus	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	588.076.540
4.	DI Yogyakarta	Prov. DI Yogyakarta	Bangunan Gedung Kantor Permanen	264.080
		Kab. Gunung Kidul	Bangunan Gedung Kantor Permanen	87.000
5.	Jawa Timur	Prov. Jawa Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.485.790
		Kab. Blitar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	47.433.650
6.	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	48.584.604
7.	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	192.000.000
		Kab. Ogan Ilir	Bangunan Gedung Kantor Permanen	79.180.000
8.	Kalimantan Tengah	Kab. Murung Raya	Bangunan Gedung Kantor Permanen	42.525.000
9.	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	114.597.474
		Prov. Sulawesi Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	326.585.325
10.	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	Bangunan Gedung Kantor Permanen	25.279.935
11.	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	60.000.000
12.	Banten	Kota Cilegon	Bangunan Gedung Kantor Permanen	654.501
13.	Kep. Babel	Prov. Kep. Bangka Belitung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	66.168.416
14.	Sulawesi Barat	Prov. Sulawesi Barat	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	224.179.596.000
15.	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	107.000.000
Jumlah				226.358.644.339

Transaksi pembelian pada mutasi Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.440.449.300,00. Rincian pembelian pada mutasi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Tabel 77
Rincian Pembelian Aset Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah

No.	Wilayah	Satker BPS	Nama Aset	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	188.459.100
		Kab. Kudus	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	922.000.000
2	DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Bangunan Gedung Kantor Permanen	297.681.282
3	Jawa Timur	Kab. Blitar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	85.115.799
4	Aceh	Kab. Aceh Timur	Bangunan Lainnya	49.401.319
			Gedung Pos Jaga Permanen	34.900.000
5	Sumatera Barat	Kab. Agam	Bangunan Gedung Kantor Permanen	155.465.000
6	Kalimantan	Kab. Kotawaringin Timur	Pagar Permanen	85.200.000

	Tengah			
7	Kalimantan Selatan	Prov. Kalimantan Selatan	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	444.836.800
8	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	Bangunan Gedung Kantor Permanen	57.439.000
9	Gorontalo	Prov. Gorontalo	Bangunan Gedung Kantor Permanen	92.201.000
10	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	Bangunan Rumah Genset	27.750.000
Jumlah				2.440.449.300

Transaksi pengembangan melalui KDP pada mutasi Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp9.604.017.530,00. Rincian pengembangan melalui KDP pada mutasi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Tabel 78
Rincian Pengembangan Melalui KDP Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah

No.	Wilayah	Satker BPS	Nama Aset	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jawa Barat	Kota Depok	Bangunan Gedung Kantor Permanen	196.000.000
		Kab. Banjar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	166.100.000
2	Jawa Tengah	Prov. Jawa Tengah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	197.157.421
3	DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.417.921.102
4	Jawa Timur	Prov. Jawa Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	342.836.350
5	Sumatera Barat	Kab. Agam	Bangunan Gedung Kantor Permanen	111.998.000
6	Jambi	Prov. Jambi	Bangunan Gedung Kantor Permanen	198.737.480
7	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	Bangunan Gedung Kantor Permanen	107.449.000
		Kab. OKU Selatan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	102.700.000
		Kab. Lahat	Pagar Permanen	196.439.400
8	Kalimantan Barat	Prov Kalimantan Barat	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	79.837.494
9	Sulawesi Tenggara	Kab. Kendari	Bangunan Gedung Kantor Permanen	828.003.000
		Kab. Buton Utara	Bangunan Terbuka Lainnya	109.750.000
10	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.846.719.514
11	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	25.320.000
12	Papua	Prov. Papua	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.124.822.969
13	Bengkulu	Kota Bengkulu	Pagar Permanen	249.795.000
14	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	620.077.950
15	Sulawesi Barat	Prov. Sulawesi Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	129.766.000
16	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	199.496.850
		Kab. Tana Tidung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	353.090.000
Jumlah				9.604.017.530

Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP pada mutasi Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp46.167.670.270,00. Rincian penyelesaian pembangunan dengan KDP pada mutasi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Tabel 79
Rincian Penyelesaian Pembangunan dengan KDP
Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah

No.	Wilayah	Satker BPS	Nama Aset	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jawa Barat	Kab. Ciamis	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.049.390.399
		Kota Banjar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.738.015.324
2	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	37.657.900
3	Jawa Timur	Kab. Blitar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.100.711.042
4	Aceh	Kab. Aceh Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.875.033.250
5	Sumatera Barat	Kab. Agam	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.475.136.928
6	Sumatera Selatan	Kab. OKU Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.918.935.305
7	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.300.024.044
8	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.523.798.648
9	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.763.214.509
		Mongondow Timur	Pagar Permanen	224.119.070
10	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.275.556.000
11	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.542.671.748
12	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	Pagar Permanen	121.340.800
			Taman Permanen	130.650.300
13	Papua	Kab. Peg. Jayawijaya	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5.777.960.061
14	Banten	Kota Cilegon	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.034.076.256
15	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.279.378.686
Jumlah				46.167.670.270

Transaksi pengembangan nilai aset (langsung) pada mutasi Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.213.640.514,00. Rincian pengembangan nilai aset (langsung) pada mutasi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Tabel 80
Rincian Penyelesaian Nilai Aset (Langsung)
Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah

No.	Wilayah	Satker BPS	Nama Aset	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BPS Pusat	Settama	Bangunan Gedung Kantor Permanen	812.340.207
2	Pusdiklat BPS	Pusdiklat BPS	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	77.288.051
3	DKI Jakarta	Prov. DK Jakarta	Bangunan Gedung Kantor Permanen	170.787.930
		Kota Jakarta Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	151.932.225
4	Jawa Barat	Kab. Sumedang	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49.985.143
		Kab. Tasikmalaya	Bangunan Gedung Kantor Permanen	112.300.000
		Kota Bogor	Bangunan Gedung Kantor Permanen	33.250.000
		Kab. Cianjur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	151.980.000
		Kota Cimahi	Bangunan Gedung Kantor Permanen	197.984.000
5	Jawa Tengah	Kota Magelang	Bangunan Gedung Kantor Permanen	61.700.000
		Kab. Temanggung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	87.062.000

No.	Wilayah	Satker BPS	Nama Aset	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	DI Yogyakarta	Prov. DI Yogyakarta	Bangunan Gedung Kantor Permanen	45.846.330
		Kab. Bantul	Bangunan Gedung Kantor Permanen	27.100.000
7	Jawa Timur	Kota Malang	Bangunan Gedung Kantor Permanen	30.000.000
		Kab. Madiun	Bangunan Gedung Kantor Permanen	48.488.000
8	Sumatera Barat	Prov. Sumatera Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	141.240.000
9	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	112.100.000
10	Kalimantan Timur	Prov. Kalimantan Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	151.614.900
		Kab. Penajem Paser Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133.847.000
11	Sulawesi Tengah	Kota Palu	Bangunan Gedung Kantor Permanen	139.642.000
12	Maluku	Kab. Buru	Bangunan Gedung Kantor Permanen	138.200.000
13	Bali	Prov. Bali	Bangunan Gedung Kantor Permanen	25.010.000
14	Banten	Kab. Tangerang	Bangunan Gedung Kantor Permanen	62.348.700
		Kota Tangerang	Bangunan Gedung Kantor Permanen	37.482.000
15	Kep. Bangka Belitung	Prov. Kep. Bangka Belitung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	104.450.000
16	Kep. Riau	Prov. Kep. Riau	Bangunan Gedung Kantor Permanen	109.662.028
Jumlah				3.213.640.514

Transaksi penyelesaian Pembangunan langsung pada mutasi Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp191.382.000,00 dalam bentuk Bangunan Gedung Kantor Permanen terdapat pada satker BPS Kota Makkasar di Sulawesi Selatan.

Transaksi perolehan lainnya pada mutasi Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp437.507.469,00 dalam bentuk Gedung Pos Jaga Permanen senilai Rp119.277.823,00 dan Pagar Permanen senilai Rp318.229.646,00 terdapat pada satker BPS Kabupaten Ciamis di Jawa Barat.

Transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada mutasi Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.487.188.000,00. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif merupakan pemanfaatan BMN yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lagi digunakan secara aktif untuk tugas dan fungsi lembaga. BMN yang berupa Rumah Negara yang semula dinonaktifkan kemudian akan dimanfaatkan kembali sebagai rumah dinas pejabat di BPS. Rincian transaksi penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada mutasi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut:

Tabel 81
Rincian Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif
Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah

No.	Wilayah/Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Settama BPS	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1.304.120.000
2	Jawa Timur	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	64.240.000
3	Jambi	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	48.028.000
4	Papua	Rumah Negara Golongan I Tipe C Semi Permanen	70.800.000
Jumlah			1.487.188.000

Selain nilai Gedung dan Bangunan tersebut di atas, terdapat Gedung dan Bangunan yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp1.657.723.394,00. Rincian Gedung dan Bangunan yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Rincian kondisi barang untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersaji dalam Laporan Kondisi Barang yang merupakan lampiran pada laporan keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya **C.1.2.4 Aset Tetap Lainnya**
Rp35.254.629.078,00

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp35.254.629.078,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2023 adalah Rp38.217.040.150,00. Adapun aset pada BPS yang masuk pada kelompok Aset Tetap Lainnya adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 82
Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	Keterangan	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aset Tetap Dalam Renovasi	837.000.000	837.000.000	0
2	Aset Tetap Lainnya:			
	a. Bahan perpustakaan	34.126.009.368	37.135.938.440	(3.009.929.072)
	b. Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga	291.619.710	244.101.710	47.518.000
Jumlah		35.254.629.078	38.217.040.150	(2.962.411.072)

Aset Tetap Dalam Renovasi menurut Buletin Teknis Nomor 15 mengenai Akuntansi Aset Tetap Akrual merupakan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki oleh BPS berupa Aset Tetap Tanah pada BPS Kab. Sarmi sebesar Rp837.000.000,00. Aset Tanah tersebut masih dalam kepemilikan Pemda Sarmi dan belum diserahkan kepada BPS Kab. Sarmi.

Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah Rp35.007.142.368,00. Nilai Buku Aset Tetap Lainnya diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp247.486.710,00. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Mutasi perubahan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024 (akhir)	Rp	35.254.629.078
Saldo per 31 Desember 2023 (awal)	Rp	38.217.040.150
Mutasi Tambah/(Kurang)	(Rp)	2.962.411.072)
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	31.080.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	317.000
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp	382.118.696
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	87.383.812
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	500.899.508
Mutasi Kurang		
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	317.000
Penghapusan	(Rp)	6.028.950
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp)	3.430.027.084
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(Rp)	26.937.546
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp)	3.463.310.580
Jumlah Rincian Mutasi	(Rp)	2.962.411.072)

Penjelasan mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya diuraikan sebagai berikut.

- Mutasi tambah berupa pembelian sebesar Rp31.080.000,00 terdapat pada satker Settama BPS yaitu pembelian lukisan cat minyak.
- Mutasi tambah berupa reklasifikasi masuk sebesar Rp317.000,00 terdapat pada satker BPS Kab. Gianyar di wilayah Bali yaitu adanya perubahan kode barang berupa publikasi yaitu berkode 6010102999 (serial lainnya) yang semula adalah berkode 6010101999 (buku lainnya).
- Mutasi tambah berupa reklasifikasi masuk dari persediaan sebesar Rp382.118.696,00 yaitu perubahan jenis aset dari persediaan yang menjadi aset tetap lainnya. Rincian wilayah dan aset tetap lainnya yang awalnya berupa persediaan diuraikan sebagai berikut.

No.	Wilayah	Aset ATL				Nilai (Rp)
		Buku Lainnya	Laporan	Monografi	Serial Lainnya	
1.	DK Jakarta	0	0	0	6.812.400	6.812.400
2.	Jawa Barat	0	0	0	7.995.570	7.995.570
3.	DI Yogyakarta	0	0	0	2.591.725	2.591.725
4.	Jawa Timur	5.309.000	0	0	23.017.145	28.326.145
5.	Aceh	0	0	0	6.778.093	6.778.093
6.	Sumatera Utara	6.783.150	0	5.640.000	26.635.950	39.059.100
7.	Sumatera Barat	0	7.971.300	0	22.991.560	30.962.860

8.	Riau	13.547.220	0	0	0	13.547.220
9.	Jambi	3.547.000	0	0	0	3.547.000
10.	Sumatera Selatan	794.750	0	0	12.708.034	13.502.784
11.	Lampung	0	0	0	57.258.978	57.258.978
12.	Kalimantan Barat	0	0	0	22.694.520	22.694.520
13.	Kalimantan Tengah	0	0	0	6.925.800	6.925.800
14.	Kalimantan Selatan	0	0	0	31.966.924	31.966.924
15.	Kalimantan Timur	0	0	0	19.491.165	19.491.165
16.	Sulawesi Utara	0	0	0	19.229.850	19.229.850
17.	Sulawesi Tengah	2.038.858	0	0	12.278.000	14.316.858
18.	Sulawesi Selatan	0	0	0	4.408.975	4.408.975
19.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	4.624.750	4.624.750
20.	Maluku	0	0	0	23.810.570	23.810.570
21.	Maluku Utara	0	0	0	8.673.409	8.673.409
22.	Banten	0	0	0	1.612.000	1.612.000
23.	Kep. Babel	0	1.206.000	0	0	1.206.000
24.	Kep. Riau	0	0	0	1.026.000	1.026.000
25.	Papua Barat	0	0	0	11.750.000	11.750.000
Jumlah						382.118.696

- d. Mutasi tambah berupa penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp87.383.812,00. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif yaitu dengan memanfaatkan BMN yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lagi digunakan secara aktif untuk tugas dan fungsi lembaga, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset ATL	Nilai (Rp)
1.	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	Serial Lainnya	45.000
2.	Jambi	Prov. Jambi	Buku Lainnya	46.604.208
3.	NTT	Kab. Sumba Barat Daya	Serial Lainnya	4.559.115
4.	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	Serial Lainnya	36.175.489
Jumlah				87.383.812

- e. Mutasi kurang berupa reklasifikasi keluar sebesar Rp317.000,00 terdapat ada satker BPS Kab. Gianyar di wilayah Bali yaitu adanya perubahan kode barang berupa publikasi yang semula berkode 6010101999 (buku lainnya) menjadi berkode 6010102999 (serial lainnya).
- f. Mutasi kurang berupa penghapusan sebesar Rp6.028.950,00 terdapat pada satker BPS Prov. Sumatera Barat di wilayah Sumatera Barat. Transaksi tersebut berupa penghapusan aset yaitu buku publikasi.
- g. Mutasi kurang berupa penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp3.430.027.084,00. Rincian wilayah yang terdapat transaksi ini diuraikan sebagai berikut.

Wilayah	Aset ATL						Nilai (Rp)
	Bahan Perpus. Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Lainnya	Laporan	Mono grafi	Referensi	Serial Lainnya	
DK Jakarta	0	4.380.700	8.017.072	0	110.509.831	165.014.162	287.921.765
Jabar	0	13.399.540	117.000	0	0	48.081.986	61.598.526
Jateng	0	0	3.492.479	0	0	327.551.274	331.043.753
DIY	0	0	31.840.780	0	0	2.290.200	34.130.980
Jatim	0	0	1.579.000	424.000	594.000	200.269.031	202.866.031
Aceh	0	0	1.867.960	0	0	27.861.770	29.729.730
Sumut	0	115.300	0	22.771.145	0	151.705.810	174.592.255
Sumbar	0	0	6.350.150	0	0	0	6.350.150
Riau	0	1.170.775	0	0	0	0	1.170.775
Jambi	0	252.460.861	0	0	0	0	252.460.861
Sumsel	0	3.912.075	0	0	0	11.315.400	15.227.475
Lampung	652.402	0	0	0	0	241.842.356	242.494.758
Kalbar	0	0	2.672.815	0	0	616.026.797	618.699.612
Kalteng	0	0	0	0	0	104.641	104.641
Kalsel	0	0	0	0	0	67.500	67.500
Kaltm	0	0	66.925.340	0	0	5.777.000	72.702.340
Sulut	0	240.000	20.626.999	661.500	156.000	64.146.100	85.830.599
Sulteng	0	152.500	0	0	0	8.728.200	8.880.700
Sulsel	0	0	10.486.527	0	0	16.970.843	27.457.370
Sultra	0	0	0	0	0	40.851.304	40.851.304
Maluku	0	0	0	0	0	37.660.365	37.660.365
Bali	0	0	51.000	137.000	0	50.564.897	50.752.897
NTB	0	966.600	0	0	0	55.026.484	55.993.084
NTT	0	696.000	0	0	0	4.173.000	4.869.000
Bengkulu	0	0	0	0	0	384.369.956	384.369.956
Malut	0	0	71.443.652	0	0	203.509.232	274.952.884
Banten	0	0	0	51.021	0	99.747.280	99.798.301
Kep. Babel	0	0	13.539.362	0	0	0	13.539.362
Gorontalo	0	0	252.000	0	0	13.658.110	13.910.110
Jumlah							3.430.027.084

- h. Mutasi kurang berupa reklasifikasi keluar ke persediaan senilai Rp26.937.546,00 yaitu perubahan jenis aset tetap lainnya menjadi persediaan. Rincian wilayah dan aset tetap lainnya berubah menjadi persediaan diuraikan sebagai berikut.

No.	Wilayah	Aset ATL		Nilai (Rp)
		Buku Lainnya	Serial Lainnya	
1.	Riau	9.879.546	0	9.879.546
2.	Lampung	0	6.720.000	6.720.000
3.	Kalimantan Selatan	0	623.000	623.000
4.	NTT	0	9.715.000	9.715.000
Jumlah				26.937.546

Realisasi belanja modal lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 secara neto sebesar Rp0,00. Realisasi belanja modal lainnya yang mempengaruhi mutasi nilai aset tetap lainnya, alokasi penggunaan belanja modal lainnya, dan perolehan aset tetap lainnya yang menggunakan selain belanja modal lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian		Rp	31.080.000
Jumlah realisasi belanja modal lainnya pada mutasi nilai Aset Tetap Lainnya		Rp	31.080.000
Penambahan:			
Jumlah Penambahan		Rp	-
Pengurangan:			
Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin untuk perolehan Aset Tetap Lainnya	(Rp	31.080.000)	
Jumlah Pengurangan	(Rp	31.080.000)	
Lebih/(Kurang)		(Rp	31.080.000)
Realisasi belanja modal lainnya(neto)		Rp	0

Penjelasan rincian mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Pengurangan dikarenakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk perolehan aset tetap lainnya sebesar Rp31.080.000,00.

Selain nilai Aset Tetap Lainnya tersebut di atas, terdapat Aset Tetap Lainnya yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp16.543.000,00. Rincian Aset Tetap Lainnya yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp27.044.596.490,00

C.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 adalah Rp27.044.596.490,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2023 adalah Rp33.118.386.227,00. Nilai KDP per 31 Desember 2024 per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 83
Rincian KDP Per Wilayah/Satker

No.	Satker BPS	Wilayah	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	Settama	228.396.800	228.396.800
2	Kab. Majalengka	Jawa Barat	1.984.314.883	942.003.062
3	Kota Surabaya	Jawa Timur	2.664.527.158	1.965.141.618
4	Kota Pematang Siantar	Sumatera Utara	2.100.306.925	1.576.143.248
5	Kab. Labuhan Batu Utara	Sumatera Utara	2.360.923.823	1.526.443.564
6	Kab. Agam	Sumatera Barat	0	1.467.154.928
7	Kab. OKU Timur	Sumatera Selatan	0	1.897.347.784
8	Kab. Lampung Tengah	Lampung	1.139.298.250	1.139.298.250
9	Kab. Seruyan	Kalimantan Tengah	0	2.278.630.029
10	Kab. Kutai Timur	Kalimantan Timur	0	3.201.024.288
11	Kab. Bolmong Utara	Sulawesi Utara	0	2.461.333.732
12	Kab. Sitaro	Sulawesi Utara	31.500.000	31.500.000

13	Kab. Poso	Sulawesi Tengah	0	1.442.450.161
14	Kab. Barru	Sulawesi Selatan	0	233.880.675
15	Kab. Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	323.904.069	0
16	Kab. Peg. Jayawijaya	Papua	0	371.995.152
17	Kab. Bangka Selatan	Kep. Bangka Belitung	2.283.031.717	2.210.081.068
18	Prov. Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	13.928.392.865	10.145.561.868
Jumlah			27.044.596.490	33.118.386.227

Kondisi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 84
Kondisi KDP Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Dilanjutkan (Rp)	Dihentikan sementara (Rp)	Dihentikan Permanen (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	228.396.800	0	0	228.396.800
2	Jawa Barat	1.984.314.883	0	0	1.984.314.883
3	Jawa Timur	2.664.527.158	0	0	2.664.527.158
4	Sumatera Utara	4.461.230.748	0	0	4.461.230.748
5	Lampung	1.139.298.250	0	0	1.139.298.250
6	Sulawesi Utara	0	31.500.000	0	31.500.000
7	Nusa Tenggara Timur	323.904.069	0	0	323.904.069
8	Kepulauan Bangka Belitung	2.283.031.717	0	0	2.283.031.717
9	Kalimantan Utara	13.928.392.865	0	0	13.928.392.865
Jumlah		27.013.096.490	31.500.000	0	27.044.596.490

Mutasi perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 (akhir)	Rp	27.044.596.490
Saldo per 31 Desember 2023 (awal)	Rp	33.118.386.227
Mutasi Tambah/(Kurang)	(Rp)	6.073.789.737
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Pengembangan KDP	Rp	41.789.013.443
Transfer Masuk KDP	Rp	2.124.822.969
Koreksi Nilai KDP Bertambah	Rp	10.958.943.034
Perolehan Lainnya KDP	Rp	25.848.000
Perolehan/Penambahan KDP	Rp	8.634.871.489
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	63.533.498.935
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar KDP	(Rp)	2.124.822.969
Penghapusan/Penghentian KDP	(Rp)	4.575.474.190
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(Rp)	692.644.297
Koreksi Pencatatan KDP	(Rp)	6.112.541.729
Pengembangan Melalui KDP	(Rp)	9.726.148.530
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(Rp)	46.375.656.957
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp)	69.607.288.672
Jumlah Rincian Mutasi	(Rp)	(6.073.789.737)

Penjelasan transaksi mutasi pada KDP diuraikan sebagai berikut.

- a. Mutasi tambah berupa pengembangan KDP senilai Rp41.789.013.443,00. Pengembangan KDP adalah penambahan nilai KDP setelah perolehan awal sampai dengan penambahan KDP terakhir dan siap dioperasikan untuk menjadi aset tetap yang definitif, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset KDP	Nilai (Rp)
1.	BPS Pusat	Settama BPS	GB dalam konstruksi	2.021.208.569
		Pusdiklat BPS	PM dalam konstruksi	6.000.000
2.	Jawa Barat	Kab. Ciamis	GB dalam konstruksi	4.046.710.399
		Kab. Majalengka	GB dalam konstruksi	2.016.803.436
		Kota Depok	GB dalam konstruksi	191.268.000
		Kota Banjar	GB dalam konstruksi	1.812.804.536
3.	Jawa Tengah	Prov. Jawa Tengah	GB dalam konstruksi	9.857.871
		Kab. Pekalongan	GB dalam konstruksi	24.177.900
4.	DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	GB dalam konstruksi	1.100.175.918
5.	Jawa Timur	Kota Surabaya	GB dalam konstruksi	1.953.677.566
		Kab. Blitar	GB dalam konstruksi	1.194.956.111
6.	Aceh	Kota Banda Aceh	Tanah dalam konstruksi	143.426.000
		Kab. Aceh Timur	GB dalam konstruksi	2.795.417.561
7.	Sumatera Utara	Kota Pematangsiantar	GB dalam konstruksi	583.044.610
		Kab. Labuhan Batu Utara	GB dalam konstruksi	905.886.355
8.	Sumatera Barat	Kab. Agam	GB dalam konstruksi	1.007.982.000
9.	Jambi	Prov. Jambi	GB dalam konstruksi	99.368.740
10.	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	GB dalam konstruksi	98.480.000
		Kab. Lahat	GB dalam konstruksi	178.589.400
		Kab. OKU Timur	GB dalam konstruksi	1.021.587.521
11.	Kalimantan Barat	Prov. Kalimantan Barat	GB dalam konstruksi	49.636.345
12.	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	GB dalam konstruksi	1.021.394.015
13.	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	GB dalam konstruksi	525.999.847
14.	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	GB dalam konstruksi	2.308.791.073
15.	Sulawesi Tenggara	Kab. Kendari	GB dalam konstruksi	753.456.250
16.	NTB	Kab. Lombok Barat	GB dalam konstruksi	2.081.334.318
17.	NTT	Kab. Sumba Barat	GB dalam konstruksi	236.309.039
18.	Papua	Kab. Peg. Jayawijaya	GB dalam konstruksi	1.316.460.799
19.	Bengkulu	Kota Bengkulu	GB dalam konstruksi	170.155.000
20.	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	GB dalam konstruksi	616.159.200
21.	Banten	Kota Cilegon	GB dalam konstruksi	4.026.876.256
22.	Kep. Babel	Kab. Bangka Selatan	GB dalam konstruksi	102.640.756
23.	Sulawesi Barat	Prov. Sulawesi Barat	GB dalam konstruksi	119.599.000
24.	Kalimantan Utara	Prov. Kalimantan Utara	GB dalam konstruksi	6.798.798.202
		Kab. Nunukan	GB dalam konstruksi	199.496.850
		Kab. Tana Tidung	GB dalam konstruksi	250.484.000
Jumlah				41.789.013.443

- b. Mutasi tambah berupa transfer masuk KDP senilai Rp2.124.822.969,00. Transfer masuk KDP adalah perolehan KDP yang bersumber dari kiriman KDP dari satker lain yang sama-sama satker pada Pemerintah Pusat, terdapat pada satker BPS Prov. Papua di wilayah Papua yang memperoleh aset KDP berupa gedung dan bangunan dari satker Settama sebesar Rp2.124.822.969,00.

- c. Mutasi tambah berupa koreksi nilai KDP bertambah senilai Rp10.958.943.034,00. Koreksi nilai KDP bertambah adalah pencatatan koreksi KDP berupa perubahan nilai suatu transaksi KDP, yaitu seharusnya menjadi lebih besar daripada nilai sebelumnya, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset KDP	Nilai (Rp)
1.	DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	GB dalam konstruksi	316.973.184
2.	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	GB dalam konstruksi	322.774.360
3.	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	GB dalam konstruksi	2.161.778.200
4.	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara	GB dalam konstruksi	105.450.000
5.	NTB	Kab. Lombok Barat	GB dalam konstruksi	536.000
6.	NTT	Kab. Sumba Barat	GB dalam konstruksi	7.744.960
7.	Papua	Kab. Peg. Jayawijaya	GB dalam konstruksi	4.462.079.262
8.	Bengkulu	Kota Bengkulu	GB dalam konstruksi	59.772.000
9.	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	GB dalam konstruksi	3.521.835.068
Jumlah				10.958.943.034

- d. Mutasi tambah berupa perolehan lainnya KDP senilai Rp25.848.000,00. Perolehan lainnya KDP adalah perolehan KDP pada tahun anggaran berjalan, yang berasal selain dari transaksi perolehan KDP, transfer masuk KDP, dan hibah masuk KDP, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset KDP	Nilai (Rp)
1.	DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	GB dalam konstruksi	1.680.000
2.	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara	GB dalam konstruksi	4.300.000
3.	Bengkulu	Kota Bengkulu	GB dalam konstruksi	19.868.000
Jumlah				25.848.000

- e. Mutasi tambah berupa perolehan/penambahan KDP senilai Rp8.634.871.489,00. Perolehan/penambahan KDP adalah KDP aset tetap yang perolehan dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai atau perekaman SPM/SP2D pertama kali untuk pembayaran pertama dalam rangka perolehan aset tetap yang pembayarannya dilakukan per termin dan SPM/SP2D tersebut di tahun anggaran berjalan terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset KDP	Nilai (Rp)
1.	BPS Pusat	Settama BPS	GB dalam konstruksi	103.614.400
		Pusdiklat BPS	PM dalam konstruksi	142.600.000
2.	Jawa Barat	Kab. Ciamis	GB dalam konstruksi	2.680.000
		Kab. Majalengka	GB dalam konstruksi	2.740.000
		Kota Depok	GB dalam konstruksi	4.732.000
		Kota Banjar	GB dalam konstruksi	157.795.000
3.	Jawa Tengah	Prov. Jawa Tengah	GB dalam konstruksi	187.299.550
		Kab. Pekalongan	GB dalam konstruksi	13.480.000
4.	Jawa Timur	Prov. Jawa Timur	GB dalam konstruksi	342.836.350
		Kota Surabaya	GB dalam konstruksi	710.849.592
5.	Aceh	Kota Banda Aceh	Tanah dalam konstruksi	3.205.000
		Kab. Aceh Timur	GB dalam konstruksi	79.615.689

6.	Sumatera Barat	Kab. Agam	GB dalam konstruksi	111.998.000
7.	Jambi	Prov. Jambi	GB dalam konstruksi	99.368.740
8.	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	GB dalam konstruksi	8.969.000
		Kab. Lahat	GB dalam konstruksi	17.850.000
		Kab. OKU Selatan	GB dalam konstruksi	122.700.000
9.	Kalimantan Barat	Prov. Kalimantan Barat	GB dalam konstruksi	30.201.149
10.	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	GB dalam konstruksi	1.105.246.840
11.	Sulawesi Tenggara	Kab. Kendari	GB dalam konstruksi	51.046.750
		Kab. Buton Utara	GB dalam konstruksi	109.750.000
12.	NTB	Kab. Lombok Barat	GB dalam konstruksi	17.376.296
13.	NTT	Kab. Belu	GB dalam konstruksi	25.320.000
		Kab. Sumba Barat	GB dalam konstruksi	87.595.030
14.	Papua	Kab. Peg. Jayawijaya	GB dalam konstruksi	4.090.083.390
		Kab. Mappi	GB dalam konstruksi	84.970.500
15.	Bengkulu	Kota Bengkulu	GB dalam konstruksi	59.772.000
16.	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	GB dalam konstruksi	3.918.750
17.	Banten	Kota Cilegon	GB dalam konstruksi	7.200.000
18.	Sulawesi Barat	Prov. Sulawesi Barat	GB dalam konstruksi	11.960.000
19.	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	GB dalam konstruksi	17.726.400
		Kab. Tana Tidung	GB dalam konstruksi	820.371.063
			Jumlah	8.634.871.489

- f. Mutasi kurang berupa transfer keluar KDP senilai Rp2.124.822.969,00. Transfer keluar KDP adalah pencatatan pengeluaran aset KDP yang diserahkan ke satker lain/kementerian lain dalam lingkup Pemerintah Pusat apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) dari kedua belah pihak telah ditandatangani, terdapat pada satker Settama yang mentransfer aset KDP gedung dan bangunan kepada satker BPS Prov. Papua di wilayah Papua dengan nilai Rp2.124.822.969,00.
- g. Mutasi kurang berupa penghapusan/penghentian KDP senilai Rp4.575.474.190,00. Penghapusan/penghentian KDP adalah pencatatan penghapusan/penghentian pembangunan aset-aset KDP yang sebelumnya telah dicatat dan disetujui, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Sumatera Selatan	Kab. OKU Selatan	GB dalam konstruksi	20.000.000
2.	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara	GB dalam konstruksi	105.450.000
3.	Papua	Kab. Peg. Jayawijaya	GB dalam konstruksi	4.450.024.190
			Jumlah	4.575.474.190

- h. Mutasi tambah berupa koreksi nilai KDP berkurang senilai Rp692.644.297,00. Koreksi nilai KDP berkurang adalah pencatatan koreksi KDP berupa perubahan nilai suatu transaksi KDP, yaitu seharusnya menjadi lebih kecil daripada nilai sebelumnya, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset KDP	Nilai (Rp)
1.	Jawa Barat	Kab. Majalengka	GB dalam konstruksi	35.228.553
		Kota Banjar	GB dalam konstruksi	8.487.274
2.	DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	GB dalam konstruksi	908.000
3.	Sumatera Utara	Kota Pematangsiantar	GB dalam konstruksi	58.880.933

		Kab. Labuhan Batu Utara	GB dalam konstruksi	71.406.096
4.	Sulawesi Tenggara	Kab. Kendari	GB dalam konstruksi	1.000.000
5.	NTB	Kab. Lombok Barat	GB dalam konstruksi	536.000
6.	Papua	Kab. Peg. Jayawijaya	GB dalam konstruksi	12.634.352
7.	Kep. Babel	Kab. Bangka Selatan	GB dalam konstruksi	29.690.107
8.	Sulawesi Barat	Prov. Sulawesi Barat	GB dalam konstruksi	1.793.000
9.	Kalimantan Utara	Prov. Kalimantan Utara	GB dalam konstruksi	2.164.000
		Kab. Nunukan	GB dalam konstruksi	17.726.400
		Kab. Tana Tidung	GB dalam konstruksi	452.189.582
Jumlah				692.644.297

- i. Mutasi kurang berupa koreksi pencatatan KDP senilai Rp6.112.541.729,00. Koreksi pencatatan KDP adalah proses penyesuaian atau pembetulan atas kesalahan pencatatan nilai, volume, atau status aset KDP dalam laporan keuangan. Koreksi ini dilakukan agar nilai dan status aset yang tercatat mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Aset KDP	Nilai (Rp)
1.	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	GB dalam konstruksi	2.433.919.201
2.	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara	GB dalam konstruksi	4.300.000
3.	NTT	Kab. Sumba Barat	GB dalam konstruksi	7.744.960
4.	Papua	Kab. Mappi	GB dalam konstruksi	84.970.500
5.	Bengkulu	Kota Bengkulu	GB dalam konstruksi	59.772.000
6.	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	GB dalam konstruksi	3.521.835.068
Jumlah				6.112.541.729

- j. Mutasi kurang berupa pengembangan melalui KDP senilai Rp9.726.148.530,00, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Nilai (Rp)
1.	Jawa Barat	Kota Depok	196.000.000
		Kota Banjar	166.100.000
2.	Jawa Tengah	Prov. Jawa Tengah	197.157.421
3.	DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	1.417.921.102
4.	Jawa Timur	Prov. Jawa Timur	342.836.350
5.	Aceh	Kota Banda Aceh	146.631.000
6.	Sumatera Barat	Kab. Agam	111.998.000
7.	Jambi	Prov. Jambi	198.737.480
8.	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	107.449.000
		Kab. Lahat	196.439.400
		Kab. OKU Selatan	102.700.000
9.	Kalimantan Barat	Prov. Kalimantan Barat	79.837.494
10.	Sulawesi Tenggara	Kab. Kendari	803.503.000
		Kab. Buton Utara	109.750.000
11.	NTB	Kab. Lombok Barat	1.846.719.514
12.	NTT	Kab. Belu	25.320.000
13.	Papua	Prov. Papua	2.124.822.969
14.	Bengkulu	Kota Bengkulu	249.795.000
15.	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	620.077.950

16.	Sulawesi Barat	Prov Sulawesi Barat	129.766.000
17.	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	199.496.850
		Kab. Tana Tidung	353.090.000
Jumlah			9.726.148.530

- k. Mutasi kurang berupa penyelesaian pembangunan dengan KDP senilai Rp46.375.656.957,00, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Nilai (Rp)
1.	BPS Pusat	Pusdiklat BPS	148.600.000
2.	Jawa Barat	Kab. Ciamis	4.049.390.399
		Kota Banjar	2.738.015.324
3.	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	37.657.900
4.	Jawa Timur	Kab. Blitar	3.160.097.729
5.	Aceh	Kab. Aceh Timur	2.875.033.250
6.	Sumatera Barat	Kab. Agam	2.475.136.928
7.	Sumatera Selatan	Kab. OKU Timur	2.918.935.305
8.	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	3.300.024.044
9.	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	3.523.798.648
10.	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.987.333.579
11.	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	2.275.556.000
12.	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	2.542.671.748
13.	NTB	Kab. Lombok Barat	251.991.100
14.	Papua	Kab. Peg. Jayawijaya	5.777.960.061
15.	Banten	Kota Cilegon	4.034.076.256
16.	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	3.279.378.686
Jumlah			46.375.656.957

Akumulasi Penyusutan C.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Rp2.323.036.678.972,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah Rp2.323.036.678.972,00, sedangkan untuk saldo per 31 Desember 2023 adalah Rp2.229.013.665.874,00. Secara ringkas perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

Tabel 85
Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Akumulasi Penyusutan	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	1.881.304.460.677	1.846.664.649.276	34.639.811.401
Gedung dan Bangunan	441.484.731.585	382.105.414.888	59.379.316.697
Aset Tetap Lainnya	247.486.710	243.601.710	3.885.000
Jumlah	2.323.036.678.972	2.229.013.665.874	94.023.013.098

Rincian Nilai Buku Aset Tetap yang berasal dari nilai perolehan Aset Tetap setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 86
Rincian Nilai Buku Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peralatan dan Mesin	2.196.281.247.356	1.881.304.460.677	314.976.786.679
2	Gedung dan Bangunan	2.089.954.257.109	441.484.731.585	1.648.469.525.524
3	Aset Tetap Lainnya	35.254.629.078	247.486.710	35.007.142.368
Jumlah		4.321.490.133.543	2.323.036.678.972	1.998.453.454.571

Perhitungan mutasi nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 (akhir)	Rp	2.323.036.678.972
Saldo per 31 Desember 2023 (awal)	Rp	2.229.013.665.874
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	94.023.013.098
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	43.343.275.115
Hibah Masuk	Rp	41.274.801
Transfer Masuk	Rp	12.443.847.166
Reklasifikasi Masuk	Rp	3.667.993.561
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	120.706.255
Koreksi Susulan	Rp	3.777.563.132
Penyusutan Aset Tetap	Rp	207.832.055.491
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	3.547.119.914
Pengembangan Melalui KDP	Rp	25.098.922
Perolehan Lainnya	Rp	18.278.410
Pembatalan Penghapusan	Rp	2.396.848.083
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	277.214.060.850
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	(Rp)	12.650.213.108
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	2.781.603.782
Hibah Keluar	(Rp)	100.123.530
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp)	42.669.856.085
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp)	124.862.589.531
Penghapusan	(Rp)	59.812.577
Koreksi Pencatatan	(Rp)	66.849.139
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp)	183.191.047.752
Jumlah Rincian Mutasi	Rp	94.023.013.098

Nilai Akumulasi Penyusutan pada Neraca Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Barang Milik Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 87
Perbandingan Akumulasi Penyusutan antara Neraca dan Laporan BMN
Per 31 Desember 2024

Uraian	Neraca (Rp)	SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	1.881.304.460.677	1.881.304.460.677	0
Gedung dan Bangunan	441.484.731.585	441.484.731.585	0
Aset Tetap Lainnya	247.486.710	247.486.710	0
Jumlah	2.323.036.678.972	2.323.036.678.972	0

Tidak terdapat perbedaan nilai Akumulasi Penyusutan antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024.

Piutang Jangka Panjang

Rp3.184.001,00

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Rp3.200.000,00

C.1.3 Piutang Jangka Panjang

C.1.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 adalah Rp3.200.000,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2023 adalah Rp6.307.813,00. Piutang Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Piutang Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Saldo ini merupakan Piutang Tagihan TP/TGR yang belum dilimpahkan ke KPKNL dan pelunasannya di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah tanggal pelaporan.

Sebagaimana pada akun Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR maka penerapan penyisihan piutang tidak tertagih juga terjadi pada akun Tagihan TP/TGR. Hal ini disebabkan Piutang Tagihan TP/TGR merupakan akun Piutang yang bersifat jangka panjang.

Penetapan kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan BPS dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.200.000,00 merupakan nilai Piutang Tagihan TP/TGR dari debitur yang sudah melalui proses telah ditetapkan oleh tim TPKN BPS. Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 tidak ada yang dilimpahkan ke KPKNL. Daftar saldo Piutang Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.



Tabel 88
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	3.200.000	6.307.813	(3.107.813)
Jumlah		3.200.000	6.307.813	(3.107.813)

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR dijelaskan secara terinci dalam kategori jenis kasus dalam tabel berikut ini.

Tabel 89
Rincian Transaksi Piutang Tagihan TP/TGR

No.	Uraian	31-Des-24 (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Kehilangan/Kecurian Kendaraan Dinas Roda 2	3.200.000
Jumlah		3.200.000

Rincian debitor Piutang Tagihan TP/TGR disajikan Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Rp15.999,00

C.1.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.999,00 dan Rp31.539,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR merupakan nilai penyisihan dari satker Settama yaitu sebesar Rp15.999,00 dengan kualitas piutang tidak tertagih dengan status lancar.

Aset Lainnya Rp78.697.257.216,00

C.1.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp78.697.257.216,00 dan Rp99.404.789.554,00. Rincian nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 90
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aset Tak berwujud	424.359.166.700	409.256.575.075	15.102.591.625
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	47.577.860.572	54.066.534.264	(6.488.673.692)
3	Aset Lain-lain	119.625.931.594	140.593.954.423	(20.968.022.829)
Jumlah		591.562.958.866	603.917.063.762	(12.354.104.896)
1	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(512.865.701.650)	(504.512.274.208)	(8.353.427.442)
Nilai Buku Aset Lainnya		78.697.257.216	99.404.789.554	(20.707.532.338)

Penjelasan mengenai rincian mutasi perubahan Aset Lainnya yang terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain akan dijelaskan dalam penjelasan per akun.

Aset Tak Berwujud
Rp424.359.166.700,00

C.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah Rp424.359.166.700,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2023 adalah Rp409.256.575.075,00. Rincian perubahan saldo Aset Tak Berwujud disajikan sebagai berikut.

Tabel 91
Perubahan Saldo Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Software	327.142.416.657	312.169.757.032	14.972.659.625
Lisensi	97.216.750.043	97.086.818.043	129.932.000
Jumlah	424.359.166.700	409.256.575.075	15.102.591.625

Nilai buku Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah Rp22.593.131.078,00. Nilai Buku Aset Tak Berwujud diperoleh dengan mengurangi antara nilai perolehan dengan akumulasi amortisasinya yang sebesar Rp401.766.035.622,00.

Mutasi perubahan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 (akhir)	Rp	424.359.166.700
Saldo per 31 Desember 2023 (awal)	Rp	409.256.575.075
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	15.102.591.625
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	15.391.010.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	3.556.556.625
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	18.947.566.625
Mutasi Kurang		
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp)	44.975.000)

Koreksi Pencatatan	(Rp 3.800.000.000)		
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp 3.844.975.000)		
Jumlah Rincian Mutasi		Rp	15.102.591.625

Berdasarkan rincian mutasi di atas, penambahan aset tetap tak berwujud salah satunya berasal dari pembelian sebesar Rp11.591.010.000. Pembelian ini menggunakan belanja modal peralatan mesin dan belanja modal lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Pembelian		Rp	15.391.010.000
Jumlah realisasi belanja modal lainnya pada mutasi nilai Aset Tak Berwujud		Rp	15.391.010.000
Penambahan:			
Jumlah Penambahan	Rp		0
Pengurangan:			
Realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk perolehan Aset Tak Berwujud	(Rp 3.800.000.000)		
Jumlah Pengurangan	(Rp 3.800.000.000)		
Lebih/(Kurang)		(Rp)	3.800.000.000
Realisasi belanja modal aset tetap tak berwujud (neto)		Rp	11.591.010.000

Penjelasan rincian mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Pengurangan dikarenakan adanya belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk perolehan aset tak berwujud sebesar Rp3.800.000.000,00.

Sedangkan penjelasan mutasi perubahan nilai Aset Tak Berwujud selama periode tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

- Mutasi tambah pada transaksi Aset Tak Berwujud yang sebesar Rp18.947.566.625,00 dirinci sebagai berikut:

- Pembelian aset tak berwujud berupa software komputer pada satker Settama BPS sebesar Rp15.391.010.000,00.
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif yaitu dengan memanfaatkan BMN yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lagi digunakan secara aktif untuk tugas dan fungsi lembaga yang berupa software komputer dan lisensi sebesar Rp3.556.556.625,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

No.	Satker BPS	Wilayah	Jenis Aset	Nilai (Rp)
1.	Kota Jakarta Barat	DK Jakarta	Software Komputer	12.850.000
2.	Kota Jakarta Pusat	DK Jakarta	Software Komputer	12.850.000
3.	Kab. Bekasi	Jawa Barat	Software Komputer	12.850.000
4.	Kab. Bondowoso	Jawa Timur	Software Komputer	6.425.000
5.	Prov. Sumatera Utara	Sumut	Software Komputer	235.635.642
6.	Kota Binjai	Sumut	Software Komputer	4.200.000
7.	Kab. Agam	Sumbar	Software Komputer	4.310.020
8.	Kab. Limapuluh Kota	Sumbar	Software Komputer	11.000.000
9.	Prov. Riau	Riau	Lisensi	49.544.000
10.	Kab. Indragiri Hilir	Riau	Software Komputer	75.721.800
11.	Kab. Kuantan Singingi	Riau	Software Komputer	75.721.800
12.	Kab. Pelalawan	Riau	Software Komputer	75.721.800
13.	Prov. Jambi	Jambi	Lisensi	30.844.000

14.	Kota Sungai Penuh	Jambi	Software Komputer	12.850.000
15.	Prov. Sulawesi Tengah	Sulteng	Lisensi	49.544.000
16.	Kab. Buol	Sulteng	Software Komputer	25.700.000
17.	Prov. Sulawesi Selatan	Sulsel	Software Komputer	209.453.904
18.	Kab. Wajo	Sulsel	Software Komputer	12.850.000
19.	Kab. Gianyar	Bali	Software Komputer	12.850.000
20.	Kab. Kupang	NTT	Software Komputer	12.850.000
21.	Kab. Sumba Barat	NTT	Software Komputer	25.700.000
22.	Kab. Flores Timur	NTT	Software Komputer	693.242.000
23.	Kota Kupang	NTT	Software Komputer	1.166.000
24.	Kab. Rote ndao	NTT	Software Komputer	6.425.000
25.	Kab. Sumba Barat Daya	NTT	Software Komputer	12.850.000
26.	Prov. Papua	Papua	Software Komputer	1.010.273.159
27.	Prov. Maluku Utara	Malut	Software Komputer	829.053.500
28.	Kab. Bangka Tengah	Babel	Software Komputer	1.950.000
29.	Kota Sorong	Pabar	Software Komputer	32.125.000
Jumlah				3.556.556.625

b. Mutasi kurang pada transaksi Aset Tak Berwujud yang senilai Rp3.844.975.000,00 dirinci sebagai berikut:

1. Penghentian aset dari penggunaan yaitu BPS menghentikan secara resmi pemanfaatan suatu aset dikarenakan aset tersebut sudah tidak diperlukan lagi, tidak layak pakai, berlebih, rusak berat, atau akan dialihkan pengelolaannya dengan nilai sebesar Rp44.975.000 berupa *software* komputer yang terdapat pada satker BPS Kab. Wajo di wilayah Sulawesi Selatan senilai Rp12.850.000,00, satker BPS Kab. Gianyar di wilayah Bali senilai Rp12.850.000,00, dan satker BPS Kab. Halmahera Timur di wilayah Maluku Utara senilai Rp19.275.000,00.
2. Koreksi pencatatan yang merupakan koreksi dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dengan nilai sebesar Rp3.800.000.000,00 pada satker Settama BPS.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya **C.1.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**

Rp47.577.860.572,00

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp47.577.860.572,00 dan Rp54.066.534.264,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana atas hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan pemerintah. Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 merupakan dana pada RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) yang digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun 2024. Pelaksanaan mekanisme RPATA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran dan Pekerjaan yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.

Rincian saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 92
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	29.047.093.860	32.146.691.779	(3.099.597.919)
2	Pusdiklat BPS	232.716.700	0	232.716.700
3	Polstat STIS	270.270.683	1.988.403.071	(1.718.132.388)
4	DK Jakarta	209.850.292	0	209.850.292
5	Jawa Barat	1.873.735.662	0	1.873.735.662
6	Jawa Tengah	772.427.799	930.068.442	(157.640.643)
7	DI Yogyakarta	58.651.247	0	58.651.247
8	Jawa Timur	1.068.588.650	1.698.833.970	(630.245.320)
9	Aceh	479.500.000	1.060.685.264	(581.185.264)
10	Sumatera Utara	604.702.944	2.622.353.642	(2.017.650.698)
11	Sumatera Barat	0	2.479.299.358	(2.479.299.358)
12	Riau	138.589.370	0	138.589.370
13	Jambi	29.244.252	0	29.244.252
14	Sumatera Selatan	481.915.940	2.129.511.951	(1.647.596.011)
15	Lampung	231.378.136	1.631.927.627	(1.400.549.491)
16	Kalimantan Barat	82.870.985	0	82.870.985
17	Kalimantan Tengah	52.043.587	1.767.426.034	(1.715.382.447)
18	Kalimantan Selatan	454.854.916	0	454.854.916
19	Kalimantan Timur	453.455.728	1.439.604.400	(986.148.672)
20	Sulawesi Utara	153.658.398	1.092.107.047	(938.448.649)
21	Sulawesi Tengah	0	1.105.246.840	(1.105.246.840)
22	Sulawesi Selatan	209.696.680	219.600.000	(9.903.320)
23	Sulawesi Tenggara	21.971.945	18.140.020	3.831.925
24	Bali	105.920.254	0	105.920.254
25	Nusa Tenggara Barat	36.633.037	0	36.633.037
26	Nusa Tenggara Timur	144.463.362	0	144.463.362
27	Papua	237.600.800	135.568.000	102.032.800
28	Maluku Utara	187.813.190	0	187.813.190
29	Banten	204.887.529	66.661.000	138.226.529
30	Bangka Belitung	260.714.415	816.640.756	(555.926.341)
31	Gorontalo	166.392.000	0	166.392.000
32	Kep.Riau	99.673.894	0	99.673.894
33	Papua Barat	120.361.905	0	120.361.905
34	Sulawesi Barat	20.603.176	0	20.603.176
35	Kalimantan Utara	9.065.579.236	717.765.063	8.347.814.173
Jumlah		47.577.860.572	54.066.534.264	(6.488.673.692)

Informasi transaksi realisasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya di Rekening Penampungan sebagai berikut.

- a. Mutasi saldo Dana di Rekening Penampungan yang terdiri dari:
 - Saldo Awal Dana Rekening Penampungan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada SPM Penampungan sebesar Rp48.260.930.347,00;

- Nilai pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D-Pembayaran 2024 sebesar Rp683.069.775,00;
 - Saldo Dana Rekening Penampungan Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.577.860.572,00;
- b. Per 31 Desember 2024, telah terdapat perkembangan penyelesaian pekerjaan, namun belum dilakukan pembayaran ke rekening Penyedia sebesar Rp39.412.107.288,00. Nilai tersebut telah dicatat sebagai beban/aset serta telah disajikan sebagai nilai utang kepada pihak ketiga lainnya.
- c. Terdapat 2 pekerjaan yang diselesaikan ke tahun berikutnya berdasarkan addendum kontrak yang baru dengan rincian sebagai berikut.
- Pekerjaan Konstruksi Fisik Perluasan dan Rehabilitasi Gedung Kantor BPS Kota Surabaya. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor B-16/35781/PPK/PL.300/2024 tanggal 31 Juli 2024 dengan jangka waktu pelaksanaan 1 Agustus 2024 tanggal s.d. 23 Desember 2024. Tahun 2024, Pekerjaan tersebut telah dilakukan tiga kali adendum dengan adendum terakhir Nomor B-37/35781/PPK/PL.300/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 21 hari kalender s.d. 21 Januari 2025. Pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima melalui BAST Nomor B-4/35781/PPK/BA/PL.300/2025 tanggal 10 Januari 2025; dan
 - Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Permanen BPS Provinsi Kalimantan Utara. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 19/PPK-Gedung/2024 tanggal 29 April 2024 dengan jangka waktu pelaksanaan tanggal 30 April s.d. 25 November 2024. Pekerjaan tersebut telah dilakukan enam kali adendum dengan adendum terakhir Nomor 015/PPK-Gedung/Addm/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang perpanjangan masa pelaksanaan menjadi 314 hari kalender mulai 30 April s.d. 9 Maret 2025 dan pemberian kesempatan selama 68 hari kalender dengan dikenakan denda sejak 23 Desember 2024 s.d. 9 Maret 2025. Pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima melalui BAST Nomor 003/BA-Gedung/2025 tanggal 9 Maret 2025.
- d. Mutasi Saldo Dana Penampungan Tahun 2024 pada per 27 Maret 2025 sebagai berikut.
- Nilai pembayaran atas pekerjaan Tahun 2024 yang telah diselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D Pembayaran_2025 sebesar Rp46.192.483.458,00;
 - Terdapat Dana RPATA yang dikembalikan ke RKUN atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D-Penihilan sebesar Rp1.378.054.604,00; dan
 - Saldo akhir Dana di Rekening Penampungan Tahun Anggaran 2024 per 27 Maret 2025 sebesar Rp0,00.

Perincian realisasi mutasi Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Lampiran Dokumen Pendukung. Berkenaan dengan BAST atas realisasi RPATA TA 2024 terlampir pada lampiran pendukung I pada laporan keuangan ini.



Aset Lain-Lain

Rp119.625.931.594,00

C.1.4.3 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 adalah Rp119.625.931.594,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2023 adalah Rp140.593.954.423,00. Pos Aset Lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Nilai Aset Lain-lain tersebut diperoleh dari Aset Tetap yang rusak dan tidak dipergunakan kembali untuk operasional tetapi belum dilakukan penghapusan dan masih tercatat sebagai aset. Rincian perubahan saldo Aset Lain-Lain disajikan sebagai berikut.

Tabel 93
Perubahan Saldo Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	119.232.037.994	136.694.904.198	(17.462.866.204)
ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	393.893.600	3.899.050.225	(3.505.156.625)
Jumlah	119.625.931.594	140.593.954.423	(20.968.022.829)

Nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan adalah Rp8.526.265.566,00. Nilai Buku Aset Lain-lain diperoleh dengan mengurangi antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya yang sebesar Rp111.099.666.028,00. Perhitungan akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Perhitungan mutasi nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024 (akhir)	Rp	119.625.931.594
Saldo per 31 Desember 2023 (awal)	Rp	140.593.954.423
Mutasi Tambah/(Kurang)	(Rp)	20.968.022.829
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Transfer Masuk (Henti Guna)	Rp	100.000.000
Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	Rp	2.060.257.841
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	135.265.988.022
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	137.426.245.863
Mutasi Kurang		
Penghapusan	(Rp)	12.818.627.489
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(Rp)	445.718.000
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	(Rp)	121.889.361.196
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(Rp)	23.240.562.007
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp)	158.394.268.692
Jumlah Rincian Mutasi	(Rp)	20.968.022.829

Penjelasan transaksi mutasi pada Aset Lain-lain diuraikan sebagai berikut.

- a. Mutasi tambah berupa transfer masuk (henti guna) senilai Rp100.000.000,00. Transfer masuk (henti guna) merupakan pemindahan/penerimaan BMN yang sudah tidak digunakan/dihentikan pemanfaatannya oleh unit kerja lain, terdapat pada:
1. BPS Kab. Ogan Komering Ilir di wilayah Sumatera Selatan senilai Rp50.000.000,00 yaitu penerimaan BMN berupa Sepeda Motor yang sudah dihentikan pemanfaatannya.
 2. BPS Kab. Empat Lawang di wilayah Sumatera Selatan senilai Rp50.000.000,00 yaitu penerimaan sepeda motor yang sudah dihentikan pemanfaatannya dari BPS Kab. Ogan Komering Ilir di wilayah Sumatera Selatan.
- b. Mutasi tambah berupa Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan senilai Rp2.060.257.841,00. Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan merupakan pencatatan atas proses pembatalan transaksi usulan penghapusan BMN pada pengguna barang, terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Nilai (Rp)
1.	Jawa Barat	Kab. Bekasi	12.850.000
2.	Jawa Tengah	Kab. Tegal	24.942.274
		Kab. Kudus	67.976.451
		Kab. Karanganyar	69.775.000
3.	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	13.400.000
		Kab. Sampang	31.630.639
4.	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	110.603.479
5.	Riau	Kab. Pelalawan	75.721.800
6.	Jambi	Prov. Jambi	315.718.900
7.	Sulawesi Utara	Prov. Sulawesi Utara	38.400
8.	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	135.245.200
		Kab. Luwu Utara	327.976.200
9.	Bali	Kab. Buleleng	15.411.143
		Kota Denpasar	161.638.400
10.	Papua	Kab. Boven Digoel	317.685.998
11.	Bengkulu	Kota Bengkulu	628.500
12.	Papua Barat	Kab. Manokwari	291.816.210
		Kab. Sorong	33.144.000
13.	Sulawesi Barat	Kab. Majene	54.055.247
Jumlah			2.060.257.841

- c. Mutasi tambah berupa penghentian aset dari penggunaan senilai Rp135.265.988.022,00. Pencatatan penghentian aset dari penggunaan merupakan tindakan untuk mengakhiri status penggunaan BMN oleh unit pengguna, yang menjadi langkah awal dalam proses penghapusan atau pemindahtanganan BMN, terdapat pada 371 satker BPS Kabupaten/Kota di seluruh wilayah.
- d. Mutasi kurang berupa penghapusan senilai Rp12.818.627.489,00. Pencatatan penghapusan merupakan penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat Keputusan penghapusan dari unit kerja terdapat pada:

No.	Wilayah	Satker BPS	Nilai (Rp)
1.	BPS Pusat	Settama BPS	11.125.912.360
2.	Jawa Barat	Kab. Bandung	712.500
		Kota Bogor	9.941.800
		Kab. Cianjur	1.430.000
3.	Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	9.969.300
4.	Aceh	Kab. Aceh Besar	35.000
		Kab. Aceh Tengah	63.250
		Kota Sabang	16.181.516
5.	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	47.526.000
		Kab. Asahan	457.007.668
		Kab. Labuhan Batu Utara	93.726.479
		Kab. Batu Bara	168.991.290
6.	Sumatera Barat	Prov. Sumatera Barat	1.487.750
		Kota Padang	10.986.850
		Kab. Tanah Datar	11.316.360
		Kab. Pasaman	25.034.190
		Kab. Limapuluh Kota	22.407.683
		Kab. Dharmasraya	19.863.154
7.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	9.996.800
8.	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	2.083.895
		Kota Prabumulih	36.197.890
9.	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	100.441.192
		Kab. Kapuas Hulu	145.940.929
		Kab. Melawi	34.036.677
10.	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow	3.900.000
11.	Sulawesi Selatan	Prov. Sulawesi Selatan	123.791.412
		Kab. Pangkajene Kep.	3.575.000
		Kab. Gowa	927.660
		Kota Makasar	346.200
		Kab. Bone	3.115.905
		Kab. Wajo	4.666.792
		Kab. Bantaeng	46.643.170
		Kab. Bulukumba	17.309.120
		Kab. Sinjai	8.295.537
		Kab. Selayar	3.754.775
		Kab. Luwu	6.147.980
		Kab. Tana Toraja	1.420.045
		Kab. Luwu Utara	6.053.545
		Kota Palopo	649.433
Kab. Toraja Utara	33.655.969		
12.	Maluku	Kota Ambon	25.131.400
13.	Papua	Kota Jayapura	139.089.757
14.	Papua Barat	Prov. Papua Barat	38.863.256
Jumlah			12.818.627.489

e. Mutasi kurang berupa transfer keluar (BMN yang dihentikan) senilai Rp455.718.000,00, terdapat pada:

1. BPS Kab. Empat Lawang di wilayah Sumatera Selatan senilai Rp50.000.000,00 yaitu melakukan transfer keluar atas BMN yang telah dihentikan pemanfaatannya berupa

sepeda motor kepada BPS Kab. Ogan Komering Ilir di wilayah Sumatera Selatan.

2. BPS Kab. Ogan Komering Ilir di wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp50.000.000,00.
 3. BPS Kota Batam di wilayah Kep. Riau sebesar Rp345.718.000,00 yaitu melakukan transfer keluar atas BMN yang telah dihentikan penggunaannya karena kondisi rusak berat dengan rincian aset berupa rumah negara golongan I tipe D permanen senilai Rp197.372.000,00 dan aset berupa bangunan gedung kantor permanen senilai Rp148.346.000,00.
- f. Mutasi kurang berupa pencatatan barang yang mau dihapuskan senilai Rp121.889.361.196,00. Pencatatan barang yang mau dihapuskan merupakan tindakan untuk mengusulkan penghapusan kepada pengguna barang berdasarkan surat usulan penghapusan, baik berupa pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN yang terdapat pada 339 satker BPS Kabupaten/Kota di seluruh wilayah.
- g. Mutasi kurang berupa penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif senilai Rp23.240.562.007,00. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif merupakan pemanfaatan kembali BMN yang sudah tidak digunakan secara aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, yang terdapat pada 81 satker BPS Kabupaten/Kota di 29 wilayah.

Selain nilai Aset Lain-lain tersebut di atas, terdapat Aset Lain-lain yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp578.021.366,00. Rincian Aset Lain-lain yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan /
Amortisasi Aset Lainnya
Rp512.865.701.650,00*

C.1.4.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp512.865.701.650,00 dan Rp504.512.274.208,00. Rincian perubahan saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 94
Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	304.851.648.142	292.537.516.664	12.314.131.478
Akumulasi Amortisasi Lisensi	96.914.387.480	96.317.197.950	597.189.530
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	110.705.772.428	111.777.999.169	(1.072.226.741)
Akumulasi Amortisasi ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	393.893.600	3.879.560.425	(3.485.666.825)
Jumlah	512.865.701.650	504.512.274.208	8.353.427.442

Nilai Buku Aset Lainnya yang berasal dari nilai perolehan Aset Lainnya setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 95
Rincian Nilai Buku Aset Lainnya

No.	Nama Akun	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software	327.142.416.657	304.851.648.142	22.290.768.515
2.	Lisensi	97.216.750.043	96.914.387.480	302.362.563
Jumlah		424.359.166.700	401.766.035.622	22.593.131.078
B.	Aset Lain-Lain			
1.	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	119.232.037.994	110.705.772.428	8.526.265.566
2.	ATB Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	393.893.600	393.893.600	0
Jumlah		119.625.931.594	111.099.666.028	8.526.265.566
Total		543.985.098.294	512.865.701.650	31.119.396.644

Amortisasi Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam laporan keuangan ini menggunakan metode amortisasi garis lurus tanpa memperhitungkan nilai residu/sisa. Hal ini untuk menyajikan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas. Untuk Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Dasar perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud adalah menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.06/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Perhitungan mutasi nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 (akhir)	Rp	512.865.701.650
Saldo per 31 Desember 2023 (awal)	Rp	504.512.274.208
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	8.353.427.442
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Penyusutan Aset Tetap	Rp	10.389.093.892
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	124.862.589.531
Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	Rp	2.059.683.727
Transfer Masuk (Henti Guna)	Rp	100.000.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	137.411.367.150
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(Rp)	227.244.418
Koreksi Pencatatan	(Rp)	475.000.000
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	(Rp)	112.421.924.025
Penghapusan	(Rp)	12.364.289.441
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(Rp)	3.569.481.824

Jumlah Mutasi Kurang	(Rp 129.057.939.708)
Jumlah Rincian Mutasi	Rp 8.353.427.442

C.2 KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Rp134.903.055.440,00

C.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp134.903.055.440,00 dan Rp131.279.754.724,00. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Adapun Kewajiban yang tersaji pada Laporan Keuangan BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 hanya terklasifikasi sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang pada pihak ketiga), utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 96
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	134.188.923.301	130.892.802.867
2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	2.258.193	963.849
3	Pendapatan Diterima Dimuka	692.563.153	367.660.163
4	Uang Muka dari KPPN	6.230.000	0
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.080.793	18.327.845
Jumlah		134.903.055.440	131.279.754.724

Utang Kepada Pihak Ketiga

Rp134.188.923.301,00

C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp134.188.923.301,00 dan Rp130.892.802.867,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga ini mengungkapkan kewajiban pemerintah yang masih harus diakui karena telah diterimanya hak dari pihak ketiga yang terjadi pada saat tanggal neraca. Rincian saldo utang pihak ketiga tersaji pada tabel berikut:

Tabel 97
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	90.529.068.169	88.918.777.011
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4.247.747.844	6.226.577.232
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	39.412.107.288	35.747.448.624
Jumlah		134.188.923.301	130.892.802.867

Saldo Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 pada Neraca berasal dari Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pengeluaran Transito Yang Masih Harus Dibayar, dan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya. Saldo Utang Pihak Ketiga pada Neraca per 31 Desember 2024 berupa Belanja yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban entitas yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima entitas, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hal tersebut kepada pegawai dan/atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa (belanja barang dan belanja modal). Daftar Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 98
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Utang Pihak Ketiga (Rp)		
		Belanja Pegawai YMHD	Belanja Barang YMHD	Utang Pihak Ketiga Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	9.173.138.598	725.029.690	28.464.050.818
2	Pusdiklat BPS	520.323.173	0	232.716.700
3	Polstat STIS	853.662.627	113.980.449	270.270.683
4	DKI Jakarta	1.330.505.559	87.615.363	209.850.292
5	Jawa Barat	4.751.038.653	190.771.498	588.123.189
6	Jawa Tengah	7.215.864.048	287.831.219	772.427.799
7	DI Yogyakarta	1.732.106.540	61.324.900	58.651.247
8	Jawa Timur	6.020.172.840	443.531.340	799.235.568
9	Aceh	3.048.343.379	75.480.627	479.500.000
10	Sumatera Utara	4.572.059.930	192.922.877	604.702.944
11	Sumatera Barat	2.711.077.256	152.805.188	0
12	Riau	2.107.822.318	99.704.127	138.589.370
13	Jambi	1.743.243.363	90.919.288	29.244.252
14	Sumatera Selatan	2.804.338.864	136.349.180	481.845.122
15	Lampung	2.522.566.443	99.707.238	231.378.136
16	Kalimantan Barat	2.289.873.491	86.983.876	82.870.985
17	Kalimantan Tengah	1.824.919.496	91.868.420	52.043.587
18	Kalimantan Selatan	2.065.325.582	151.616.854	442.428.785
19	Kalimantan Timur	1.653.298.950	78.688.880	369.023.728
20	Sulawesi Utara	1.696.036.363	58.402.051	153.658.398
21	Sulawesi Tengah	1.760.458.026	87.175.259	0
22	Sulawesi Selatan	3.606.526.322	222.479.654	209.696.680
23	Sulawesi Tenggara	2.289.203.934	109.937.508	21.971.945
24	Maluku	1.682.633.085	1.261.375	0
25	Bali	1.769.448.656	43.584.537	105.920.254
26	NTB	1.499.326.763	7.674.766	36.633.037
27	NTT	2.812.155.571	55.316.758	144.463.362
28	Papua	2.785.734.084	65.753.180	237.600.800

No.	Wilayah/Satker	Utang Pihak Ketiga (Rp)		
		Belanja Pegawai YMHD	Belanja Barang YMHD	Utang Pihak Ketiga Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Bengkulu	1.823.624.561	10.628.728	0
30	Maluku Utara	1.336.341.167	71.276.370	187.813.190
31	Banten	1.621.526.886	74.507.295	204.887.529
32	Kep. Babel	1.326.206.402	53.909.915	260.714.415
33	Gorontalo	868.358.114	1.534.804	83.196.000
34	Kep. Riau	1.258.543.073	72.771.968	99.673.894
35	Papua Barat	1.522.212.050	61.953.794	120.361.905
36	Sulawesi Barat	1.147.720.245	40.380.398	20.603.176
37	Kalimantan Utara	783.331.757	42.068.470	3.217.959.498
Jumlah		90.529.068.169	4.247.747.844	39.412.107.288

*Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Non
Pajak
Rp2.258.193,00*

C.2.1.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.258.193,00 dan Rp963.849,00. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak ini merupakan hasil pencatatan utang atas kelebihan pendapatan non pajak lainnya. Saldo pada akun ini berasal dari kelebihan penyetoran pendapatan sewa atas rumah dinas, sehingga kelebihan setoran tersebut akan dikembalikan kepada pihak ketiga.

Rincian saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak per 31 Desember 2024 adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 99
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah	Satker BPS	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jawa Tengah	Kab. Kudus	949.167
2	Papua Barat	Kab. Fak Fak	661.566
		Kota Sorong	647.460
Jumlah			2.258.193

*Pendapatan Yang
Diterima Dimuka
Rp692.563.153,00*

C.2.1.3 Pendapatan Yang Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp692.563.153,00 dan Rp367.660.163,00. Pendapatan yang Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke Kas Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah.

Saldo Pendapatan yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 merupakan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan atas pemanfaatan ruang gedung/kantor pada BPS yang penerimaan pendapatannya diawal kontrak sewa dengan wajib setor/pihak ketiga dan disesuaikan nilainya dengan masa manfaat yang telah dijalani oleh wajib setor/pihak

ketiga sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan yang Diterima Dimuka tersebut tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 100
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah	Satker BPS	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	
1	BPS Pusat	Settama	346.329.185
2	BPS Pusat	Pusdiklat BPS	31.070.000
3	BPS Pusat	Polstat STIS	8.584.827
4	Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah	14.182.500
5	DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta	2.832.746
6	Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur	538.820
7	Aceh	Provinsi Aceh	10.279.324
8	Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	12.162.848
9	Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan	5.851.323
10	Lampung	Kota Metro	256.216.737
11	Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan	1.566.788
12	Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara	672.636
13	Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.275.419
Jumlah			692.563.153

Uang Muka Dari KPPN
Rp6.230.000,00

C.2.1.4 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.230.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KUN merupakan UP/TUP yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 terdapat pada satker BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat di wilayah BPS Provinsi Jambi. Saldo Uang Muka dari KPPN ini adalah pengembalian sisa TUP yang sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 7 Januari 2025 dengan NTPN 7342A0JUTF3454US sebesar Rp6.230.000,00.

Utang Jangka Pendek lainnya
Rp13.080.793,00

C.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.080.793,00 dan Rp18.327.845,00. Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat potongan pajak yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara sampai tanggal pelaporan.

Rincian saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 101
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Wilayah/Satker

No.	Satker	Wilayah	Nilai (Rp)	Tanggal Setor	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh Singkil	Aceh	2.815.315	4 Februari 2025	PPH: B80CD746V7754P1H; PPN: 8FB7AIPM07OQKCNJ
2	Kep. Yapen	Papua	8.445.946	24 Maret 2025	PPH: C5F9B79T0KU1393N; PPN: A3D905H20VP86EC4
3	Natuna	Kepulauan Riau	1.819.532	11 Februari 2025	1EA4000R0IRQ09DL
Jumlah			13.080.793		

C.3 EKUITAS

Ekuitas

Rp5.239.814.986.644,00

C.3.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.239.814.986.644,00 dan Rp5.297.290.032.446,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

D.1.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp25.840.049.069,00.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp25.840.049.069,00

D.1.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp25.840.049.069,00 dan Rp351.788.792.656,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 102
Rincian PNBP Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.332.593.224	2.853.612.755
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	4.831.800.000	6.364.500.000
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	258.250.000	74.200.000
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.180.680.000	4.023.500.000
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	5.706.567.000	331.509.133.000
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	7.063.098.941	5.983.169.133
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.331.773.378	903.364.362
425839	Pendapatan Denda Lainnya	2.502.000	41.143.278
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	132.784.526	36.170.128
Jumlah		25.840.049.069	351.788.792.656

Perbandingan saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 103
Perbandingan PNBP Lainnya LO dan LRA Per 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.332.593.224	3.734.954.493
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	4.831.800.000	4.831.800.000
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	258.250.000	261.925.000
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.180.680.000	2.180.680.000
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	5.706.567.000	5.706.567.000



Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	7.063.098.941	7.063.098.941
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.331.773.378	2.123.345.824
425839	Pendapatan Denda Lainnya	2.502.000	2.502.000
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	787.498
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	132.784.526	132.784.526
Jumlah		25.840.049.069	26.038.445.282

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	13.981.794.179
2	PUSDIKLAT BPS	2.189.468.210
3	POLSTAT STIS	5.233.271.347
4	DKI JAKARTA	13.196.568
5	JAWA BARAT	237.165.414
6	JAWA TENGAH	158.165.935
7	DI YOGYAKARTA	30.960.929
8	JAWA TIMUR	245.793.384
9	ACEH	72.663.461
10	SUMATERA UTARA	631.554.186
11	SUMATERA BARAT	207.754.496
12	RIAU	48.213.803
13	JAMBI	59.236.530
14	SUMATERA SELATAN	64.304.692
15	LAMPUNG	379.831.881
16	KALIMANTAN BARAT	53.161.215
17	KALIMANTAN TENGAH	305.345.938
18	KALIMANTAN SELATAN	47.562.768
19	KALIMANTAN TIMUR	49.285.203
20	SULAWESI UTARA	35.447.094
21	SULAWESI TENGAH	179.578.772
22	SULAWESI SELATAN	79.212.384
23	SULAWESI TENGGARA	37.295.468
24	MALUKU	99.088.959
25	BALI	46.475.880
26	NUSA TENGGARA BARAT	55.244.345
27	NUSA TENGGARA TIMUR	51.301.923
28	PAPUA	309.015.607
29	BENGKULU	40.742.944
30	MALUKU UTARA	98.303.358
31	BANTEN	67.224.315
32	KEP. BANGKA BELITUNG	363.644.928
33	GORONTALO	33.431.780
34	KEPULAUAN RIAU	55.084.864
35	PAPUA BARAT	143.719.760
36	SULAWESI BARAT	29.049.900
37	KALIMANTAN UTARA	107.456.649
Jumlah		25.840.049.069

D.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 berasal dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Penyusutan dan Amortisasi, serta Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Beban Pegawai
Rp2.556.576.283.850,00

D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dan belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.556.576.283.850,00 dan Rp2.322.159.157.238,00. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 104
Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	877.209.372.885	805.950.317.284
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.293.233	13.171.927
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	54.337.397.652	50.268.457.042
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	16.475.892.728	15.383.960.573
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	15.743.645.130	15.609.010.553
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	131.004.266.116	112.025.001.643
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	66.249.752.929	2.978.651.725
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	43.166.541.840	43.467.694.590
511129	Beban Uang Makan PNS	126.451.221.220	111.225.143.866
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	457.925.000	439.325.000
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4.124.100.000	4.104.470.000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6.917.258.475	12.464.008.022
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	2.412.275.689	2.144.874.951
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	7.696.716.670	415.042.600
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	163.773	9.060
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	400.710.760	17.817.560
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	106.176.784	3.476.782
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.008.485.825	68.640.000
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	424.019.100	19.263.720
511628	Beban Uang Makan PPPK	1.415.925.000	89.188.450
512211	Beban Uang Lembur	28.524.442.250	34.997.352.950
512212	Beban Uang Lembur PPPK	233.562.669	1.694.000

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.163.315.401.071	1.109.905.538.122
512414	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	8.887.737.051	567.046.818
Jumlah		2.556.576.283.850	2.322.159.157.238

Perbandingan saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 105
Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Per 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	877.209.372.885	876.659.052.374
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.293.233	13.233.272
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	54.337.397.652	54.347.589.534
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	16.475.892.728	16.478.036.734
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	15.743.645.130	15.747.629.070
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	131.004.266.116	131.114.556.997
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	66.249.752.929	63.381.413.704
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	43.166.541.840	43.150.321.710
511129	Beban Uang Makan PNS	126.451.221.220	125.513.069.750
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	457.925.000	457.700.000
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4.124.100.000	4.118.165.000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6.917.258.475	6.870.448.475
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	2.412.275.689	2.376.940.724
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	7.696.716.670	7.696.716.670
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	163.773	163.773
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	400.710.760	400.710.760
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	106.176.784	106.176.784
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.008.485.825	1.009.565.825
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	424.019.100	424.019.100
511628	Beban Uang Makan PPPK	1.415.925.000	1.388.291.000
512211	Beban Uang Lembur	28.524.442.250	28.581.177.750
512212	Beban Uang Lembur PPPK	233.562.669	233.950.000
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.163.315.401.071	1.166.339.472.648
512414	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	8.887.737.051	8.256.331.067
Jumlah		2.556.576.283.850	2.554.664.732.721

Beban Pegawai LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Pegawai LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	262.049.782.446
2	PUSDIKLAT BPS	13.755.811.668
3	POLSTAT STIS	21.257.352.005

4	DKI JAKARTA	36.251.227.916
5	JAWA BARAT	145.466.399.536
6	JAWA TENGAH	211.881.400.907
7	DI YOGYAKARTA	48.664.097.011
8	JAWA TIMUR	181.253.189.912
9	ACEH	81.139.518.228
10	SUMATERA UTARA	132.462.607.653
11	SUMATERA BARAT	76.134.073.141
12	RIAU	60.454.356.301
13	JAMBI	49.718.808.584
14	SUMATERA SELATAN	73.030.391.400
15	LAMPUNG	72.086.514.629
16	KALIMANTAN BARAT	58.601.332.989
17	KALIMANTAN TENGAH	50.377.098.301
18	KALIMANTAN SELATAN	59.372.204.267
19	KALIMANTAN TIMUR	45.818.496.261
20	SULAWESI UTARA	52.667.165.184
21	SULAWESI TENGAH	49.915.989.130
22	SULAWESI SELATAN	103.241.025.508
23	SULAWESI TENGGARA	64.595.261.080
24	MALUKU	44.303.445.778
25	BALI	41.719.635.750
26	NUSA TENGGARA BARAT	54.863.597.559
27	NUSA TENGGARA TIMUR	80.390.960.838
28	PAPUA	71.232.129.119
29	BENGKULU	44.223.592.081
30	MALUKU UTARA	35.895.944.836
31	BANTEN	47.126.567.895
32	KEP. BANGKA BELITUNG	33.771.301.360
33	GORONTALO	27.057.737.654
34	KEPULAUAN RIAU	32.047.388.755
35	PAPUA BARAT	41.515.073.827
36	SULAWESI BARAT	30.790.436.303
37	KALIMANTAN UTARA	21.444.368.038
Jumlah		2.556.576.283.850

Beban Persediaan
Rp62.186.017.523,00

D.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi/pemakaian atas barang-barang persediaan yang habis pakai. Saldo Beban Persediaan pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp62.186.017.523,00 dan Rp160.189.367.274,00. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 106
Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	62.186.017.523	160.189.367.274
Jumlah		62.186.017.523	160.189.367.274

Beban Persediaan LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Persediaan LO (Rp)
1	SETTAMA	2.381.613.530
2	PUSDIKLAT	528.463.421
3	POLSTAT STIS	131.203.654
4	DKI JAKARTA	1.089.356.479
5	JAWA BARAT	2.991.690.590
6	JAWA TENGAH	2.925.993.816
7	DI YOGYAKARTA	910.432.036
8	JAWA TIMUR	5.131.868.428
9	ACEH	1.920.333.204
10	SUMATERA UTARA	3.412.851.291
11	SUMATERA BARAT	1.826.799.445
12	RIAU	1.552.062.910
13	JAMBI	874.013.039
14	SUMATERA SELATAN	1.881.383.863
15	LAMPUNG	1.872.562.764
16	KALIMANTAN BARAT	2.205.867.350
17	KALIMANTAN TENGAH	1.298.866.111
18	KALIMANTAN SELATAN	1.404.300.281
19	KALIMANTAN TIMUR	1.136.185.733
20	SULAWESI UTARA	1.246.615.313
21	SULAWESI TENGAH	1.212.459.964
22	SULAWESI SELATAN	2.907.236.933
23	SULAWESI TENGGARA	2.106.593.613
24	MALUKU	1.637.412.834
25	BALI	1.159.869.412
26	NUSA TENGGARA BARAT	1.468.108.633
27	NUSA TENGGARA TIMUR	2.140.118.475
28	PAPUA	3.947.500.095
29	BENGKULU	1.195.856.735
30	MALUKU UTARA	910.674.747
31	BANTEN	1.475.152.287
32	KEP. BANGKA BELITUNG	873.126.949
33	GORONTALO	848.051.892
34	KEPULAUAN RIAU	867.681.952
35	PAPUA BARAT	1.218.121.708
36	SULAWESI BARAT	891.796.554
37	KALIMANTAN UTARA	603.791.482
Jumlah		62.186.017.523

Beban Barang dan Jasa
Rp907.860.659.689,00

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa termasuk aset ekstrakomptabel yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional entitas pelaporan. Saldo Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp907.860.659.689,00 dan Rp2.964.274.912.755,00. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 107
Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	57.517.988.877	148.051.380.464
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	8.510.600
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	275.546.933	675.047.300
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	28.184.023.910	57.850.220.850
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	22.512.658.085	1.605.897.968
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	77.329.949
521211	Beban Bahan	57.682.438.444	187.892.336.236
521213	Beban Honor Output Kegiatan	398.047.144.380	2.251.746.283.309
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	29.327.235.245	62.056.609.696
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan Dalam Bentuk Uang	0	7.000.000
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	52.880.883
521252	Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	7.880.595.220	3.993.977.842
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	727.130.694	258.066.804
522111	Beban Langganan Listrik	48.560.250.310	49.496.476.745
522112	Beban Langganan Telepon	1.153.881.129	1.244.102.617
522113	Beban Langganan Air	1.787.519.419	1.757.829.296
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20.353.002.826	856.629.912
522131	Beban Jasa Konsultan	834.723.290	1.373.615.923
522141	Beban Sewa	12.549.183.801	56.838.659.963
522151	Beban Jasa Profesi	6.519.606.399	38.837.460.650
522191	Beban Jasa Lainnya	213.895.818.227	99.224.544.473
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	55.615.000
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	51.912.500	314.436.275
Jumlah		907.860.659.689	2.964.274.912.755

Perbandingan saldo Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 108
Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA Per 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	57.517.988.877	60.889.941.547
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	275.546.933	281.384.405
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	28.184.023.910	28.186.613.910
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	22.512.658.085	20.860.971.557
521211	Beban Bahan	57.682.438.444	57.676.398.420
521213	Beban Honor Output Kegiatan	398.047.144.380	397.970.560.530
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	29.327.235.245	25.969.381.027
521252	Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	7.880.595.220	7.965.379.275
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	727.130.694	758.814.194
522111	Beban Langganan Listrik	48.560.250.310	48.566.751.812
522112	Beban Langganan Telepon	1.153.881.129	1.149.684.289

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
522113	Beban Langganan Air	1.787.519.419	1.789.096.161
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20.353.002.826	20.484.815.040
522131	Beban Jasa Konsultan	834.723.290	834.723.290
522141	Beban Sewa	12.549.183.801	8.719.693.645
522151	Beban Jasa Profesi	6.519.606.399	6.522.106.399
522191	Beban Jasa Lainnya	213.895.818.227	207.700.668.793
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	51.912.500	0
Jumlah		907.860.659.689	896.326.984.294

Beban Barang dan Jasa LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Barang dan Jasa LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	102.515.297.454
2	PUSDIKLAT BPS	37.149.808.960
3	POLSTAT STIS	14.243.351.115
4	DKI JAKARTA	16.296.408.865
5	JAWA BARAT	52.174.617.895
6	JAWA TENGAH	55.241.160.852
7	DI YOGYAKARTA	10.866.946.504
8	JAWA TIMUR	66.282.472.587
9	ACEH	30.443.064.364
10	SUMATERA UTARA	43.780.956.216
11	SUMATERA BARAT	23.252.801.518
12	RIAU	18.825.800.590
13	JAMBI	15.460.217.569
14	SUMATERA SELATAN	24.255.568.381
15	LAMPUNG	21.108.744.352
16	KALIMANTAN BARAT	19.766.595.785
17	KALIMANTAN TENGAH	18.973.065.747
18	KALIMANTAN SELATAN	19.574.100.902
19	KALIMANTAN TIMUR	15.079.161.314
20	SULAWESI UTARA	19.036.269.368
21	SULAWESI TENGAH	16.627.606.147
22	SULAWESI SELATAN	36.151.629.232
23	SULAWESI TENGGARA	18.376.811.423
24	MALUKU	14.092.014.739
25	BALI	16.995.080.629
26	NUSA TENGGARA BARAT	15.701.492.048
27	NUSA TENGGARA TIMUR	26.024.144.744
28	PAPUA	33.506.870.182
29	BENGKULU	12.559.710.343
30	MALUKU UTARA	12.449.207.543
31	BANTEN	17.910.845.049
32	KEP. BANGKA BELITUNG	10.932.576.434
33	GORONTALO	9.103.054.344
34	KEPULAUAN RIAU	10.648.939.939
35	PAPUA BARAT	14.969.528.665
36	SULAWESI BARAT	8.901.876.432
37	KALIMANTAN UTARA	8.582.861.458

Jumlah

907.860.659.689

Beban Pemeliharaan
Rp142.774.692.030,00

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap atau aset lainnya yang dimiliki oleh entitas pelaporan agar tetap berada dalam kondisi normal. Saldo Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp142.774.692.030,00 dan Rp133.184.458.787,00.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 109
Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.487.185.083	33.482.176.088
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	2.498.642.859	2.510.238.623
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.485.947.488	581.821.073
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.051.719.278	94.366.020.455
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	5.473.013.605	351.965.847
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1.669.877.540	1.773.123.892
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	108.306.177	119.112.809
Jumlah		142.774.692.030	133.184.458.787

Perbandingan saldo Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 110
Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dan LRA Per 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.487.185.083	49.891.041.800
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	2.498.642.859	2.498.642.859
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.485.947.488	1.485.947.488
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.051.719.278	78.299.141.591
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	5.473.013.605	6.183.800.000
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1.669.877.540	0
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	108.306.177	0
Jumlah		142.774.692.030	138.358.573.738

Beban Pemeliharaan LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Pemeliharaan LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	58.779.148.192
2	PUSDIKLAT BPS	1.476.525.260

3	POLSTAT STIS	1.346.348.531
4	DKI JAKARTA	1.503.985.705
5	JAWA BARAT	3.769.040.697
6	JAWA TENGAH	5.103.772.266
7	DI YOGYAKARTA	1.240.167.674
8	JAWA TIMUR	5.610.590.085
9	ACEH	3.706.490.562
10	SUMATERA UTARA	5.063.875.093
11	SUMATERA BARAT	3.216.398.522
12	RIAU	1.997.102.351
13	JAMBI	1.731.358.105
14	SUMATERA SELATAN	2.766.839.213
15	LAMPUNG	2.103.914.987
16	KALIMANTAN BARAT	1.791.848.689
17	KALIMANTAN TENGAH	2.704.993.113
18	KALIMANTAN SELATAN	2.314.569.208
19	KALIMANTAN TIMUR	1.717.155.000
20	SULAWESI UTARA	2.294.052.316
21	SULAWESI TENGAH	1.993.265.044
22	SULAWESI SELATAN	3.480.009.035
23	SULAWESI TENGGARA	2.102.237.111
24	MALUKU	1.679.308.605
25	BALI	1.183.450.638
26	NUSA TENGGARA BARAT	1.438.491.796
27	NUSA TENGGARA TIMUR	2.732.580.407
28	PAPUA	4.381.182.135
29	BENGKULU	1.517.532.194
30	MALUKU UTARA	1.210.535.617
31	BANTEN	1.554.251.664
32	KEP. BANGKA BELITUNG	1.241.196.619
33	GORONTALO	1.318.250.585
34	KEPULAUAN RIAU	1.619.873.612
35	PAPUA BARAT	2.733.640.206
36	SULAWESI BARAT	1.560.859.760
37	KALIMANTAN UTARA	789.851.433
Jumlah		142.774.692.030

Beban Perjalanan Dinas **D.2.5 Beban Perjalanan Dinas**
Rp563.952.482.272,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban untuk mencatat penyelenggaraan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan jabatan. Saldo Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp563.952.482.272,00 dan Rp1.689.124.734.641,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 111
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
524111	Beban Perjalanan Biasa	154.952.675.291	230.069.579.068
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.112.751.611	214.501.092.097
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	180.288.914.824	864.462.390.131

524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	75.518.176.948	378.017.510.423
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0	167.609.965
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4.079.963.598	1.906.552.957
Jumlah		563.952.482.272	1.689.124.734.641

Perbandingan saldo Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 112
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Per 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
524111	Beban Perjalanan Biasa	154.952.675.291	154.898.733.165
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.112.751.611	149.109.664.611
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	180.288.914.824	180.324.974.653
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	75.518.176.948	75.529.571.375
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4.079.963.598	4.079.963.598
Jumlah		563.952.482.272	563.942.907.402

Beban Perjalanan Dinas LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Perjalanan Dinas LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	84.891.805.044
2	PUSDIKLAT BPS	15.476.400.131
3	POLSTAT STIS	6.278.821.383
4	DKI JAKARTA	6.262.161.912
5	JAWA BARAT	23.179.288.163
6	JAWA TENGAH	21.956.154.163
7	DI YOGYAKARTA	4.061.789.572
8	JAWA TIMUR	30.213.891.606
9	ACEH	15.555.615.634
10	SUMATERA UTARA	22.252.310.738
11	SUMATERA BARAT	12.131.268.962
12	RIAU	9.234.540.445
13	JAMBI	7.861.415.408
14	SUMATERA SELATAN	11.775.341.976
15	LAMPUNG	9.548.504.385
16	KALIMANTAN BARAT	9.713.612.373
17	KALIMANTAN TENGAH	10.253.820.408
18	KALIMANTAN SELATAN	9.793.644.749
19	KALIMANTAN TIMUR	8.697.321.180
20	SULAWESI UTARA	10.695.032.057
21	SULAWESI TENGAH	9.509.935.823
22	SULAWESI SELATAN	16.847.454.692
23	SULAWESI TENGGARA	10.921.084.758
24	MALUKU	13.707.963.416
25	BALI	6.770.266.511
26	NUSA TENGGARA BARAT	8.902.273.584
27	NUSA TENGGARA TIMUR	16.228.935.751

28	PAPUA	82.430.369.965
29	BENGKULU	6.395.383.434
30	MALUKU UTARA	8.271.268.910
31	BANTEN	7.737.445.153
32	KEP. BANGKA BELITUNG	4.677.229.944
33	GORONTALO	3.683.162.507
34	KEPULAUAN RIAU	6.121.177.299
35	PAPUA BARAT	22.045.005.352
36	SULAWESI BARAT	4.786.999.501
37	KALIMANTAN UTARA	5.083.785.383
Jumlah		563.952.482.272

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp221.955.168.092,00

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaat aset bersangkutan. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud. Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp221.955.168.092,00 dan Rp241.544.873.432,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 113
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	152.000.681.733	154.013.575.895
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	60.024.277.404	59.105.167.992
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.885.000	0
592115	Beban Amortisasi Software	8.932.481.853	26.830.340.467
592116	Beban Amortisasi Lisensi	481.792.930	532.575.163
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	4.954.400	121.512.250
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	507.094.772	941.701.665
Jumlah		221.955.168.092	241.544.873.432

Beban Penyusutan dan Amortisasi LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Penyusutan dan Amortisasi LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	61.838.571.549
2	PUSDIKLAT BPS	2.107.074.313
3	POLSTAT STIS	3.981.909.978
4	DKI JAKARTA	3.349.219.628
5	JAWA BARAT	10.993.162.117
6	JAWA TENGAH	14.031.404.788
7	DI YOGYAKARTA	2.520.972.092
8	JAWA TIMUR	12.001.925.924
9	ACEH	6.075.563.225



10	SUMATERA UTARA	8.402.124.023
11	SUMATERA BARAT	5.454.166.814
12	RIAU	3.706.187.819
13	JAMBI	2.936.975.442
14	SUMATERA SELATAN	5.730.746.857
15	LAMPUNG	3.865.884.247
16	KALIMANTAN BARAT	3.358.040.867
17	KALIMANTAN TENGAH	3.781.154.156
18	KALIMANTAN SELATAN	3.425.801.094
19	KALIMANTAN TIMUR	3.164.766.399
20	SULAWESI UTARA	3.719.462.404
21	SULAWESI TENGAH	3.594.175.772
22	SULAWESI SELATAN	6.420.816.213
23	SULAWESI TENGGARA	4.427.545.004
24	MALUKU	2.865.736.144
25	BALI	2.872.237.066
26	NUSA TENGGARA BARAT	3.837.860.963
27	NUSA TENGGARA TIMUR	4.721.737.354
28	PAPUA	6.798.500.670
29	BENGKULU	2.738.458.605
30	MALUKU UTARA	2.657.751.459
31	BANTEN	2.974.255.760
32	KEP. BANGKA BELITUNG	2.026.926.188
33	GORONTALO	2.024.608.895
34	KEPULAUAN RIAU	1.968.091.317
35	PAPUA BARAT	4.097.367.622
36	SULAWESI BARAT	1.832.416.729
37	KALIMANTAN UTARA	1.651.568.595
Jumlah		221.955.168.092

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
minus
Rp2.039.086.520,00

D.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang dalam suatu periode pelaporan. Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar minus Rp2.039.086.520,00 dan Rp125.381.951,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 114
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	1.666.864	430.915.567
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.313.816	(1.665.147)
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	272.053.645
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	(2.042.067.200)	(575.922.114)
Jumlah		(2.039.086.520)	125.381.951

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	(2.041.900.051)
2	PUSDIKLAT BPS	(3.247)
3	POLSTAT STIS	(8.677)
4	JAWA BARAT	751.504
5	JAWA TENGAH	9.182
6	DI YOGYAKARTA	3.822
7	JAWA TIMUR	208.822
8	SUMATERA UTARA	(7.610)
9	SUMATERA BARAT	182.145
10	RIAU	(2.055)
11	SUMATERA SELATAN	379.041
12	LAMPUNG	(727)
13	KALIMANTAN BARAT	(7.117)
14	KALIMANTAN SELATAN	45.198
15	SULAWESI TENGGARA	(1.327)
16	NUSA TENGGARA TIMUR	354.649
17	PAPUA	(189.310)
18	BENGKULU	1.053
19	MALUKU UTARA	1.689
20	BANTEN	14.099
21	KEP. BANGKA BELITUNG	1.173.477
22	PAPUA BARAT	725
23	SULAWESI BARAT	8.195
24	KALIMANTAN UTARA	(100.000)
Jumlah		(2.039.086.520)

D.3 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Rp28.353.655.356,00

D.3.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp28.353.655.356,00 dan Rp10.286.368.971,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari hasil pelepasan aset non lancar berupa Barang Milik Negara (BMN) melalui proses pemindahtanganan aset. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 115
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.400.000	22.104.888
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.339.629.322	797.269.873
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	27.007.626.034	9.466.994.210
Jumlah		28.353.655.356	10.286.368.971

Perbandingan saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 116
Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO dan LRA
Per 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.400.000	6.400.000
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.339.629.322	1.339.629.322
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	27.007.626.034	27.007.626.034
Jumlah		28.353.655.356	28.353.655.356

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	203.793.500
2	PUSDIKLAT BPS	62.714.000
3	DKI JAKARTA	308.240.400
4	JAWA BARAT	1.837.031.376
5	JAWA TENGAH	2.283.150.408
6	DI YOGYAKARTA	933.061.100
7	JAWA TIMUR	3.856.916.194
8	ACEH	1.045.619.600
9	SUMATERA UTARA	1.783.180.422
10	SUMATERA BARAT	689.554.807
11	RIAU	1.144.542.150
12	JAMBI	777.427.326
13	SUMATERA SELATAN	461.113.500
14	LAMPUNG	1.108.622.210
15	KALIMANTAN BARAT	1.020.338.250
16	KALIMANTAN TENGAH	915.658.600
17	KALIMANTAN SELATAN	704.798.050
18	KALIMANTAN TIMUR	611.757.940
19	SULAWESI UTARA	185.033.000
20	SULAWESI TENGAH	535.819.926
21	SULAWESI SELATAN	1.293.385.985
22	SULAWESI TENGGARA	356.945.000
23	MALUKU	456.939.500
24	BALI	236.855.000
25	NUSA TENGGARA BARAT	480.193.000
26	NUSA TENGGARA TIMUR	1.665.559.914
27	PAPUA	344.888.037
28	BENGKULU	934.474.900
29	MALUKU UTARA	69.752.000
30	BANTEN	259.377.162
31	KEP. BANGKA BELITUNG	253.695.800
32	GORONTALO	384.979.309
33	KEPULAUAN RIAU	568.305.000

34	PAPUA BARAT	224.498.000
35	SULAWESI BARAT	329.391.000
36	KALIMANTAN UTARA	26.042.990
Jumlah		28.353.655.356

Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Rp16.730.740.475,00

D.3.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Saldo Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp16.730.740.475,00 dan Rp26.704.284.420,00. Beban tersebut berasal dari nilai Beban Kerugian Pelepasan Aset yang memperhitungkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku ketika terjadi proses pelepasan aset.

Tabel 117
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	16.730.740.475	26.704.284.420
Jumlah		16.730.740.475	26.704.284.420

Beban Pelepasan Aset Non Lancar LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban Pelepasan Aset Non Lancar LO (Rp)
1	PUSDIKLAT BPS	4.290.000
2	DKI JAKARTA	359.971.563
3	JAWA BARAT	17.419.672
4	JAWA TENGAH	853.960.770
5	DI YOGYAKARTA	46.304.830
6	JAWA TIMUR	3.770.261.435
7	ACEH	19.644.676
8	SUMATERA UTARA	4.878.000
9	SUMATERA BARAT	102.173.178
10	RIAU	84.159.958
11	JAMBI	212.463.795
12	SUMATERA SELATAN	1.779.980.218
13	LAMPUNG	601.709
14	KALIMANTAN BARAT	2.920.609.712
15	KALIMANTAN TENGAH	9.293.045
16	KALIMANTAN SELATAN	12.928.574
17	KALIMANTAN TIMUR	704.050
18	SULAWESI SELATAN	44.949.877
19	MALUKU	38.211.731
20	NUSA TENGGARA BARAT	56.342.994
21	PAPUA	5.813.752.015
22	BENGKULU	538.094.658
23	KEP. BANGKA BELITUNG	24.922.801
24	PAPUA BARAT	585.714
25	SULAWESI BARAT	14.235.500
Jumlah		16.730.740.475

D.4 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan Dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp8.665.572.814,00

D.4.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.665.572.814,00 dan Rp431.395.300.328,00. Pendapatan ini berasal dari transaksi pendapatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi utama dari BPS. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 118
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.310.105.286	173.751.672
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	422.588.000	2.278.889.386
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	333.716.485	764.503.993
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	364.498.576	494.695.248
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	272.641.740	547.494.924
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	37.438.296	75.064.956
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	3.245.086.213	26.156.323.785
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.679.498.218	400.904.576.364
Jumlah		8.665.572.814	431.395.300.328

Perbandingan saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 119
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO dan LRA
Per 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.310.105.286	2.310.105.286
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	422.588.000	1.406.882.341
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	333.716.485	354.565.128
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	364.498.576	4.294.721.223
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	272.641.740	3.429.668.409
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	37.438.296	33.438.296
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	3.245.086.213	0
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.679.498.218	0
Jumlah		8.665.572.814	11.829.380.683



Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	3.365.216.003
2	PUSDIKLAT BPS	230.974.823
3	POLSTAT STIS	1.887.219.000
4	DKI JAKARTA	230.108.914
5	JAWA BARAT	504.797.369
6	JAWA TENGAH	131.741.398
7	DI YOGYAKARTA	48.420.019
8	JAWA TIMUR	36.502.369
9	ACEH	19.441.820
10	SUMATERA UTARA	1.353.052.597
11	SUMATERA BARAT	37.750.524
12	RIAU	8.919.156
13	JAMBI	2.533.978
14	SUMATERA SELATAN	2.818.915
15	LAMPUNG	6.327.377
16	KALIMANTAN BARAT	74.561.280
17	KALIMANTAN TENGAH	6.766.675
18	KALIMANTAN SELATAN	8.449.998
19	KALIMANTAN TIMUR	10.904.751
20	SULAWESI UTARA	113.762.000
21	SULAWESI TENGAH	8.240.438
22	SULAWESI SELATAN	29.947.864
23	SULAWESI TENGGARA	14.853.250
24	MALUKU	9.342.176
25	BALI	13.928.011
26	NUSA TENGGARA BARAT	703.645
27	NUSA TENGGARA TIMUR	23.309.713
28	PAPUA	35.658.443
29	BENGKULU	243.497.883
30	MALUKU UTARA	38.164.760
31	BANTEN	11.904.729
32	KEP. BANGKA BELITUNG	34.863.592
33	GORONTALO	5.193.578
34	PAPUA BARAT	6.678.150
35	SULAWESI BARAT	1.378.100
36	KALIMANTAN UTARA	107.639.516
Jumlah		8.665.572.814

Beban dari Kegiatan Non operasional Lainnya
Rp6.360.020.499,00

D.4.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.360.020.499,00 dan Rp409.124.850.638,00. Beban ini merupakan beban yang muncul karena adanya penyesuaian atas nilai dan kondisi barang persediaan. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 120
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Akun	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.680.371.598	400.104.748.471
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	4.679.648.901	9.020.102.167
Jumlah		6.360.020.499	409.124.850.638

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No	Wilayah/Satker	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO (Rp)
1	SETTAMA BPS	966.634.137
2	PUSDIKLAT BPS	11.223.140
3	DKI JAKARTA	65.611.101
4	JAWA BARAT	128.724.715
5	JAWA TENGAH	151.953.970
6	DI YOGYAKARTA	149.024.836
7	JAWA TIMUR	720.476.498
8	ACEH	337.561.009
9	SUMATERA UTARA	1.405.296.459
10	SUMATERA BARAT	23.965.503
11	RIAU	77.878.950
12	SUMATERA SELATAN	84.479.686
13	LAMPUNG	169.663.244
14	KALIMANTAN BARAT	151.977.324
15	KALIMANTAN SELATAN	52.940.933
16	KALIMANTAN TIMUR	22.287.570
17	SULAWESI UTARA	185.790.216
18	SULAWESI TENGAH	6.712.535
19	SULAWESI SELATAN	100.460.053
20	SULAWESI TENGGARA	21.608.458
21	MALUKU	162.296.627
22	BALI	81.552.540
23	NUSA TENGGARA BARAT	2.741.850
24	NUSA TENGGARA TIMUR	19.504.430
25	PAPUA	511.021.857
26	BENGKULU	282.350.750
27	BANTEN	103.596.653
28	KEP. BANGKA BELITUNG	46.224.831
29	GORONTALO	65.830
30	KEPULAUAN RIAU	109.058.214
31	PAPUA BARAT	170.075.710
32	SULAWESI BARAT	19.625.870
33	KALIMANTAN UTARA	17.635.000
Jumlah		6.360.020.499

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.297.290.032.446,00

E.1 EKUITAS AWAL

Saldo Ekuitas Awal tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.297.290.032.446,00 dan Rp5.331.160.728.411,00.

Defisit LO
Rp4.413.497.700.671,00

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Saldo Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4.413.497.700.671,00 dan Rp7.152.961.559.181,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa pada Laporan Operasional. Rincian Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada Laporan Operasional.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS

Jumlah Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar minus Rp22.619.292,00 dan minus Rp16.621.529.943,00. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut.

Tabel 121
Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koreksi Nilai Persediaan	117.590.891	(589.410.908)
2	Koreksi atas Reklasifikasi	(23.844.077)	(35.559.360)
3	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	1.533.394.535	(15.480.967.959)
4	Lain-lain	(1.649.760.641)	(515.591.716)
Jumlah		(22.619.292)	(16.621.529.943)

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp117.590.891,00

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Saldo Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp117.590.891,00 dan minus Rp589.410.908,00. Saldo Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan nilai koreksi atas persediaan berupa persediaan yang perolehannya pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan pada tahun anggaran yang berjalan. Perolehan persediaan ini melalui pembelian, transfer masuk, hibah langsung, rampasan, perolehan lainnya, maupun reklasifikasi masuk. Saldo Koreksi Nilai Persediaan yang tercatat di Laporan Perubahan Ekuitas merupakan nilai koreksi persediaan barang konsumsi yang perolehannya tahun anggaran yang lalu dan dibukukan pada tahun anggaran berjalan.

Rincian mutasi transaksi yang membentuk nilai Koreksi Nilai Persediaan diuraikan sebagai berikut:



Mutasi Tambah:

Koreksi Kuantitas Tambah	Barang Konsumsi	Rp	3.810.828
Koreksi Nilai Tambah	Barang Konsumsi	Rp	5.327.560
Saldo Awal	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp	7.215.000
	Barang Konsumsi	Rp	113.381.891
Tanpa Uraian	Barang Konsumsi	Rp	2.070.000
	Belanja Barang Persediaan	Rp	20.000
	Barang Konsumsi		

Jumlah Mutasi Tambah **Rp 131.825.279**

Mutasi Kurang:

Koreksi Kuantitas Kurang	Barang Konsumsi	(Rp	573.290)
Koreksi Nilai Kurang	Barang Konsumsi	(Rp	1.465.498)
Koreksi Nilai Tambah	Barang Konsumsi	(Rp	12.175.600)
Tanpa Uraian	Belanja Persediaan konsumsi	(Rp	20.000)

Jumlah Mutasi Kurang **(Rp 14.234.388)**

Rincian Mutasi **Rp 117.590.891**

Koreksi Atas Reklasifikasi (Rp23.844.077,00)

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar minus Rp 23.844.077,00 dan minus Rp35.559.360,00. Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi pada Laporan Perubahan Ekuitas mencerminkan nilai atas reklasifikasi yang terjadi pada Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya SIMAK-BMN periode tahun berjalan. Sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), salah satu transaksi yang mungkin terjadi atas suatu BMN adalah reklasifikasi. Reklasifikasi masuk merupakan transaksi pencatatan BMN yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN lain. Sedangkan reklasifikasi keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus suatu BMN, sebelum dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru. Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi per 31 Desember 2024 terdapat pada tabel berikut.

Penjelasan perhitungan mutasi transaksi saldo Koreksi Atas Reklasifikasi diuraikan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Reklasifikasi Keluar	Aset Tetap Lainnya	Rp	317.000
	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp	2.571.938
	Bahan Baku	Rp	13.282.054
	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp	4.940.270
	Barang Konsumsi	Rp	510.863.358
	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp	3.243.120
	Gedung dan Bangunan	Rp	12.659.393.018
	Jalan dan Jembatan	Rp	22.361.910
	Peralatan dan Mesin	Rp	13.940.893.475
	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp	362.000



	Persediaan Lainnya	Rp	5.716.000
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	Rp	9.825.000
	Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp	1.043.000
	Tanah	Rp	2.207.769.000
Reklasifikasi Masuk	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	1.164.077.606
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	1.059.842.034
Reklasifikasi ke Aset	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp	5.243.500
	Barang Konsumsi	Rp	418.143.696
	Persediaan Lainnya	Rp	700.000
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	Aset Tetap Lainnya	Rp	26.937.546
	Peralatan dan Mesin	Rp	4.480.000
Tanpa Uraian	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Rp	1.646.600
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	32.063.652.125
Mutasi Kurang:			
Reklasifikasi Keluar	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	1.170.841.101)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	1.059.143.034)
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(Rp	22.361.910)
Reklasifikasi Masuk	Aset Tetap Lainnya	(Rp	317.000)
	Bahan untuk Pemeliharaan	(Rp	11.240.598)
	Barang Konsumsi	(Rp	540.606.142)
	Gedung dan Bangunan	(Rp	12.670.060.668)
	Peralatan dan Mesin	(Rp	13.940.360.475)
	Tanah	(Rp	2.207.769.000)
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Aset Tetap Lainnya	(Rp	382.118.696)
	Peralatan dan Mesin	(Rp	1.575.000)
Reklasifikasi Dari Aset	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	(Rp	2.540.000)
	Bahan untuk Pemeliharaan	(Rp	320.900)
	Barang Konsumsi	(Rp	29.438.724)
	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	(Rp	1.114.800)
Jumlah Mutasi Kurang		(Rp	32.039.808.048)
Rincian Mutasi			(Rp 23.844.077)



Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp1.533.394.535,00

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.533.394.535,00 dan minus Rp15.480.967.959,00. Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas catatan dan koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang dilakukan selain karena revaluasi nilai.

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Laporan Perubahan Ekuitas mencerminkan nilai atas reklasifikasi dan pengurangan nilai aset yang terjadi pada nilai BMN periode tahun berjalan. Rincian saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari:

- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp5.306.009.135,00.
- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar minus Rp 3.772.614.600,00.

Penjelasan perhitungan mutasi transaksi saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi diuraikan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:			
Reklasifikasi Masuk	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	14.450.326
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	6.567.535
	Peralatan dan Mesin	Rp	54.673.219
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	889.924.028
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	123.959.724.695
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp	135.221.013.022
	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	44.975.000
	Akumulasi Amortisasi Software	Rp	44.975.000
Koreksi Pencatatan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	27.474.070
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	31.488.069
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Gedung dan Bangunan	Rp	5.732.481.235
	Peralatan dan Mesin	Rp	35.106.816
	Tanah	Rp	7.635.086.187
Saldo Awal	Gedung dan Bangunan	Rp	224.404.000.000
	Peralatan dan Mesin	Rp	726.160.177
	Tanah	Rp	252.000.000
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	42.654.209.979
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	3.032.642
Pencatatan Barang Yang Mau Dihilangkan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp	8.543.090.962
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	Rp	6.425.000



	Pemerintahan		
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Aset Tetap Lainnya	Rp	87.383.812
	Gedung dan Bangunan	Rp	1.487.188.000
	Peralatan dan Mesin	Rp	3.064.362.660
	Tanah	Rp	15.022.709.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp	3.568.771.079
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	3.542.021.225
	Software	Rp	3.426.624.625
	Lisensi	Rp	129.932.000
	Jalan dan Jembatan	Rp	22.361.910
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp	1.971.686.041
	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	88.571.800
Tanpa Uraian	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Rp	849.032.800
	Transfer Keluar	Rp	271.666.476
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Rp	18.376.400
	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp	452.189.582
	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	272.635.129
	Piutang Lainnya	Rp	83.345.749
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	35.959.594
	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp	29.110.935
	Aset Tetap yang Belum Diregister	Rp	18.134.400
	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	Rp	1.793.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	2.604.750
Koreksi Susulan	Gedung dan Bangunan	Rp	830.754.054
	Peralatan dan Mesin	Rp	3.800.000.000
Pembatalan Penghapusan Penghapusan	Peralatan dan Mesin	Rp	1.377.468.402
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		24.680.700
Pengembangan Melalui KDP	Gedung dan Bangunan	Rp	24.500.000
Koreksi Nilai KDP Bertambah	Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp	10.958.943.034
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	601.749.665.119
Mutasi Kurang:			
Reklasifikasi Masuk	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp)	529.624.026)



Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Aset Tetap Lainnya	(Rp	3.430.027.084)
	Gedung dan Bangunan	(Rp	6.591.020.042)
	Peralatan dan Mesin	(Rp	124.737.465.896)
	Tanah	(Rp	462.500.000)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(Rp	124.849.648.723)
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(Rp	44.975.000)
	Software	(Rp	44.975.000)
Koreksi Pencatatan	Gedung dan Bangunan	(Rp	2.398.012.382)
	Peralatan dan Mesin	(Rp	466.520.803)
	Tanah	(Rp	7.673.876.902)
	Software	(Rp	3.800.000.000)
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	112.921.518)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	3.446.875)
Saldo Awal	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	42.636.760.000)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	701.802.615)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Gedung dan Bangunan	(Rp	226.358.644.339)
	Peralatan dan Mesin	(Rp	213.061.165)
	Tanah	(Rp	8.794.947)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(Rp	9.525.381.031)
	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(Rp	6.425.000)
Koreksi Nilai KDP Berkurang Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Konstruksi Dalam pengerjaan	(Rp	692.644.297)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	494.210.796)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	3.052.198.373)
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(Rp	22.361.910)
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(Rp	19.684.005.382)
	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(Rp	3.556.556.625)
	Akumulasi Amortisasi Software	(Rp	3.426.624.625)
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(Rp	115.396.600)
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(Rp	1.971.111.927)
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(Rp	88.571.800)
Tanpa Uraian	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(Rp	350.340.054)



	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	(Rp	24.854.500)
	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	(Rp	36.752.800)
	Transfer Keluar	(Rp	3.821.692.000)
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(Rp	18.376.400)
	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(Rp	322.774.360)
	Koreksi Lainnya	(Rp	9.099.000)
	Beban Pelepasan Aset	(Rp	105.450.000)
	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(Rp	11.832.793)
Koreksi Susulan	Gedung dan Bangunan	(Rp	176.136.888)
Pembatalan Penghapusan Hibah Masuk	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	1.377.468.402)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	9.478.349)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	15.136.214)
Koreksi Pencatatan KDP Penghapusan	Konstruksi Dalam pengerjaan	(Rp	6.112.541.729)
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(Rp	123.791.412)
Pengembangan Melalui KDP	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	980.000)
Jumlah Mutasi Kurang		(Rp	600.216.270.584)
Rincian Mutasi			Rp 1.533.394.535

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-Lain
(Rp1.649.760.641,00)*

Saldo Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar minus Rp1.649.760.641,00 dan minus Rp515.591.716,00. Saldo Koreksi Lain-Lain merupakan akun yang digunakan untuk mengoreksi kesalahan pencatatan atas transaksi kas, piutang, dan utang pada periode berjalan. Saldo Koreksi Lain-Lain terbentuk akibat jurnal penyesuaian yang dicatat pada periode tahun berjalan.

*Transaksi Antar Entitas
Rp4.356.045.274.161,00*

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4.356.045.274.161,00 dan Rp7.135.712.393.159,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih Entitas yang berbeda baik internal satker BPS, antara BPS dengan Kementerian Negara/Lembaga lain, maupun antara BPS dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.



Tabel 122
Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	4.410.074.194.098	7.502.163.392.302
2	Diterima dari Entitas Lain	(66.221.481.321)	(378.622.297.063)
3	Transfer Keluar	(46.051.842.024)	(54.053.786.732)
4	Transfer Masuk	45.760.064.908	51.128.797.760
5	Pengesahan Hibah Langsung	11.000.577.834	14.683.746.095
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(73.598.542)	(9.419.203)
7	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	1.557.359.208	421.960.000
	Jumlah	4.356.045.274.161	7.135.712.393.159

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Saldo Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024, adalah masing-masing sebesar minus Rp66.221.481.321,00 dan Rp4.410.074.194.098,00. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan Transaksi Antar Entitas atas pendapatan dan belanja pada BPS yang melibatkan Kas Negara (BUN). Saldo Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 123
Rincian Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain

No.	Uraian	Diterima dari Entitas Lain (DDEL) (Rp)	Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak - LRA	66.221.481.321	0
	Jumlah	66.221.481.321	0
2	Belanja - LRA		
	• Belanja Pegawai	0	2.554.664.732.721
	• Belanja Barang	0	1.657.140.384.812
	• Belanja Modal	0	198.269.076.565
	Jumlah	66.221.481.321	4.410.074.194.098

Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp4.410.074.194.098,00 jika dibandingkan dengan nilai rincian laporan realisasi belanja sebagai pembentuk nilai Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp4.411.827.097.514,00 maka terdapat selisih sebesar Rp1.752.903.416,00 yang berasal dari realisasi dana hibah langsung luar negeri.

E.4.2 Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024, adalah masing-masing sebesar Rp45.760.064.908,00 dan minus Rp46.051.842.024,00. Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu Entitas ke Entitas lain pada internal satker BPS, antara BPS dengan Kementerian Negara/Lembaga, dan antara BPS dengan BUN.



Tabel 124
Rincian Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Kode Akun	Uraian	Transfer Masuk (Rp)	Transfer Keluar (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
117111	Barang Konsumsi	27.314.924.078	27.314.924.078
131111	Tanah	2.448.328.000	5.744.456.000
132111	Peralatan dan Mesin	24.896.708.027	24.896.708.027
133111	Gedung dan Bangunan	1.401.018.000	1.952.696.000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	2.124.822.969	2.124.822.969
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12.213.606.976)	(12.213.606.976)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(230.240.190)	(436.606.132)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	100.000.000	445.718.000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(100.000.000)	(227.244.418)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	(3.550.025.524)
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	18.111.000	0
Jumlah		45.760.064.908	46.051.842.024

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Saldo Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.000.577.834,00 Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung pada BPS tahun berjalan dalam bentuk uang/kas, barang, maupun jasa. Sedangkan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Saldo Pengesahan Hibah terdapat pada tabel berikut.

Tabel 125
Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung

No	Kode Wil	Nama Wilayah	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Pengesahan	Bentuk Hibah	Nilai Hibah Langsung (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	0199	Pusat	Settama BPS	UNICEF	2NZ4UCWA	Uang	1.781.778.000
				UNFPA	2NZ4UCWA	Uang	74.313.441
				PROSPERA	23TSVZA	Uang	6.002.097.115
2	0800	Sumatera Barat	BPS Kota Padang	Perorangan	2EXDWXBA	Barang	63.015.000
3	1500	Kalimantan Selatan	BPS Kota Banjarmasin	Pemkot Banjarmasin	22E5U7HA	Barang	233.243.330
4	1500	Kalimantan Selatan	BPS Kab. Hulu Sungai Selatan	Pemkab Hulu Sungai Selatan	2YDEPC3A	Tanah	2.061.170.000
5	1700	Sulawesi Utara	BPS Kab. Bolaang Mongondow	Pemkab Bolaang Mongondow	2RLH3HUA	Barang	25.938.930
6	2300	Nusa Tenggara Barat	BPS Prop. Nusa Tenggara Barat	Pemprov Nusa Tenggara Barat	2Z6KQ2WA	Barang	592.945.000
7	3500	Kalimantan Utara	BPS Kab. Nunukan	Pemkab Nunukan	2RJSJA9WA	Barang	57.150.000
8	0600	Aceh	BPS Kab. Aceh Barat Daya	Pemkab Aceh Barat Daya	2KNF76KA	Barang	38.177.018
9	2600	Bengkulu	BPS Kab. Kapahiang	Pemkab Kapahiang	2G3JEUQA	Barang	70.750.000
Jumlah							11.000.577.834

E.4.4 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp73.598.542,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung yang telah dilakukan pengesahan. Saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per 31 Desember 2024 berasal dari satker Settama yang merupakan pengembalian dana hibah ke donor. Saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung berasal dari satker Settama BPS, dengan rincian asal hibah adalah sebagai berikut:

1. UNFPA, sebesar Rp72.967.824,00.
2. UNICEF, sebesar Rp630.718,00.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.557.359.208,00. Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung pada BPS dalam bentuk kas, barang, maupun jasa atas hibah yang diterima pada tahun 2023 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah di tahun 2024. Rincian saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL terdapat pada tabel berikut.

Tabel 126
Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL

No.	Kode Wil.	Nama Wilayah	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Pengesahan	Objek Hibah	Nilai Hibah Langsung TAYL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1100	Sumatera Selatan	BPS Kota Lubuk Linggau	Pemkot Lubuk Linggau	2G6NPG3A	Tanah	1.521.694.208
2	1500	Kalimantan Selatan	BPS Kabupaten Balangan	Pemkab Balangan	2ZE995EA	Tanah	20.000.000
3	2400	Nusa Tenggara Timur	BPS Kabupaten Alor	Drs. Amon Djobo, M. A.P	2JZMWR2A	Tanah	15.665.000
Jumlah							1.557.359.208

Ekuitas Akhir
Rp5.239.814.986.644,00

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.239.814.986.644,00 dan Rp5.297.290.032.446,00.



F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Menindaklanjuti berdasarkan surat nomor B-167/01000/PW.110/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Monitoring penyelesaian tindak lanjut BPS terhadap temuan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan TA 2023. Temuan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Penatausahaan PNPB Sewa Rumah Dinas Belum Sepenuhnya Memadai,
2. Satker Terlambat Mengajukan Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara (BMN) kepada Pengelola Barang dan Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Sewa,
3. Pertanggungjawaban Belanja Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan,
4. Pertanggungjawaban Belanja Honor Output Kegiatan pada Kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dan Pendataan Lengkap KUMKM 2023 (PL-KUMKM) Tidak Sesuai Ketentuan,
5. Kekurangan Pengenaan Denda Keterlambatan pada Pengadaan Kalender Satker Sekretariat Utama,
6. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Teknologi Informasi DC dan DRC Tidak Sesuai Ketentuan,
7. Pengendalian atas Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Jasa *Outsourcing* Satuan Pengamanan dan Jasa Management Building pada Satker Sekretariat Utama BPS Belum Sepenuhnya Memadai,
8. Pengendalian atas Pelaksanaan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Satker Sekretariat Utama Belum Sepenuhnya Memadai,
9. Pengadaan Sewa *Personal Computer* (PC) atau Laptop Kegiatan Sensus Pertanian 2023 Tidak Sesuai Ketentuan,
10. Kekurangan Volume pada Paket Pekerjaan Pematangan Lahan BPS Kabupaten Bandung,
11. Kekurangan Volume dan Kekurangan Pengenaan Denda Keterlambatan pada Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Mesin,
12. Kekurangan Pengenaan Denda Keterlambatan sebesar Rp201,91 Juta dan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan pada Empat Satker BPS yang Mengalami Putus Kontrak sebesar Rp153,17 Juta,
13. Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan pada Badan Pusat Statistik Belum Sepenuhnya Tertib,
14. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Modal Lainnya pada Sekretariat Utama sebesar Rp15,26 Miliar yang Menghasilkan Peralatan dan mesin,
15. Penatausahaan Kas dan Setara kas Belum Sepenuhnya Tertib,
16. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib,



17. Penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) Belum Tertib,
18. Penatausahaan Dana yang Dibatasi Penatausahaan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Belum Sepenuhnya Tertib.

Daftar rencana tindak lanjut dan progress tindak lanjut terdapat dalam Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan.

F.2 REVISI DIPA

Selama periode 31 Desember 2024, BPS melakukan perubahan pagu sebanyak 7 (tujuh) kali melalui Direktorat Jenderal Anggaran. Nilai pagu dalam DIPA awal sebesar Rp4.766.584.916,00 dan setelah dilakukan revisi menjadi sebesar Rp4.774.186.692,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA Pertama terdapat pada 526 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-21/02000/PR.440/2024 tanggal 12 Januari 2024. Nilai pagu awal Rp4.766.584.916,00 menjadi Rp4.771.892.023,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
 1. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap:
 - a. Revisi pada program PPIS berupa pencantuman *Automatic Adjustment* (AA) pada kegiatan Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional.
 - b. Pergeseran antar KRO/RO pada Program DUKMAN.
 2. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah:
 - a. Perubahan anggaran yang bersumber dari PNBPN yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh K/L sebagai akibat adanya PNBPN yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman pada satker Sekretariat Utama BPS (018576) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 3. Revisi Administratif:
 - a. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) Satker;
 - b. Penyesuaian catatan halaman IV DIPA berupa pencantuman penandaan blokir *Automatic Adjustment* serta pembukaan blokir karena telah ada kelengkapan dokumen.
2. Revisi DIPA Kedua terdapat pada 528 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-212/ 02000/PR.440/2024 tanggal 2 April 2024. Nilai pagu sebelum dan sesudah revisi sebesar Rp4.771.892.023,00 menjadi Rp4.771.892.023,00. Revisi DIPA dilakukan karena:
 1. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap:
 - a. Revisi pergeseran antar KRO dan RO pada kegiatan Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional pada Program PPIS,
 - b. Revisi pergeseran antar KRO dan RO pada Program DUKMAN,



pergeseran belanja 52 ke 53

2. Revisi administratif:
 - a. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Satker,
 - b. Perubahan catatan Halaman IV.A yaitu pembukaan blokir karena telah ada kelengkapan dokumen,
 - c. Perubahan catatan Halaman IV.B yaitu untuk pencatatan pembiayaan tunggakan,
 - d. 528 satuan kerja.
3. Revisi DIPA ketiga terdapat pada 1 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-293/02100/PR.440/2024 tanggal 17 Mei 2024. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp4.771.892.023,00 menjadi Rp4.774.186.692,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
 1. Revisi anggaran dalam hal pagu tetap:
 - a. Revisi pada program PPIS berupa pencantuman Automatic Adjustment pada kegiatan Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional,
 - b. Pergeseran antar KRO/RO pada Program DUKMAN.
 2. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah pada program Dukungan Manajemen dengan rincian:
 - a. Terdapat penambahan anggaran di satker Sekretariat Utama yang bersumber dari PNBPN yang bersumber dari penerimaan klaim asuransi BMN dengan target penerimaan sebesar Rp 2.294.669.000,- dan dengan pagu penggunaan sebesar Rp 2.294.669.000,-.
 3. Revisi Administratif:
 - a. Penyesuaian RPD Halaman III DIPA Satker,
 - b. Penyesuaian catatan halaman IV DIPA berupa pencantuman penandaan blokir AA serta pembukaan blokir karena telah ada kelengkapan dokumen.
4. Revisi DIPA keempat terdapat pada 527 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-505/02100/PR.450/2024 tanggal 8 Agustus 2024. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp4.774.16.692,00 menjadi Rp4.774.186.692,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
 1. Revisi anggaran dalam hal pagu tetap dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Revisi pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.GG) dengan rincian:
 - i. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO baik pada kegiatan Prioritas Nasional maupun non Prioritas Nasional;
 - ii. Pengurangan anggaran dalam rangka realokasi belanja barang (52) dari Program PPIS ke Program Dukungan Manajemen untuk pemenuhan belanja operasional sebesar Rp.40.499.695.000,-.



- b. Revisi pada Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) dengan rincian:
 - i. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO;
 - ii. Penambahan anggaran dalam rangka realokasi belanja barang (52) dari Program PPIS ke Program Dukungan Manajemen untuk pemenuhan belanja operasional sebesar Rp.40.499.695.000,- ;
 - iii. Realokasi belanja modal (53).
2. Revisi administratif dengan rincian:
 - a. Terdapat penambahan anggaran di satker Sekretariat Utama yang bersumber dari PNBPN yang bersumber dari penerimaan klaim asuransi BMN dengan target penerimaan sebesar Rp 2.294.669.000,- dan dengan pagu penggunaan sebesar Rp 2.294.669.000,-.
 - a) Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Satker;
 - b) Perubahan catatan Halaman IV.A DIPA yaitu:
 - 1) Pembukaan blokir pada Program PPIS karena telah ada persetujuan pembukaan blokir automatic adjustment BPS TA 2024; dan
 - 2) Pembukaan blokir pada Program Dukungan Manajemen karena telah ada kelengkapan dokumen; dan
 - c) Satker: 527 Satker.
5. Revisi DIPA kelima terdapat pada 526 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-722/02000/PR.440/2024 tanggal 11 September 2024. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp4.774.186.692,00 menjadi Rp4.774.186.692,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
 1. Revisi anggaran dalam hal pagu tetap dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Revisi pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.GG) dengan rincian:
 - i. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO baik pada kegiatan Prioritas Nasional maupun non Prioritas Nasional;
 - ii. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran belanja barang (52) ke belanja modal (53).
 - b. Revisi pada Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) dengan rincian:
 - i. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO;
 - ii. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran belanja barang (52) ke belanja modal (53).
 2. Revisi administratif dengan rincian:
 - a. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Satker;
 - b. Perubahan catatan Halaman IV.A DIPA yaitu penambahan catatan

blokir pada Program PPIS dikarenakan belum tersedianya kelengkapan dokumen; dan

c. Satker: 526 Satker.

6. Revisi DIPA keenam terdapat pada 1 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-872/02000/PR.450/2024 tanggal 22 Oktober 2024. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp4.774.186.692,00 menjadi Rp4.774.186.692,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
 - a. Tema revisi: Perubahan anggaran dalam revisi administrasi.
 - b. Tata cara revisi:

Revisi administratif dengan rincian:

- a) Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Satker;
- b) Perubahan catatan Halaman IV.A DIPA yaitu pembukaan blokir karena telah ada kelengkapan dokumen; dan
- c) Satker: 1 Satker.

7. Revisi DIPA ketujuh terdapat pada 526 satuan kerja berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-896/02000/PR.440/2024 tanggal 28 Oktober 2024. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp4.774.186.692,00 menjadi Rp4.774.186.692,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:

- a. Tema revisi: Perubahan rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi.
- b. Tata cara revisi:

1. Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Revisi pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (054.01.GG) dengan rincian:

- i. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO baik pada kegiatan Prioritas Nasional maupun non Prioritas Nasional;

- ii. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar jenis belanja dari belanja barang (52) ke belanja modal (53);

- iii. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran belanja modal (53);

- b) Revisi pada Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) dengan rincian:

- i. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO;

- ii. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar jenis belanja dari belanja pegawai (51) ke belanja modal (53);

- iii. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran belanja pegawai (51);

2. Revisi administratif dengan rincian:

- a) Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Satker;

- b) Satker: 526 Satker.

F.3 REKENING BPS

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga bahwa setiap satuan kerja wajib melaporkan pengelolaan rekening setiap semesteran.

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Rekening Milik Satuan Kerja/Lingkup Kementerian Negara/Lembaga antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan dengan Badan Pusat Statistik dengan jumlah rekening giro milik BPS sebanyak 547 rekening yang dirinci sebagai berikut:

- a. Rekening Bendahara Pengeluaran sebanyak 542 buah.
- b. Rekening Bendahara Penerimaan sebanyak 3 buah.
- c. Rekening Lainnya sebanyak 2 buah.

Daftar rekening aktif terdapat dalam Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan.

F.4 KERJA SAMA SWAKELOLA TIPE I

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, Badan Pusat Statistik melakukan kerja sama Swakelola Tipe I sebanyak 14 kegiatan dengan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah/Dinas terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127
Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe I

No.	Nama Satker	Jumlah Kegiatan	Mitra Kerja Sama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Settama BPS	10	BPOM, Kemenag, OJK, KPPPA, BI, Kemenkomarves, Kemenkes, Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Kemhub, dan Kemenperin
2	BPS Daerah	4	Kab. Bengkalis (1), Kab. Badung (2), Prov. Papua Barat (1)
Jumlah		14	

Tabel 128
Rincian Kerjasama Swakelola Tipe I (Settama BPS)
T.A. 2024



NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN KERJASAMA	MITRA KERJASAMA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dukungan Pelaksanaan Survei Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Tahun 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
2.	Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah/ 2024 Masehi	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
3.	Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024	Otoritas Jasa Keuangan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.	Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2024	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
5.	Pemanfaatan dan Peningkatan Kualitas Data Harga	Bank Indonesia (BI)	Direktorat Statistik Harga
6.	Penyusunan PDB Maritim	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenkomarves)	Direktorat Neraca Produksi
7.	Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
8.	Persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025	Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
9.	Pelaksanaan Survei Potensi Pergerakan Masyarakat yang melakukan perjalanan untuk penyusunan rencana operasi angkutan lebaran dan angkutan natal tahun baru	Kementerian Perhubungan	Direktorat Sistem Informasi Statistik
10.	Penyusunan Produk Domestik Bruto Sektor Industri	Kementerian Perindustrian	Direktorat Neraca Produksi

Tabel 129
Rincian Kerjasama Swakelola Tipe I (Daerah)
T.A. 2024

No.	Nama Satker	Jumlah Kegiatan	Nama kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Bengkalis	1	Penghitungan Indeks Harga Konsumen
2	Kab. Badung	2	1. Survey nilai tukar usaha pertanian di kabupaten badung tahun 2024 2. Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2024
3	Prov. Papua Barat	1	Survei Ongkos Angkut Beras ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya
Jumlah		4	



F.5 KERJA SAMA SWAKELOLA TIPE II DENGAN MEKANISME PNBP

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, Badan Pusat Statistik melakukan kerja sama Swakelola Tipe II dengan mekanisme PNBP sebanyak 2 kegiatan. Nilai kerjasama berdasarkan PKS yang telah disepakati kedua belah pihak sebesar Rp7.270.517.000,00.

Tabel 130
Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-PNBP
Berdasarkan Nilai PKS

dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Kerja sama	Non APBN BPS (Rp)	APBN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Settama BPS	1	5.706.567.000	0	5.706.567.000
Polstat STIS	1	1.563.950.000	0	1.563.950.000
Jumlah	2	7.270.517.000	0	7.270.517.000

Tabel 131
Rincian Nilai Kerjasama Swakelola Tipe II (Settama BPS)
T.A. 2024

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN KERJASAMA	MITRA KERJA SAMA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	NILAI KERJASAMA (PKS) (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	5.706.567.000	Non-APBN BPS
Jumlah				5.706.567.000	

Tabel 132
Rincian Nilai Kerjasama Swakelola Tipe II (Polstat STIS)
T.A. 2024

No.	Nama Satker	Jumlah Kegiatan	Nama kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Politeknik Statistika STIS	1	Biaya pendidikan mahasiswa tugas belajar dari Negara Demokratik Timor Leste
Jumlah		1	

Anggaran kerja sama yang berasal dari Non APBN BPS sebesar Rp7.270.517.000,00 dan total realisasi BPS sebesar Rp4.177.396.745,00 atau 57,45 persen. Sumber dana kerja sama dengan mekanisme PNBP berasal dari Non APBN BPS. Rincian jenis dan jumlah kerja sama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 133
Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-PNBP
Berdasarkan Anggaran dan Realisasi

dalam Rupiah



Uraian	Jumlah Kerja Sama	Non APBN BPS (Rp)	APBN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Settama	1			
Anggaran		5.706.567.000	0	5.706.567.000
Realisasi		3.844.946.745	0	3.844.946.745
Saldo		1.861.620.255	0	1.861.620.255
Persentase realisasi		67,37	0,00	67,37
Pusdiklat BPS	0			
Anggaran		0	0	0
Realisasi		0	0	0
Saldo		0	0	0
Persentase realisasi		0	0,00	0
Polstat STIS	1			
Anggaran		1.563.950.000	0	1.563.950.000
Realisasi		332.450.000	0	332.450.000
Saldo		1.231.500.000	0	1.231.500.000
Persentase realisasi		21,25	0,00	21,25
Total Pusat	2			
Anggaran		7.270.517.000	0	7.270.517.000
Realisasi		4.177.396.745	0	4.177.396.745
Saldo		3.093.120.255	0	3.093.120.255
Persentase realisasi		57,45	0,00	57,45
BPS Daerah		0	0	0
Anggaran		0	0	0
Realisasi		0	0	0
Saldo		0	0	0
Persentase realisasi		0	0,00	0
Total Pusat & Daerah				
Anggaran		7.270.517.000	0	7.270.517.000
Realisasi		4.177.396.745	0	4.177.396.745
Saldo	2	3.093.120.255	0	3.093.120.255
Persentase realisasi		57,45	0,00	57,45

A. Kerjasama PNBP-Non APBN BPS

Kerjasama mekanisme PNBP yang dibiayai dari Non APBN BPS adalah kerjasama dimana sumber pembiayaan kegiatannya berasal dari mitra kerja sama. Anggaran PNBP yang sudah tercatat dalam DIPA BPS sebesar Rp7.270.517.000,00 dan realisasi tercatat sebesar Rp2.504.327.927,00 atau 34,44 persen. Saldo sebesar Rp4.766.189.073,00 terdapat pada BUN. Rincian jenis dan nilai kerjasama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 134
Rekapitulasi Kerja Sama PNBP-Non APBN BPS

dalam Rupiah

Satker/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Saldo
-----------------	----------	-----------	-------

		(Rp)	(Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)
BPS Pusat				
Settama				
1	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat			
	Pelaksanaan SNLIK tahun 2024	5.706.567.000	3.844.946.745	1.861.620.255
Pusdiklat				
	-	0	0	0
Polstat STIS				
1	Pelaksanaan Program Sarjana Terapan Bidang Statistika Dan Sarjana terapan Bidang Komputasi Statistik Di Politeknik Statistika STIS Mulai Tahun Akademik 2023/2024	1.563.950.000	332.450.000	1.231.500.000
BPS Provinsi				
	-	0	0	0
Jumlah		7.270.517.000	4.177.396.3745	3.093.120.255

B. Kerjasama PNBP- APBN BPS

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, Badan Pusat Statistik tidak melakukan kerja sama Swakelola Tipe II dengan mekanisme PNBP yang bersumber dari APBN BPS.

F.6 KERJA SAMA SWAKELOLA TIPE II DENGAN MEKANISME RPL

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, Badan Pusat Statistik tidak melakukan kerja sama Swakelola Tipe II dengan mekanisme RPL.

F.7 HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

Badan Pusat Statistik menjalin kerja sama dengan pihak lain melalui mekanisme Hibah Langsung Dalam Negeri baik sebagai penerima Hibah dari mitra kerja sama dan pemberi Hibah kepada mitra kerja sama dengan nilai sebesar Rp8.208.695.617,00 dalam bentuk barang.

- A. BPS sebagai pihak yang menerima hibah barang dari Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp4.699.748.486,00. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 135
Rincian Hibah dari Pemerintah Daerah ke BPS

No	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Nilai (Rp)	Keterangan
----	--------	-------	------------------	------------	------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	Kepala BPS Kabupaten Aceh Barat Daya	38.177.018	
2.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Perorangan	Plt. Kepala BPS	63.015.000	
3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	Plt. Kepala BPS	211.907.000	
4.	Bangunan Geung Kantor Permanen	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	Plt. Kepala BPS	947.834.944	
5.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	Plt. Kepala BPS	361.952.264	
6.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Pemerintah Kota Banjarmasin	Plt. Kepala BPS	233.243.330	
7.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Plt. Kepala BPS	2.061.170.000	
8.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pemerintah Kabupaten Balangan	Kepala BPS Kabupaten Balangan	20.000.000	
9.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permane	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	Plt. Kepala BPS	25.438.930	
10.	Kipas Angin	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	Plt. Kepala BPS	500.000	
11.	Sound System	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Plt. Kepala BPS	3.345.000	
12.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Plt. Kepala BPS	580.000.000	
13.	A.C. Split	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Plt. Kepala BPS	9.600.000	
14.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Pemerintah Kabupaten Alor	Kepala BPS Kabupaten Alor	15.665.000	
15.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permane	Pemerintah Kabupaten Kapahiang	Plt. Kepala BPS	70.750.000	
16.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Pemerintah Kabupaten Nunukan	Plt. Kepala BPS	57.150.000	
Jumlah				4.699.748.486	

B. BPS sebagai pihak yang menghibahkan barang kepada Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp3.508.947.131,00 berupa tanah, gudang kantor permanen, dan pagar permanen. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 136
Rincian Hibah dari BPS ke Pemerintah Daerah

No	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Nilai (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Plt. Kepala BPS	386.274.000	
2.	Tanah Rawa	Pemerintah Kota Palembang	Plt. Kepala BPS	1.567.177.840	
3.	Pagar Permanen	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Plt. Kepala BPS	258.264.291	
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Plt. Kepala BPS	948.235.000	
5.	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Plt. Kepala BPS	348.996.000	
Jumlah				3.508.947.131	

F.8 HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI

Pada periode T.A. 2024 Satker Settama BPS melakukan kerja sama dalam bentuk hibah uang dan jasa. Kerja sama dalam bentuk hibah luar negeri dalam bentuk uang dan jasa tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 137
Rincian Hibah Langsung Luar Negeri (Bentuk Uang)
Tahunan T.A. 2024

No	Donor	No. Register	Dana Dalam DIPA (Rp)	Saldo Awal Hibah (Rp)	Pendapatan Hibah s.d. 31 Des. 2024 (Rp)	SP2HL/MPH L-BJS (Rp)	SP4HL (Rp)	Saldo Sisa Dana Hibah (Rp)	Penanggung Jawab Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)-(7+8)	(10)
1.	UNFPA	2NZ4UCWA	1.097.568.000	0	1.099.742.506	1.090.539.895	9.202.611	0	Direktorat Statistik Kependudukan dan Tenaga Kerja
2.	UNICEF	2PG3K7NA	1.788.744.000	0	1.781.778.000	1.716.010.160	65.767.840	0	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Hibah Uang			2.886.312.000	0	2.881.520.506	2.806.550.055	74.970.451	0	
3.	UNFPA	2NZ4UCWA	0	0	29.589.483	29.589.483	0	0	Direktorat Statistik Kependudukan dan Tenaga Kerja
4.	PROSPERA	23TSVZA	0	0	6.002.097.115	6.002.097.115	0	0	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum
Jumlah Hibah Uang			0	0	6.031.686.598	6.031.686.598	0	0	

Sedangkan untuk rincian dokumen pengesahan dan pengembalian dapat dilihat sebagai berikut:



No	Donor	Nomor Register	Daftar Rincian						Keterangan
			SP2HL			SP3HL/MPHL-BJS			
			Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	UNFPA	2NZ4UCWA	03828T	31-12-2024	1.625.544.134	03850T	31-12-2024	72.967.824	Hibah Uang
2.	UNICEF	2PG3K7NA	03813T	31-12-2024	127.359.282	03843T	31-12-2024	630.718	Hibah Uang
						Jumlah SP3HL		73.598.542	
3.	UNFPA	2NZ4UCWA	-	-	-	03852A	31-12-2024	29.589.483	Hibah Jasa
4.	PROSPERA	23TSV7CA	-	-	-	03853A	31-12-2024	6.002.097.115	Hibah Jasa
						Jumlah MPHL-BJS		6.031.686.598	
Jumlah SP2HL					1.752.903.416	Jumlah SP3HL dan MPHL-BJS		6.105.285.140	

Rincian Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) adalah sebagai berikut:

1) **United Nations Population Fund (UNFPA) per 31 Desember 2024.**

- Nama Hibah: UNFPA siklus ke-10 (Tahun 2021-2025).
- Nomor Naskah Perjanjian Hibah (NPH): Perjanjian Mitra Pelaksana antara BPS dan UNFPA tanggal 21 Januari 2021.
- Nomor register: 2NZ4UCWA sesuai surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen nomor S-188/PR.8/2021 tanggal 15 Februari 2021.
- Tanggal Penandatanganan NPH: 21 Januari 2021.
- Tanggal Efektif NPH: 1 Januari 2021.
- Tanggal Penutupan NPH: 31 Desember 2025.
- Nomor rekening RPL 140 PDHL BPS untuk 2NZ4UCWA.
- Nilai Hibah sebesar Rp1.756.647.964,00
- Saldo awal sebesar Rp0,00.
- Pendapatan sebesar Rp1.698.511.958,00 sudah dilakukan Revisi DIPA sesuai Surat Pengesahan DIPA Petikan T.A. 2024 pada Revisi ke 12 tanggal 9 Desember 2024 dan sudah dilakukan pengesahan pendapatan sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 03828T Tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.698.511.958,00.
- Belanja sebesar Rp1.625.544.134,00 sudah dilakukan pengesahan belanja sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 03828A tanggal 31 Desember 2024.
- *Refund* sebesar Rp72.967.824,00 dan sudah dilakukan pengesahan *Refund* sesuai Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) nomor 03850T Tanggal 31 Desember 2024.



- Saldo sisa dana hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00
- Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Digunakan untuk kegiatan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan UNFPA 2021-2025, sesuai surat perjanjian hibah tanggal 21 Januari 2021 dan sesuai Annual Workplan (AWP) tahun 2024 IDN10PDA tanggal 1 Januari 2024 dan terdapat revisi AWP yang merubah nilai hibah sebelumnya di awal Rp868.970.000,00 menjadi Rp1.756.647.964,00.
- Kegiatan yang difokuskan pada Program-Program Dinamika Kependudukan dan Analisis Data yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data kependudukan yang berkualitas dan analisis keterkaitannya dengan kebijakan dan program nasional.
- Dukungan pada tahun 2024 berfokus terhadap pemanfaatan hasil LF SP2020 untuk analisis keberagaman suku dan disabilitas serta penyusunan life table. Selain itu, dalam persiapan SUPAS 2025 dengan uji coba aplikasi FASIH ke lapangan, penyusunan kuesioner kematian maternal, dan pengembangan dynamic weighting untuk monitoring dan evaluasi hasil data SUPAS 2025. Dukungan juga diberikan untuk koordinasi dan pengembangan SDMI dengan Kementerian/Lembaga terpilih, serta penyusunan laporan dan analisis ketimpangan statistik hayati.

2) United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) per 31 Desember 2024.

- Nama Hibah: Country Program Action's Fund 2021-2025
- Nomor register 2PG3K7NA (sesuai surat DJPPR nomor S-469/PR.8/2021).
- Tanggal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH): 5 Maret 2021.
- Tanggal Efektif NPH: 5 Maret 2021.
- Tanggal Penutupan NPH: 31 Desember 2025.
- Nilai hibah sebesar 400.000 USD.
- Nomor rekening RPL 140 PDHL SETAMA BPS untuk 2PG3K7NA.
- Saldo awal sebesar Rp0,00.
- Pendapatan sebesar Rp127.990.000,00 sudah dilakukan Revisi DIPA sesuai Surat Pengesahan DIPA Petikan T.A. 2024 pada Revisi ke 12 tanggal 9 Desember 2024 dan sudah dilakukan pengesahan pendapatan sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 03813T tanggal 31 Desember 2024.

- Belanja sebesar Rp127.359.282,00 sudah dilakukan pengesahan belanja sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 03813T tanggal 31 Desember 2024.
- *Refund* sebesar Rp630.718,00 kepada UNICEF dan sudah dilakukan pengesahan *Refund* sesuai Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) nomor 03843T tanggal 31 Desember 2024.
- Saldo sisa dana hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00
- Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.
- Digunakan untuk kegiatan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF 2021-2025, sesuai *Country Programme Action Plan* (CPAP) 2021-2025 tanggal 23 Desember 2020 dan sesuai *Programme Document* (ProDoc) 2021-2025 tanggal 5 Maret 2021, yaitu untuk kegiatan Peningkatan penggunaan data statistik oleh pemangku kebijakan terutama untuk perencanaan dan monitoring kebijakan yang terkait tentang anak dengan menggunakan hasil survei rumah tangga, sensus, dan big data.
- Output Tahun 2024 meliputi berupa Analisis Data Praktik Pemberian Makanan pada Anak berdasarkan hasil Susenas Maret 2022-2024.

Selain itu Satker Sekretariat Utama menerima hibah dalam bentuk Jasa dari:

1. ***United Nations Population Fund (UNFPA) per 31 Desember 2024.***

- Nama Hibah: UNFPA Siklus ke-10 (Tahun 2021-2025)
- Nomor Naskah Perjanjian Hibah (NPH): Perjanjian Mitra Pelaksana antara BPS dan UNFPA tanggal 21 Januari 2021.
- Nomor register: 2NZ4UCWA, sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Nomor: S-188/PR.8/2021 tanggal 15 Februari 2021.
- Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung tanpa melalui KPPN (SPTMHL) nomor B-1014/02200/KU.300/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah berupa jasa pelaksanaan program UNFPA Siklus ke-10 nomor 298/PDA/12-20234 tanggal 30 Desember 2024.
- Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Jasa sesuai nomor B-1015/02200/KU.300/2024 tanggal 31 Desember 2024.



- Berupa Hibah Langsung dalam bentuk jasa sebesar 1.880,51 (USD) atau IDR 29.589.483,00 dan telah disahkan sesuai Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Jasa nomor 03852A tanggal 31 Desember 2024.
- Digunakan untuk membiayai kegiatan Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Program Tahun 2024.
- Output berupa pendampingan Workshop Panduan Teknis Penyusunan dan Produksi Data Statistik Vital Nasional, Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Kesehatan dan Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Vital, Workshop Teknis Pengembangan Instrumen Verifikasi Kematian Ibu pada Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, Evaluasi Pilot Survei Penduduk Antar Sensus 2025 dan Wawancara Verifikasi Lapangan Kematian Ibu dan Kejadian Fertilitas Remaja pada Pilot Survei Penduduk Antar Sensus.

2. Hibah dalam bentuk Jasa dari Kedutaan Australia, *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) yaitu:

- Nama Hibah: *Australia Indonesia Partnership for Economic Development* (PROSPERA).
- Nomor Naskah Perjanjian Hibah (NPH): SA.04.12.2017 tanggal 4 Desember 2017.
- Nomor register: 23TSV7CA, sesuai surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Nomor : S-262/PR.8/2023 tanggal 5 April 2023.
- Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung tanpa melalui KPPN (SPTMHL) nomor B-1019/02200/KU.300/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- Penanggung jawab kegiatan adalah Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.
- Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah berupa jasa pelaksanaan program PROSPERA nomor B-66a/02100/KU.700/2024 tanggal 2 Desember 2024.
- Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Jasa sesuai surat nomor B-1020/02200/KU.300/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- Berupa Hibah Langsung dalam bentuk jasa sebesar AUD567.252,35 atau IDR 6.002.097.115,35 dan telah disahkan sesuai Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Jasa nomor 03853A tanggal 31 Desember 2024.
- Digunakan untuk membiayai kegiatan *Advisory* dan *Australian Public Service*.
- Output kegiatan adalah meningkatkan pendekatan yang menggunakan bukti sebagai dasar pengambil kebijakan yang lebih baik, memperkuat sistem penyediaan data dan kemampuan statistic, memperbaiki penggunaan data administrasi, standarisasi infrastruktur statistik, meningkatkan kolaborasi



internal dan eksternal, berbagi ilmu dan wawasan, peningkatan keamanan dan privasi data dan statistic, mengurangi beban responden, integrasi bisnis proses, memperbaiki tata kelola, manajemen risiko dan penjaminan kualitas, dan serta membina kerjasama yang efektif.

Dokumen hibah tersebut di atas terlampir pada Lampiran Pendukung II Laporan Keuangan.

F.9 PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Badan pusat Statistik terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target serta Realisasi Pencapaian Output dari masing-masing PN adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional I – Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya Prioritas Nasional I diantaranya melalui 1 Program Prioritas, 9 kegiatan Prioritas, yang tersebar di 526 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp486.048.439.000,00 dan realisasi sebesar Rp322.065.766.871,00 (66,26 persen) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 138
Rincian Output Prioritas Nasional I

Program/ Kegiatan Prioritas	Kode dan Nama RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% realisasi anggaran	Satuan	Target	Capaian Output	% Capaian Output
GG.2898	008 PUBLIKASI/LAPORAN PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB	6,509,831,000	5,798,320,237	89.07	layanan	526	525	99.81
GG.2899	009 PUBLIKASI/ LAPORAN NERACA SATELIT PARIWISATA NASIONAL (TSA)	373,833,000	234,335,378	62.68	layanan	1	1	100.00
GG.2902	006 PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS EKONOMI 2026	24,055,061,000	22,048,626,425	91.66	layanan	526	526	100.00
GG.2908	006 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK WISATAWAN NUSANTARA	26,315,491,000	26,292,801,353	99.91	layanan	1	1	100.00
GG.2908	007 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK WISATAWAN MANCANEGERA	4,048,327,000	3,779,862,274	93.37	layanan	35	35	100.00
GG.2908	009 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK E-COMMERCE	16,017,539,000	15,014,487,590	93.74	layanan	394	394	100.00
GG.2910	006 PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS PERTANIAN	283,233,818,000	133,781,628,415	47.23	layanan	526	526	100.00
GG.2910	007 PUBLIKASI/	56,217,157,000	50,283,066,463	89.44	layanan	526	526	100.00

	LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN							
GG.2910	010 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA	69.277.382.000	64.832.638.736	93.58	layanan	514	514	100.00
Total PN		486.048.439.000	322.065.766.871	66.26	layanan	3,049	3,048	99.97

F.10 PENGUNGKAPAN CAPAIAN OUTPUT

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Badan Pusat Statistik (BPS) periode 31 Desember Tahun 2024 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan Program Dukungan Manajemen yang tersebar di 526 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp4.776.013.194.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.338.995.531.817,00 (90,85 persen) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 139
Rincian Capaian Output

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1,342,680,795,000	1,036,958,529,091	77.23					
GG.2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	3,239,198,000	1,963,758,657	60.62					
GG.2896.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektoral Pengembangan Dan Analisis	305,387,000	234,755,000	76.87	1	1	Lembaga	100.00	
GG.2896.BMA.004	Publikasi/Laporan Analisis Dan Pengembangan Statistik	2,865,874,000	1,710,720,292	59.69	524	524	layanan	100.00	
GG.2896.BMA.U01	Publikasi/ Laporan Indeks Pembangunan Manusia	67,937,000	18,283,365	26.91	1	1	layanan	100.00	
GG.2897	Pelayanan Dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	48,620,493,000	37,092,820,884	76.29					
GG.2897.BDB.003	Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (Ssn)	16,138,016,000	14,398,407,520	89.22	526	526	Lembaga	100.00	
GG.2897.BMA.004	Laporan Diseminasi Dan Metadata Statistik	32,482,477,000	22,694,413,364	69.87	527	527	layanan	100.00	
GG.2898	Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	31,088,360,000	26,415,483,878	84.97					

GG.2898.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektor Neraca Pengeluaran	301,780,000	300,578,000	99.60	1	1	Lembaga	100.00	
GG.2898.BMA.007	Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran	24,276,749,000	20,316,585,641	83.69	536	536	layanan	100.00	
GG.2898.QMA.008	Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi Pmtb	6,509,831,000	5,798,320,237	89.07	526	525	layanan	99.81	
GG.2899	Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	35,666,231,000	31,208,180,950	87.50					
GG.2899.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektor Neraca Produksi	305,387,000	288,277,000	94.40	1	1	Lembaga	100.00	
GG.2899.BMA.006	Publikasi/Laporan Neraca Produksi	34,987,011,000	30,685,568,572	87.71	529	529	layanan	100.00	
GG.2899.QMA.009	Publikasi/ Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Tsa)	373,833,000	234,335,378	62.68	1	1	layanan	100.00	
GG.2900	Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei	5,534,046,000	4,998,891,072	90.33					
GG.2900.BMA.005	Dokumen, Laporan, Dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei	5,534,046,000	4,998,891,072	90.33	527	526	layanan	99.81	
GG.2901	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	48,419,666,000	47,246,919,257	97.58					
GG.2901.BMA.002	Data Yang Dipertukarkan Dengan K/L Lain	1,900,836,000	1,466,966,557	77.17	1	1	layanan	100.00	
GG.2901.CAN.004	Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	46,518,830,000	45,779,952,700	98.41	212	212	Unit	100.00	
GG.2902	Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Distribusi	43,412,876,000	28,373,862,506	65.36					
GG.2902.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektor Distribusi	296,946,000	290,996,000	98.00	1	1	Lembaga	100.00	
GG.2902.BMA.004	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	19,060,869,000	6,034,240,081	31.66	534	534	layanan	100.00	
GG.2902.QMA.006	Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2026	24,055,061,000	22,048,626,425	91.66	526	526	layanan	100.00	
GG.2903	Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Harga	97,427,806,000	60,730,559,830	62.33					
GG.2903.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektor Harga	301,378,000	297,250,000	98.63	1	1	Lembaga	100.00	
GG.2903.BMA.009	Publikasi/Laporan Statistik Harga	97,126,428,000	60,433,309,830	62.22	539	539	layanan	100.00	
GG.2904	Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian,	51,499,242,000	32,268,753,963	62.66	540	540		100.00	

	Energi, Dan Konstruksi								
GG.2904.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektoral Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi Dan Konstruksi	303,785,000	303,010,934	99.75	1	1	Lembaga	100.00	
GG.2904.BMA.006	Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian, Energi, Dan Konstruksi	51,195,457,000	31,965,743,029	62.44	539	539	layanan	100.00	
GG.2905	Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan	111,177,102,000	104,293,241,543	93.81					
GG.2905.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektoral Kependudukan Dan Ketenagakerjaan	328,378,000	252,460,000	76.88	1	1	Lembaga	100.00	
GG.2905.BMA.004	Publikasi/Laporan Sakernas	107,389,961,000	102,967,211,908	95.88	530	530	layanan	100.00	
GG.2905.BMA.005	Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan	3,458,763,000	1,073,569,635	31.04	16	16	layanan	100.00	
GG.2906	Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	243,785,213,000	234,684,178,342	96.27					
GG.2906.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektoral Kesejahteraan Rakyat	313,345,000	282,279,190	90.09	1	1	Lembaga	100.00	
GG.2906.BMA.003	Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	1,078,061,000	911,825,678	84.58	5	5	layanan	100.00	
GG.2906.BMA.006	Publikasi/Laporan Susenas	242,393,807,000	233,490,073,474	96.33	536	536	layanan	100.00	
GG.2907	Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	92,543,229,000	88,359,411,336	95.48					
GG.2907.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektoral Ketahanan Sosial	304,245,000	279,805,000	91.97	1	1	Lembaga	100.00	
GG.2907.BMA.006	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	6,879,736,000	6,179,963,516	89.83	525	525	layanan	100.00	
GG.2907.BMA.008	Publikasi/Laporan Pendataan Podes	85,359,248,000	81,899,642,820	95.95	526	526	layanan	100.00	
GG.2908	Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata	86,238,045,000	80,842,258,596	93.74					



GG.2908.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektoral Keuangan, Teknologi Informasi Dan Pariwisata	310,011,000	297,700,000	96.03	1	1	Lembaga	100.00	
GG.2908.BMA.004	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata	39,546,677,000	35,457,407,379	89.66	538	538	layanan	100.00	
GG.2908.QMA.006	Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara	26,315,491,000	26,292,801,353	99.91	1	1	layanan	100.00	
GG.2908.QMA.007	Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara	4,048,327,000	3,779,862,274	93.37	35	35	layanan	100.00	
GG.2908.QMA.009	Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce	16,017,539,000	15,014,487,590	93.74	394	394	layanan	100.00	
GG.2909	Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan	4,589,130,000	3,556,878,215	77.51					
GG.2909.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektoral Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan	303,785,000	278,042,900	91.53	1	1	Lembaga	100.00	
GG.2909.BMA.005	Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan Yang Terbit Tepat Waktu	4,285,345,000	3,278,835,315	76.51	530	530	layanan	100.00	
GG.2910	Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	439,440,158,000	254,923,330,062	58.01					
GG.2910.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektoral Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	303,785,000	302,036,151	99.42	1	1	Lembaga	100.00	
GG.2910.BMA.008	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan	30,408,016,000	5,723,960,297	18.82	526	525	layanan	99.81	
GG.2910.QMA.006	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	283,233,818,000	133,781,628,415	47.23	526	526	layanan	100.00	
GG.2910.QMA.007	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan	56,217,157,000	50,283,066,463	89.44	526	526	layanan	100.00	
GG.2910.QMA.010	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area	69,277,382,000	64,832,638,736	93.58	514	514	layanan	100.00	

WA	Program Dukungan Manajemen	3,433,332,399,000	3,302,037,002,726	96.18					
WA.2881	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	10,769,223,000	9,311,158,082	86.46					
WA.2881.EBD.1A5	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I	333,567,000	219,721,190	65.87	1	1	Dokumen	100.00	
WA.2881.EBD.2A5	Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I	122,801,000	105,617,053	86.01	1	1	Dokumen	100.00	
WA.2881.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	735,015,000	644,062,047	87.63	2	2	Dokumen	100.00	
WA.2881.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	101,297,000	72,425,915	71.50	1	1	Dokumen	100.00	
WA.2881.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	9,476,543,000	8,269,331,877	87.26	1	1	Dokumen	100.00	
WA.2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	10,886,407,000	3,796,261,651	34.87					
WA.2882.EBA.957	Layanan Hukum	246,082,000	131,601,604	53.48	2	2	layanan	100.00	
WA.2882.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	903,824,000	571,286,514	63.21	1	1	layanan	100.00	
WA.2882.EBA.959	Layanan Protokoler	2,012,646,000	1,544,629,261	76.75	1	1	layanan	100.00	
WA.2882.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7,320,804,000	1,211,754,116	16.55	1	1	layanan	100.00	
WA.2882.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	403,051,000	336,990,156	83.61	33	33	layanan	100.00	
WA.2883	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	7,542,293,000	5,611,004,382	74.39					
WA.2883.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	7,542,293,000	5,611,004,382	74.39	4	4	layanan	100.00	
WA.2884	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	270,553,201,000	267,769,819,411	98.97					
WA.2884.EBA.994	Layanan Perkantoran	264,097,720,000	262,709,052,463	99.47	1	1	layanan	100.00	
WA.2884.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	6,455,481,000	5,060,766,948	78.39	34	34	Dokumen	100.00	
WA.2885	Dukungan Manajemen BPS Lainnya	124,121,114,000	111,623,577,983	89.93					
WA.2885.EBA.956	Layanan BMN	68,309,000	62,424,240	91.39	1	1	layanan	100.00	
WA.2885.EBA.962	Layanan Umum	8,851,351,000	5,352,036,408	60.47	1	1	layanan	100.00	
WA.2885.EBA.994	Layanan Perkantoran	106,685,011,000	97,920,662,495	91.78	1	1	layanan	100.00	

WA.2885.EBB.951	Layanan Sarana Internal	5,409,267,000	5,237,636,664	96.83	9	9	Paket	100.00	
WA.2885.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	3,107,176,000	3,050,818,176	98.19	1	1	Paket	100.00	
WA.2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	2,888,565,697,000	2,789,232,545,035	96.56					
WA.2886.EBA.956	Layanan BMN	1,780,120,000	1,534,828,423	86.22	522	522	layanan	100.00	
WA.2886.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,564,717,000	1,475,723,514	94.31	34	34	layanan	100.00	
WA.2886.EBA.962	Layanan Umum	6,468,659,000	6,102,541,284	94.34	524	524	layanan	100.00	
WA.2886.EBA.994	Layanan Perkantoran	2,705,284,640,000	2,616,048,281,013	96.70	1,050	1,050	layanan	100.00	
WA.2886.EBB.951	Layanan Sarana Internal	91,831,914,000	89,083,958,352	97.01	1,659	1,658	Paket	99.94	
WA.2886.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	59,883,793,000	54,930,961,677	91.73	79	76	Paket	96.20	
WA.2886.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	448,505,000	407,347,685	90.82	38	38	layanan	100.00	
WA.2886.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3,828,823,000	3,116,994,191	81.41	558	558	Dokumen	100.00	
WA.2886.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	867,496,000	821,067,062	94.65	34	34	Dokumen	100.00	
WA.2886.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	8,276,851,000	7,507,311,828	90.70	1,675	1,675	Dokumen	100.00	
WA.2886.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	8,330,179,000	8,203,530,006	98.48	39	39	Dokumen	100.00	
WA.2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	72,245,887,000	68,253,503,579	94.47					
WA.2887.EBA.956	Layanan BMN	6,480,000	5,160,000	79.63	1	1	layanan	100.00	
WA.2887.EBA.962	Layanan Umum	519,751,000	464,539,560	89.38	1	1	layanan	100.00	
WA.2887.EBA.994	Layanan Perkantoran	20,700,066,000	20,590,658,107	99.47	2	2	layanan	100.00	
WA.2887.EBB.951	Layanan Sarana Internal	2,529,016,000	2,527,391,074	99.94	1	1	Paket	100.00	
WA.2887.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	35,453,884,000	31,834,404,635	89.79	1	1	layanan	100.00	
WA.2887.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	11,758,359,000	11,595,940,608	98.62	904	904	layanan	100.00	
WA.2887.EBC.U02	Diklat Teknis Substansi	373,122,000	366,794,200	98.30	105	105	Orang	100.00	
WA.2887.EBC.U03	Diklat Fungsional	437,245,000	422,471,000	96.62	160	160	Orang	100.00	
WA.2887.EBC.U04	Standarisasi dan Sertifikasi	243,744,000	237,925,070	97.61	105	105	Orang	100.00	
WA.2887.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	137,140,000	135,300,250	98.66	1	1	Dokumen	100.00	
WA.2887.EBD.953	Layanan Pemantauan dan	30,980,000	26,649,075	86.02	1	1	Dokumen	100.00	

	Evaluasi								
WA.2887.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	56,100,000	46,270,000	82.48	1	1	Dokumen	100.00	
WA.2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	46,509,553,000	44,339,776,793	95.33					
WA.2888.EBA.956	Layanan BMN	4,110,000	1,260,000	30.66	1	1	layanan	100.00	
WA.2888.EBA.962	Layanan Umum	57,780,000	56,109,000	97.11	1	1	layanan	100.00	
WA.2888.EBA.994	Layanan Perkantoran	28,446,136,000	27,667,848,474	97.26	2	2	layanan	100.00	
WA.2888.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1,054,854,000	1,051,175,780	99.65	2	2	Paket	100.00	
WA.2888.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	250,760,000	205,794,690	82.07	1	1	layanan	100.00	
WA.2888.EBC.968	Layanan Pendidikan Kedinasan	8,140,843,000	7,584,627,862	93.17	2	2	layanan	100.00	
WA.2888.EBC.U05	Program DIII	1,545,152,000	1,434,605,994	92.85	363	363	layanan	100.00	
WA.2888.EBC.U06	Program DIV	6,994,918,000	6,328,319,993	90.47	1,759	1,759	layanan	100.00	
WA.2888.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,000,000	3,030,000	60.60	1	1	Dokumen	100.00	
WA.2888.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5,000,000	3,615,000	72.30	1	1	Dokumen	100.00	
WA.2888.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	5,000,000	3,390,000	67.80	1	1	Dokumen	100.00	
WA.4203	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	754,943,000	722,751,079	95.74					
WA.4203.EBD.U07	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I	754,943,000	722,751,079	95.74	38	38	Dokumen	100.00	
WA.4204	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	750,189,000	743,801,132	99.15					
WA.4204.EBD.U08	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III	750,189,000	743,801,132	99.15	38	38	Dokumen	100.00	
WA.4205	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	633,892,000	632,803,599	99.83					
WA.4205.EBD.U09	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III	633,892,000	632,803,599	99.83	38	38	Dokumen	100.00	
	Grand Total	4,776,013,194,000	4,338,995,531,817	90.85					

F.11 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Secara umum, pada tahun 2024 BPS mencapai capaian kinerja sebesar 101,80 persen yang menunjukkan bahwa sebagian besar target yang ditetapkan telah tercapai dengan baik. Dari tujuh Indikator Kinerja Utama (IKU), empat indikator mampu melampaui target sehingga memperoleh capaian lebih dari 100,00 persen dan satu indikator mencapai sesuai dengan target sebesar 100 persen. Dari sisi anggaran, BPS mampu mencapai realisasi anggaran sebesar 92,37 persen dari total pagu Rp.4,776,01 Miliar, dengan proporsi terbesar digunakan untuk Program Dukungan Manajemen (98,12%) dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (77,66%).

Beberapa pencapaian utama BPS selama tahun 2024, antara lain Peluncuran National Statistics Command Centre (NSCC) sebagai pusat pemantauan data statistik secara real-time, Kerja sama dengan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) yang menjadikan BPS sebagai Regional Hub on Big Data and Data Science untuk Asia Pasifik. Sementara itu, beberapa kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan BPS selama periode tahun

2024, antara lain Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPSS) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sektorial lintas kementerian/lembaga, peningkatan kerja sama internasional, termasuk kehadiran BPS dalam forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan ASEAN Community Statistical System (ACSS). Penguatan peran dalam Satu Data Indonesia (SDI) juga merupakan kegiatan prioritas BPS lainnya dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Selain itu, Persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) juga menjadi prioritas pada tahun 2024, dimana kegiatannya termasuk pelaksanaan uji coba metodologi.

F.12 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) periode Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 disusun berdasarkan aplikasi MonSAKTI dengan pedoman dari surat Direktur Jenderal Perbendaharaan, yaitu:
 - Surat nomor S-3/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Tahun 2024 (Unaudited).
 - Surat nomor S-1/PB/PB.6/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Perpanjangan Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 terhadap:
 - Penyelesaian transaksi hibah langsung bentuk uang/barang/jasa/surat berharga TA 2024 dan tahun anggaran yang lalu,
 - Penyelesaian transaksi keuangan Satker BLU
 - Koreksi data transaksi keuangan pada dokumen sumber,
 - Penyelesaian pagu minus belanja pegawai dan penyesuaian administratif, termasuk yang berkenaan dengan koreksi SPM/SP2D dan selisih kurs,
 - Penyelesaian SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP TA 2024.
2. Rincian Penggolongan Kualitas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak BPS periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan



3. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (LHP) pada tanggal 15 Januari 2024, Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024 di Lingkungan BPS berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pemerintah Pusat. Penerapan dan penilaian PIPK dilakukan terhadap akun signifikan yang telah disepakati dan ditetapkan objek PIPK Tahun 2024 yaitu akun Persediaan (117xxx). Berdasarkan hasil penilaian PIPK bahwa penerapan Pengendalian Inter atas Pelapaoran Keuangan (PIPK) pada Badan Pusat Statistik adalah Efektif dan Memadai.
4. Berdasarkan data MonSAKTI pada To Do List, BPS masih ada selisih pada Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan sebanyak 12 satuan kerja dengan total Rp31.342.400,00, Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB sebanyak 16 satuan kerja dengan total Rp4.462.870.178,00. Rincian terdapat pada lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan.

Jakarta, 8 Mei 2025

Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti